



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

TRIWULAN III



2025



**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Ahmad Aris

Penyusun:

Saynuddin

Gusrizal

Mochammad Rizki Rohmatullah

Kontributor:

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan III tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 ini memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 yang mencakup 7 Sasaran Kegiatan dan 15 indikator kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama/IKU dan 6 Indikator Kinerja Manajerial/IKM.

Ucapan selamat dan syukur tidak lupa kami sampaikan atas kinerja yang telah diraih Direktorat P3K di Triwulan III Tahun 2025 dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100% (Kategori **"Baik"**, *range* nilai 90% - <110%). Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap individu yang telah menjadi bagian dari keberhasilan ini. Prestasi ini mencerminkan kerjasama dan kolaborasi

yang harmonis lingkup Direktorat P3K. Semangat kolaborasi ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan individu sehingga dapat mendukung kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan KKP secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Direktorat P3K ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode Triwulan III tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V PELAPORAN KINERJA Pasal 22 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim yang merupakan laporan kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja tahunan yang merupakan laporan kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 23 *point* (b) menyebutkan bahwa laporan kinerja interim ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada atasan langsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak triwulan berakhir.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P3K. Kinerja Direktorat P3K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P3K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan program Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat P3K pada periode selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat P3K secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance*, dan *clean government*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 ini belum sempurna. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan di periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 Oktober 2025

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Aris', written over a horizontal line.

Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan III tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja pada periode Triwulan III tahun 2025 mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 dengan 7 Sasaran Kegiatan mencakup 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan beralamat di <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode Triwulan III tahun 2025 (IKU dan IKM) adalah **100% (Kategori "Baik")**. Rentang (*range*) nilai untuk kategori "Baik" adalah 90% - <110%. Dua Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang berkontribusi capaian pada periode Triwulan III 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian Kinerja Tw III 2025
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	-	-	-
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	-	-	-
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	-	-	-
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian Kinerja Tw III 2025
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)	47	-	-	-
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	-	-	-
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	2	2	100
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	-	-	-
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	80	80	100
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P3K pada Triwulan III tahun 2025 didukung sumberdaya antara lain:

A. Anggaran

Nomenklatur awal adalah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K). Jumlah pagu anggaran Direktorat P4K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Seiring dengan perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dan revisi Perjanjian Kinerja (PK), maka pagu Direktorat P3K berdasarkan PK Direktorat P3K yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 27.617.553.000. Namun demikian, Direktorat P3K mengelola pagu efektif untuk membiayai kegiatan lingkup Direktorat P3K sampai Bulan September 2025 sebesar Rp 41.177.266.000 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Sampai Dengan 30 September 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Awal (Rp) ^{a)}	Pagu Berdasarkan PK Dit P3K (30 Juni 2025) ^{b)}	Pagu Efektif (Rp) ^{c)}	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran Berdasarkan Pagu Efektif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	-	10.190.000.000	847.613.869	8,23	9.342.386.131
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000	2.785.830.000	929.302.000	710.564.702	76,46	218.737.298
3	HB.2363	Penataan Jasa Kelautan			17.124.750.000	1.496.354.966	8,74	4.528.395.054
4	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	22.381.938.000	10.732.567.000	2.393.053.079	22,30	8.339.513.921
4	WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL	2.449.785.000	2.449.785.000	2.200.647.000	1.458.245.329	66,26	742.401.671
Total			61.117.553.000	27.617.553.000	41.177.266.000	6.905.831.945	16,77	34.271.434.055

Sumber: Direktorat P3K (Akhir September 2025)

Keterangan : ^{a)} pada kolom 4 menunjukkan pagu anggaran awal yang merupakan pagu total anggaran sebelum blokir.

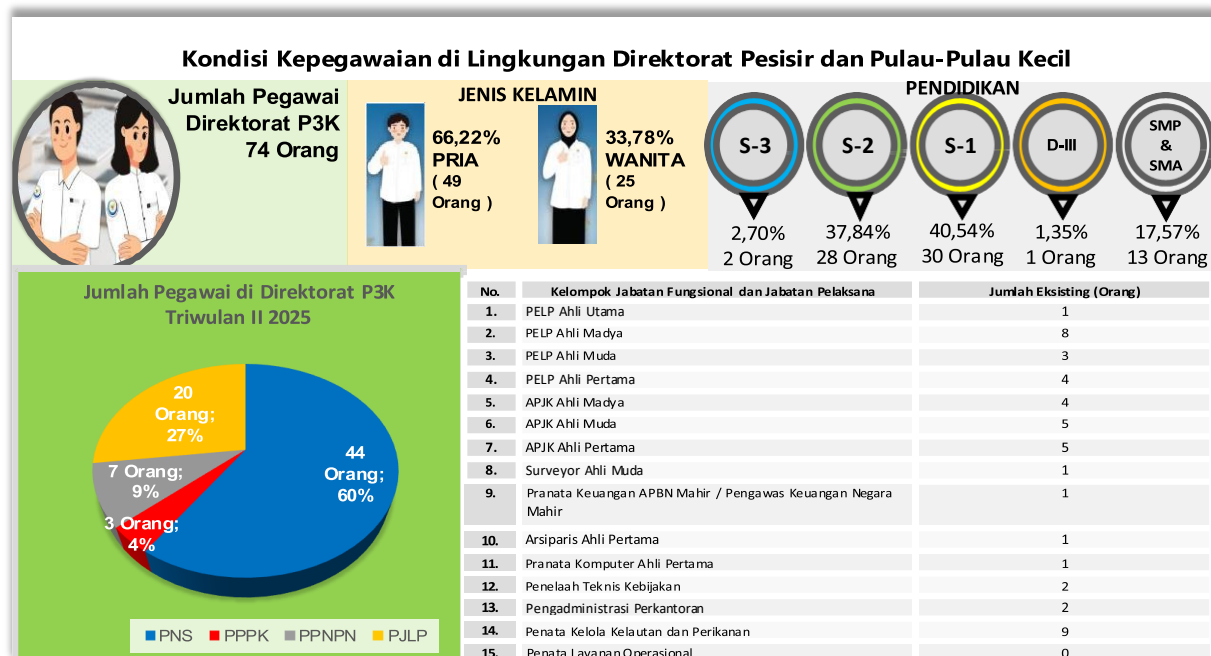
^{b)} pada kolom 5 menunjukkan pagu anggaran berdasarkan PK Direktorat P3K (30 Juni 2025) merupakan pagu setelah blokir efisiensi.

^{c)} pada kolom 6 menunjukkan pagu anggaran buka blokir PNPB.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran awal sebesar Rp 61.117.553.000 dan pagu efektif sebesar Rp 41.177.266.000. dan realisasi anggaran sampai dengan akhir September 2025 sebesar Rp 6.905.831.945 atau 16,77% dari pagu efektif. Sisa anggaran sebesar Rp 34.271.434.055. Realisasi anggaran yang kecil sampai dengan Triwulan III 2025 disebabkan oleh faktor kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran (blokir anggaran) kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

B. Sumberdaya Manusia

Salah satu sumberdaya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P3K adalah sumberdaya manusia (SDM) atau pegawai. Jumlah Pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 74 orang. Kondisi kepegawaian Direktorat P3K sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Sampai dengan Triwulan III 2025
Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III 2025)

Pelaksanaan berbagai kegiatan lingkup Direktorat P3K sampai dengan triwulan III 2025 berjalan lambat karena menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat P3K dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025, antara lain:

1. Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemblokiran atau pemotongan anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan lancar sekaligus juga berdampak kepada realisasi anggaran yang rendah.
2. Perubahan nomenklatur dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 96/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dampak dari adanya Keputusan Menteri Kelautan and Perikanan ini adalah dilakukannya penataan kembali pegawai negeri sipil di unit kerja lingkup Ditjen PK.
4. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025. Penyusunan PK ini membutuhkan waktu guna mengharmonisasikan nomenklatur Indikator Kinerja baik IKU maupun IKM dan target di internal Direktorat P3K maupun harmonisasi antara Direktorat P3K dengan Tim Kerja Program Setditjen Pengelolaan Kelautan .

5. Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025-2029 dan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah belum ditetapkan sampai dengan periode Triwulan III 2025.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P3K dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, antara lain:

1. Melakukan pembahasan secara bersama dan intensif berkaitan dengan berbagai *issue* strategis termasuk anggaran, maupun rencana strategis unit kerja eselon I tahun 2025-2029 dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Tim Setjen KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), universitas atau perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
2. Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP.
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja.....	2
1.4. Isu Strategis 2025-2029	3
1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Visi, Misi, Arah Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional.....	14
2.2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	20
2.3. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 .	21
2.4. Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025.....	23
2.5. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.....	24
2.6. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.....	24
2.7. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Umpan Balik (Feedback) Perencanaan dan Penetapan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	26
2.8. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.1.1. IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)”	33
3.1.2. IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai).....	49
3.1.3. IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	61
3.1.4. IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	75
3.1.5. IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	83
3.1.6. IKU 06. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	92
3.1.7. IKU 07. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)	111
3.1.8. IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	116
3.1.9. IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	121
3.1.10. IKM 10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	139
3.1.11. IKM 11. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Dokumen)	145
3.1.12. IKM 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Indeks)	148
3.1.13. IKM 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	153

Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	
3.1.14. IKM 14. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	157
3.1.15. IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	160
3.2. Perkembangan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) Sampai Dengan Triwulan III tahun 2025.....	165
3.3. Perkembangan <i>Ocean for Prosperity</i> (LAUTRA) Sampai Dengan Triwulan III tahun 2025	170
3.4. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Dukungan Penyiapan Lahan Garam Tahun 2025	174
3.5. Realisasi Anggaran Direktorat P3K Per Tanggal 30 September 2025.....	181
BAB IV. PENUTUP.....	195
4.1. SIMPULAN.....	195
4.2. REKOMENDASI.....	198
4.3. TINDAK LANJUT	199
LAMPIRAN.....	202

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Triwulan III tahun 2025	v
Tabel 2. Pagu Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Tahun 2025 Sampai Dengan 30 September 2025	vii
Tabel 3. Matriks <i>SWOT</i> Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia	6
Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2025	12
Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka	15
Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN 2025-2029	19
Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2029	19
Tabel 8. Sasaran Strategis KKP Tahun 2025	22
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	25
Tabel 10. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	26
Tabel 11. Status Indeks Capaian IKU atau IKM	29
Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025	31
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" Triwulan III tahun 2025	35
Tabel 14. Capaian Kegiatan Serah Terima Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah pada Triwulan III Tahun 2024	38
Tabel 15. Bentuk Dukungan Para Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Sampah Laut	44
Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan 30 September 2025	48
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" Triwulan III Tahun 2025	51
Tabel 18. Kegiatan pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai Triwulan III tahun 2025	53
Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 September 2025	59
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" Triwulan III tahun 2025	64
Tabel 21. Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun <i>SDG's</i>	66
Tabel 22. Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai Triwulan III tahun 2025	70
Tabel 23. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai dengan 30 September 2025	74
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" Triwulan III Tahun 2025	76
Tabel 25. Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai Triwulan III tahun 2025	78
Tabel 26. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai dengan 30 September 2025	82
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU "Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)" Triwulan III tahun 2025	83

Tabel 28.	Target dan capaian IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” pada triwulan III tahun 2024	84
Tabel 29.	Kebijakan Mangrove di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Mangrove di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun <i>SDG's</i>	85
Tabel 30.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Sampai dengan Akhir 30 Juni 2025	90
Tabel 31.	Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit	94
Tabel 32.	Target dan Realisasi IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” Triwulan III tahun 2025	99
Tabel 33.	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan III 2024	101
Tabel 34.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 30 September 2025	110
Tabel 35.	Target dan Realisasi “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Triwulan III Tahun 2025	111
Tabel 36.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Sampai Dengan 30 September 2025	115
Tabel 37.	Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Triwulan III tahun 2025	116
Tabel 38.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 30 September 2025	120
Tabel 39.	Target dan Realisasi IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Triwulan III Tahun 2025	122
Tabel 40.	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (11 pulau) dan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil (13 pulau) Pada Triwulan III 2024	130
Tabel 41.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 30 September 2025	138
Tabel 42.	Kategori Nilai PM SAKIP	140
Tabel 43.	Target dan Capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” Triwulan III tahun 2025	140
Tabel 44.	Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 September 2025	144
Tabel 45.	Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” Triwulan III tahun 2025	145
Tabel 46.	Realisasi Anggaran IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 30 September 2025	147
Tabel 47.	Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan III tahun 2025	149
Tabel 48.	Realisasi Anggaran IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 30 Juni 2025	152
Tabel 49.	Target dan Capaian IKM 13 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan III Tahun 2025	153
Tabel 50.	Realisasi Anggaran IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 September 2025	156
Tabel 51.	Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan III tahun 2025	157
Tabel 52.	Realisasi Anggaran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 September 2025 ...	159

Tabel 60.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan III tahun 2025	161
Tabel 62.	Realisasi Anggaran IKM “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 30 September 2025	164
Tabel 63.	Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) sampai Triwulan III (Januari-September) tahun 2025	165
Tabel 64.	Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai dengan Triwulan III (Januari-September) Tahun 2025	170
Tabel 65.	Perkembangan Kegiatan Terkait Pergaraman Sampai Dengan Bulan September 2025	176
Tabel 66.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I tahun 2025	199
Tabel 67.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan II tahun 2025	200
Tabel 68.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan II Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan III tahun 2025	201

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Sampai dengan Triwulan III 2025	viii
Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8
Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II	11
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025	11
Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	13
Gambar 6. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029	14
Gambar 7. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P3K dari Pengukuran IKU dan IKM Triwulan III Tahun 2025	31
Gambar 8. Program Prioritas KKP Tahun 2025	41
Gambar 9. Tantangan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dan Kebijakan yang Ditempuh oleh KKP	42
Gambar 10. Hubungan <i>SDG's</i> 14 dengan <i>SDG's</i> 1, <i>SDG's</i> 2, <i>SDG's</i> 8, <i>SDG's</i> 11, <i>SDG's</i> 12, dan <i>SDG's</i> 13	44
Gambar 11. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil	62
Gambar 12. Dampak Perubahan Iklim	62
Gambar 13. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T	93
Gambar 14. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T	94
Gambar 15. Contoh Sertipikat yang telah terbit	98
Gambar 16. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT	107
Gambar 17. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Kerjasama Pemanfaatannya	110
Gambar 18. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya	137
Gambar 19. Siklus Pengelolaan Kinerja	139
Gambar 20. Tangkapan Layar Capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Ditjen PK" Periode Triwulan III 2025	154
Gmabr 21. Tangkapan Layar Rekapitulasi Capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Ditjen PK" Periode Triwulan III 2025	155
Gambar 22. Hasil Survey Rencana Lokasi Tambak Garam Industri di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur	180
Gambar 23. Rencana <i>Modelling</i> Ekstensifikasi Tambak Garam di Sabu Raijua dan Teluk Kupang	180
Gambar 24. Komposisi Realisasi Anggaran Direktorat P3K Per Tanggal 30 September 2025	187

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2025 Yang Dltandatangani Pada Tanggal 24 Januari 2025	202
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Dltandatangani Pada Tanggal 30 Juni 2025	203
Lampiran 3. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025	204
Lampiran 4. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direkorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	205
Lampiran 5. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan III 2025	208
Lampiran 6. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	217
Lampiran 7. Rekaman Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode Triwulan III tahun 2025	218
Lampiran 8. Penghargaan Yang Diterima Direktorat P3K Sampai Dengan Triwulan III 2025 ...	219
Lampiran 9. <i>Platform Digital</i> atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	220

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki 17.504 pulau, dimana sampai tahun 2023 telah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 17.024 pulau, sedangkan 350 pulau lagi telah dibakukan namanya dan akan dilaporkan ke PBB pada tahun 2024. Sehingga jumlah pulau yang telah dibakukan pada *Gazeter* Republik Indonesia adalah sebanyak 17.374 pulau. Dari jumlah 17.374 pulau tersebut sebanyak 14.807 adalah pulau kecil dengan status sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan sebanyak 5.955 pulau.
- b. Sebagian Area Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan sebanyak 2.073 pulau.
- c. Area Penggunaan Lain sebanyak 6.779 pulau.

Pulau-pulau kecil Indonesia memiliki tipologi, topografi, dan luasan yang beragam. Sekitar 1.766 pulau (10,59%) merupakan pulau berpenduduk dan 14.905 pulau (89,41%) tidak berpenduduk. Mayoritas pulau Indonesia termasuk pulau sangat kecil (*tiny island*) dengan luas di bawah 100 km² yang sangat rentan mengalami kerusakan baik akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim sehingga memiliki risiko tinggi dalam pemanfaatannya.

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia sebanyak 111 PPKT berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Keppres ini berfungsi untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara, mengamankan perbatasan negara dan mencegah potensi masalah seperti penjualan pulau kepada pihak asing, serta mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Disamping terkandung sumberdaya alam non hayati tak terbaharui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*) yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumberdaya hayati tinggi, dan jasa lingkungan. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terdepan; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan dan punahnya beberapa spesies perikanan serta isu bencana di wilayah pesisir seperti *rob*, gelombang pasang, tsunami, dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar.
2. Restorasi kawasan pesisir.
3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, dan menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Direktorat P3K kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Direktorat P3K pada Triwulan III tahun 2025.
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat P3K.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Direktorat P3K.
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Direktorat P3K.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4. Isu Strategis Tahun 2025-2029

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P3K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Penanganan sampah laut di kawasan pesisir merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam menghadapi tantangan meningkatnya volume sampah plastik yang mencemari lingkungan laut. Penanganan sampah laut di kawasan pesisir serta pencemaran di laut menjadi tantangan yang harus ditangani melalui pengelolaan limbah yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya diberikan peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal sesungguhnya masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal dengan mengintegrasikan peran mereka dalam penyusunan serta implementasi kebijakan kelautan dalam rangka memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan kearifan lokal.
4. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
5. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: belum terkoordinasinya bank data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.

6. Degradasi lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi tantangan yang harus diatasi melalui rehabilitasi ekosistem. Strategi utama di sini adalah melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak untuk mengembalikan keseimbangan ekologis dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Peningkatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi fokus untuk menghadapi risiko bencana, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, serta menjaga keberlanjutan hidup masyarakat pesisir, mengingat wilayah tersebut rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
8. Pemulihan ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi prioritas utama guna menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan sumber daya alam.
9. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
10. Selain itu, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
11. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu hal penting dalam upaya pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menentukan strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Salah satu metode analisis dalam penentuan strategi adalah analisis *SWOT* yakni dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*). Kekuatan dan kelemahan berasal dari internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari luar organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar organisasi yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan analisis *SWOT*, maka organisasi dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dan potensi strategis yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berikut di bawah ini merupakan analisis *SWOT* pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil

SWOT MATRIK
PENGEMBANGAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

E X T E R N A L	INTERNAL		
	OPPORTUNITIES (O)	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
		S-O STRATEGY	W-O STRATEGY
	THREATS (T)	S-T STRATEGY	W-T STRATEGY

Keterangan:

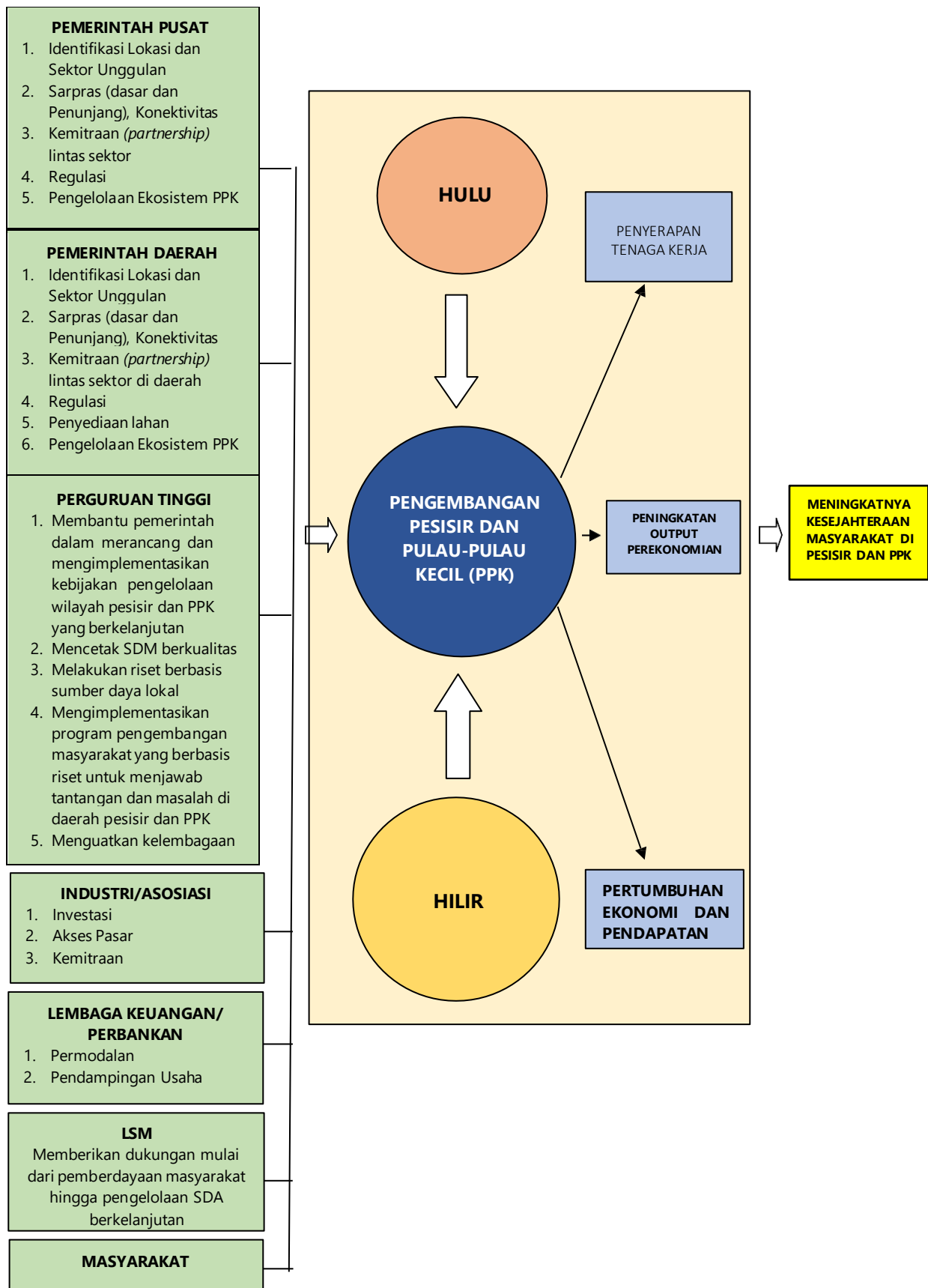
Eksternal Internal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	<u>Strategi (S-O)</u> Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk merebut peluang (<i>opportunities</i>) Strategi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) berbasis wilayah dan ekonomi lokal	<u>Strategi (W-O)</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan merujuk regulasi dan kebijakan, serta dukungan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah
Threats (T)	<u>Strategi (S-T)</u> Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk mengatasi ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan melakukan sosialisasi program dan kegiatan, dan berbasis masyarakat	<u>Strategi (W-T)</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan (<i>weaknesses</i>) untuk menghindari ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) berbasis masyarakat dan bimtek/pelatihan berbasis masyarakat

Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

INTERNAL EKSTERNAL	<u>STRENGTHS (S)</u> 1. Sumberdaya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis tinggi. 2. Daya tarik yang tinggi (misalnya: panorama alam yang indah, dan lain-lain). 3. Kunjungan wisatawan domestik dan asing relatif tinggi. 4. Kemudahan aktivitas yang dapat dilakukan di pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK), misalnya: budidaya laut, wisata bahari, dan lain-lain.	<u>WEAKNESSES (W)</u> 1. Rentan terhadap bencana alam dan risiko. 2. Aksesibilitas yang relatif sulit. 3. Sarana dan prasarana (infrastruktur) yang kurang. 4. Masih rendahnya pengawasan sumberdaya alam.
	<u>OPPORTUNITIES (O)</u> 1. Minat yang besar dari calon investor yang mempunyai modal kuat dan berkarakter <i>risk taker</i> untuk berinvestasi. 2. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK). 3. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK.	<u>W-O STRATEGY</u> 1. Dukungan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan <i>platform</i> terkait lainnya untuk memberikan masukan kepada para calon investor. 2. Penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). 3. Kemudahan aksesibilitas. 4. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di pusat dan daerah. 5. Bimtek dan pelatihan pengurangan risiko dan mitigasi bencana (misalnya: Sekolah Pantai Indonesia (SPI), penyadartahuan masyarakat akan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), dan lain-lain).
	<u>S-T STRATEGY</u> 1. Pengembangan sektor unggulan. 2. Kepastian hukum dan berusaha. 3. Sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK kepada para calon investor. 4. Pengelolaan aset laut dan pesisir mencakup perikanan, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain dalam rangka mendukung kebijakan <i>Blue Economy</i>	<u>W-T STRATEGY</u> 1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani Informasi Geospasial Tematik (IGT) (misalnya: Kemendagri, Bakosurtanal, BIG, dll).
	<u>THREATS (T)</u> 1. Perubahan iklim (<i>climate change</i>), pemanasan global (<i>global warming</i>), sampah laut.	<u>S-T STRATEGY</u> 1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

2. <i>Issue-issue</i> tentang penjualan PPK, sampah plastik di laut, pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan PPK, tenggelamnya PPK, sengketa PPK antar daerah, dan pencaplokan PPK oleh negara lain, dan lain-lain. 3. Anggapan kehadiran investor akan mengubah kearifan lokal (<i>local wisdom</i>).	2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ekonomi (misalnya: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, dan lain-lain) untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana laut, pengendalian perubahan iklim, ketahanan bencana, pencemaran laut, dan restorasi ekosistem (misalnya Kementerian LH/BPLH, BMKG, Perguruan Tinggi/Universitas, LSM, dan lain-lain). 4. Sosialisasi program dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat setempat.	2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani penyediaan sarana dan prasarana umum (misalnya: Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dll). 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (misalnya: Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/BEK). 4. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan PPK.
---	--	--

Sinergi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan pada gambar alur di bawah ini.



Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada BAB III Susunan Organisasi Pasal 7 mengenai susunan organisasi KKP terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
10. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
12. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga.
13. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terbagi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yaitu: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sedangkan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem.
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Direktorat Jasa Bahari.
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.

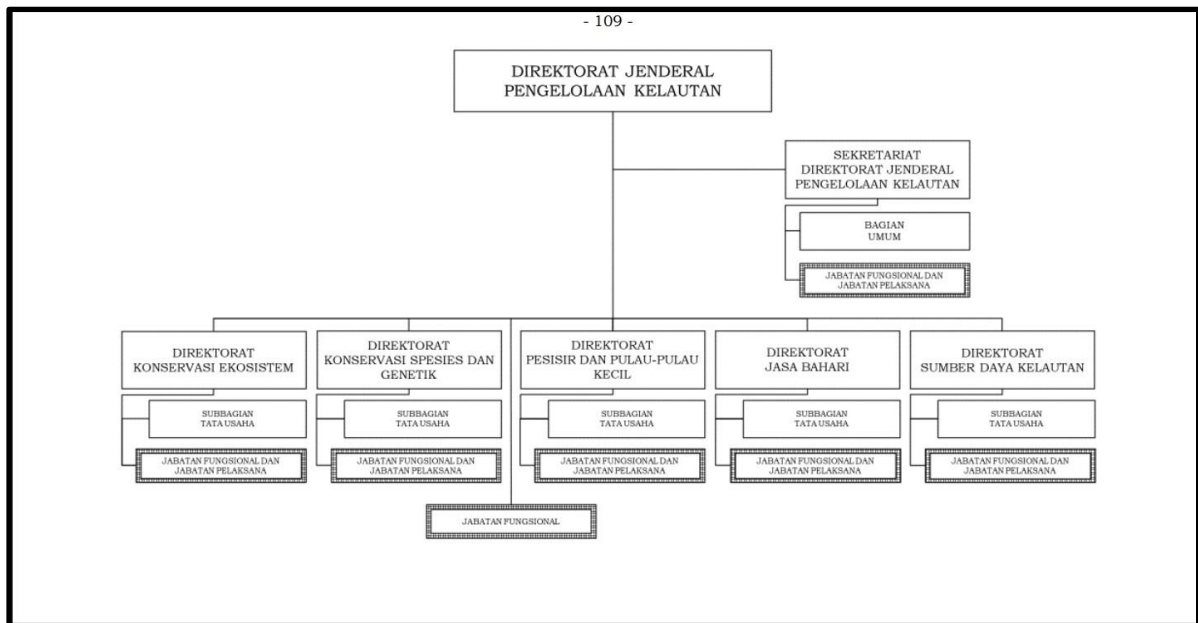
Pasal 96 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Susunan organisasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

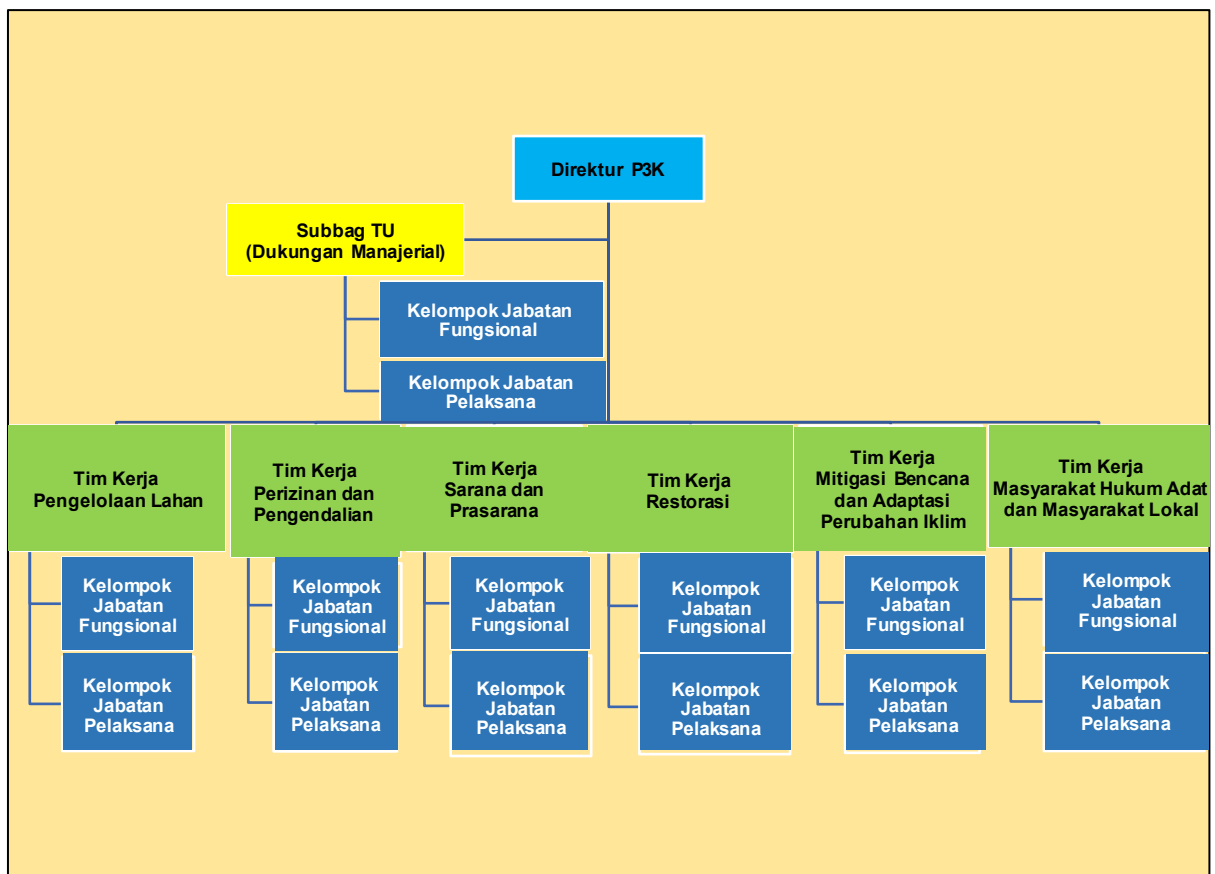
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 98 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025 sebagaimana digambarkan di bawah ini.



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025

Jumlah pegawai Direktorat P3K yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat P3K pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 74 orang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 25 orang Wanita. Jumlah PNS sebanyak 44 orang (60%), 20 orang PJLP (27%), 7 orang PPNPN (9%), dan 3 orang PPPK (4%) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 5**.

Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah terbentuk. Merujuk kepada Surat Nomor B.124/DJPK.4/TU.210/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 Hal Penyampaian Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, telah disampaikan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 April 2025. Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2025

No.	Nama Tim Kerja	Jumlah Pegawai dalam Tim Kerja	Ketua Tim Kerja
1.	Tim Kerja Pengelolaan Lahan	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Reni Indrawati, S.T., M.M.
2.	Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	15 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 14 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Partini, S.Pi., M.Si.
3.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	19 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 18 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.
4.	Tim Kerja Restorasi	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.
5.	Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	13 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 12 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.
6.	Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Tely Dasaluti, S.Si., M.P.
7.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	18 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 17 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Saynuddin, S.Pi.

Sumber: Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 Tanggal 14 April 2025

Keterangan:

- Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 Mei 202, ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/MEN-SJ/KP.430/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 dan Berita Acara (BA) Pengambilan Sumpah PNS Nomor 99/BAB/P-PENGAWAS/VII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025, Saynuddin dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat P3K sehingga nomenklatur Tim Kerja Dukungan Manajerial berganti nama menjadi Subbagian Tata Usaha.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025 disusun berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:



Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 adalah **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini jika dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: "Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerjasama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat".



Gambar . Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029

Visi tersebut diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas.

Delapan (8) misi yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	a. <i>Stunting</i> (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. b. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. c. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi <i>parenting</i>. d. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten	a. Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar <i>World Health Organization</i> (WHO) harus segera dibenahi. b. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. c. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. d. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	a. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. b. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. c. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	a. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah sekolah unggulan di setiap kabupaten. b. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (<i>non-boarding school</i>) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. c. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	a. Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. b. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. c. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up, kredit untuk para generasi millennial dan

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. d. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	a. Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. b. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (<i>landed house</i>), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	a. Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. b. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Sumber: <https://prabowosubianto.com/8-program-hasil-terbaik-cepat-prabowo-gibran/>

Sedangkan tujuh belas (17) program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
3. Pemberantasan kemiskinan.
4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Penjelasan
Sasaran Visi 1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju: 1. Pendapatan per kapita Indonesia menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. 2. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen. 3. Kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen.
Sasaran Visi 2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang: 1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen. 2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,29-0,32. 3. Ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.
Sasaran Visi 3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat: 1. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. 2. <i>Global Power Index</i> masuk ke dalam 15 besar dunia.
Sasaran Visi 4	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat: Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan kesehatan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan 19 kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (<i>Human Capital Index</i>) menjadi 0,73.
Sasaran Visi 5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission: Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5% serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Delapan (8) Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045

Agenda	Penjelasan
Agenda 1	Mewujudkan Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera, adil, dan kohesif.
Agenda 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi: Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Agenda 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola: Membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Agenda 4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan.
Agenda 5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, Masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
Agenda 6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan: Neujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan Pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
Agenda 7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan: Menjadi factor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budayadan ekologi.

Agenda 8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan: Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan Pembangunan yang inovatif.
-----------------	--

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 pada Pasal 2 ayat (1), RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.

Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta).

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. RPJMN wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

2.2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 pada tanggal 30 Desember 2024.

Arah dan kebijakan KKP tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan Pembangunan global, terdiri atas:

1. Memperluas Kawasan konservasi laut.
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan.
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.
2. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

2.3. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Sebagai Kementerian/Lembaga yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025- 2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Swasembada Pangan yang Merata di Sentra-Sentra Produksi Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 5, dan 8;
3. “Meningkatkan Nilai Tambah, Hilirisasi dan Penjaminan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 5;
4. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2; dan
5. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;

2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Tujuan akhir (*ultimate goal*) Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat. Adapun Sasaran Strategis (SS) dari pembangunan kelautan dan perikanan periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran Strategis KKP Tahun 2025

Sasaran Strategis (SS) KKP	Uraian
SS -01	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut
SS-02	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan
SS-03	Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
SS-04	Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
SS-05	Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan I Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut", dengan indikator kinerja yaitu tingkat pengelolaan konservasi dari 63,7 pada tahun 2025 menjadi 68,7 pada tahun 2029

Sasaran Strategis Kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Nilai kontribusi sektor kelautan terhadap PDB maritim dari 2,25 triliun rupiah pada tahun 2025 menjadi 3 triliun rupiah pada tahun 2029;
2. Pertumbuhan PDB perikanan dari 4-6% pada tahun 2025 menjadi 6-7% pada tahun 2029;
3. Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
4. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
5. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,06% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
6. Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 pada tahun 2029; dan
7. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman dari <80% pada tahun 2025 menjadi <80% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Nilai ekspor produk perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
2. Angka konsumsi ikan dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
3. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”, dengan indikator kinerja yaitu Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja dari 75% pada tahun 2025 menjadi 79% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”, dengan indikator kinerja yaitu Indeks reformasi birokrasi KKP (indeks) dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025-2029, sampai saat ini dalam proses penyusunan sehingga untuk perencanaan tahun 2025-2029 mengacu pada Rancangan Renstra KKP Tahun 2025-2029.

2.4. Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 belum ditetapkan hingga Triwulan III 2025, masih dalam bentuk Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang di dalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam menuntaskan agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan, perlu disusun Renstra DJPK 2025-2029 dalam mendukung Renstra KKP 2025-2029, sejalan dengan reformulasi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang menekankan ekologi sebagai panglima untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Sambil menunggu Renstra DJPK 2025-2029 ditetapkan, maka pada bagian ini masih menggunakan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) 2020-2024. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan tahun 2025-2029 mendukung terwujudnya visi KKP. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020-2024 adalah **“Pengelolaan Ruang laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**

Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang laut Tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya misi KKP, maka misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Sedangkan Sasaran Program mengacu kepada Perjanjian Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025. Sasaran Program Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
2. Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks *CITES*.
3. Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih.

4. Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali.
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam.
7. Meningkatnya Kualitas Produksi Garam.
8. Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan.
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

2.5. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Tujuh (7) Sasaran Kegiatan Direktorat P3K yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi.
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan.
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal.
6. Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dari Bulan Januari 2025 hingga Bulan September 2025, telah dilakukan dua kali penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada BAB III Susunan Organisasi Pasal 7 mengenai susunan organisasi KKP, serta perubahan nomenklatur dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, yaitu:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dimana Pihak Pertama Penanda tangan PK (Direktur P4K) adalah Bapak Muhammad Yusuf. PK ini meliputi 5 Sasaran Kegiatan (SK), 16 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 dimana Pihak Pertama Penanda tangan PK (Direktur P3K) adalah Bapak Ahmad Aris. PK ini meliputi 7 Sasaran Kegiatan (SK), 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pada Triwulan III tahun 2025, sudah menggunakan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025 sebanyak 15 indikator kinerja (9 Indikator Kinerja Utama/IKU dan 6 Indikator Kinerja Manajerial/IKM) dalam 7 Sasaran Kegiatan (SK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi. PK Direktorat P3K yang disusun pada Bulan Juni 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80

Sumber: Direktorat P3K Tahun 2025

2.7. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Umpan Balik (*Feedback*) Perencanaan dan Penetapan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

Penentuan target indikator kinerja Direktorat P3K tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2024, kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, serta matrik *cascading* dari unit kerja level 0 (KKP) maupun level I (Ditjen PK) pada tahun 2025 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan penanggulangan sampah laut pada tahun 2024 adalah "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" dengan satuan ukur adalah kawasan.
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan	55	Indikator Kinerja Utama (IKU) ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, IKU ini belum muncul.

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
	pesisir dan pulau - pulau kecil		Pulau-Pulau Kecil (Nilai)		Perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana dan perubahan iklim (MBAPI) pada tahun 2024 adalah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan) dengan satuan ukur adalah Kawasan.
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi pada tahun 2024 adalah "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)" dengan satuan ukur adalah Kawasan.
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya pada tahun 2024 adalah Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau) dengan satuan ukur adalah pulau.
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	IKU ini berkaitan dengan bantuan sarana ekonomi produktif pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2024, IKU ini berkaitan dengan Pembangunan dermaga apung
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat serta masyarakat tradisional dan masyarakat lokal pada tahun 2024 adalah: a. Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas). b. Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	IKU ini baru muncul pada tahun 2025.
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	70	Nomenklatur Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. Beberapa catatan IKM ini pada tahun 2025, antara lain: a. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 81, sedangkan capaiannya sebesar 86,60. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 70.
		11.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan	3	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur dan target IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
			Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)		IKM pada tahun 2024, namun pengisian target IKM pada tahun 2025 dimulai pada periode Triwulan III 2025 sehingga target dari Triwulan III sampai IV sebanyak 3 dokumen. b. Target dan capaian IKM ini pada tahun 2024 sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80	Nomenklatur IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. Beberapa catatan IKM ini pada tahun 2025, antara lain: a. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 88, sedangkan capaiannya sebesar 88,06. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80.
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur IKM ini pada tahun 2024 yaitu "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" dengan target sebesar 80 sedangkan capaian sebesar 93,10. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80 berarti ada peningkatan target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 5 point.
		14.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur dan target IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur dan target IKM pada tahun 2024. b. Target dan capaian IKM ini pada tahun 2024 sebanyak 100 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. b. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75 sedangkan capaian sebesar 96,74. c. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80.

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024

2.8. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semester, dan tahun) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut

dimasukan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU atau IKM. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU atau IKM. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU atau IKM sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%.
Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP ([kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) ditetapkan sebesar 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi tersebut dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-36/AG/2012 Tanggal 5 April 2012 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran juga menyebutkan bahwa angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Capaian minimum adalah 0%.
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU atau IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
4. Status indeks capaian IKU sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Status Indeks Capaian IKU atau IKM

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 - 120	Istimewa
	nilai 90 - <110	Baik
	nilai 70 - <90	Cukup
	nilai 50 - <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerja (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

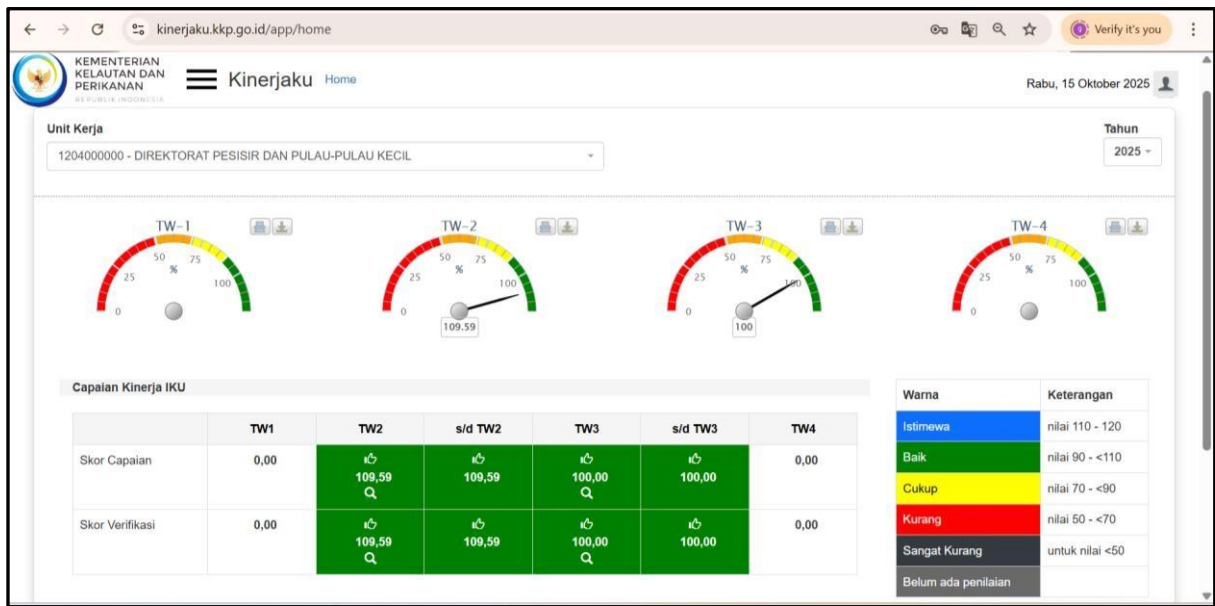
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi atau capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K yang merujuk kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 sebanyak 15 indikator kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 (IKU + IKM) adalah **"100%" (Kategori "Baik")**. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, rentang (*range*) nilai kategori "Istimewa" adalah 90% - <110%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P3K pada Triwulan III tahun 2025 didukung sumberdaya antara lain:

- Pada saat nomenklatur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dimana jumlah pagu anggaran awal sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Terjadi perubahan nomenklatur dari Direktorat P4K menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K). Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 disebutkan jumlah pagu anggaran Direktorat P3K sebesar Rp 27.617.553.000. Namun demikian, berdasarkan data dan informasi dari Tim Keuangan Direktorat P3K, pagu efektif yang dikelola sebesar Rp 41.177.266.000 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Jumlah Pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 74 orang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 25 orang Wanita. Jumlah PNS sebanyak 44 orang (60%), 20 orang PJLP (27%), 7 orang PPNP (9%), dan 3 orang PPPK (4%) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 5**.
- Peralatan dan mesin yang dimiliki kantor yang dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- Metode.
- Sumberdaya lainnya.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% (**kategori "Baik"**, skala nilai 90% - <110%.) berdasarkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id>) disajikan pada Gambar di bawah ini. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Gambar 7. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K dari Pengukuran IKU dan IKM Triwulan III Tahun 2025

Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	% Capaian Kinerja TW III 2025
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	-	-	-
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	-	-	-
	IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	-	-	-
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	IKU 04. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
	IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	IKU 06. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	-	-	-
	IKU 07. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	-	-	-

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	% Capaian Kinerja TW III 2025
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	IKU 08.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	IKU 09.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	IKM 10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	-	-	-
		IKM 11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	2	2	100
		IKM 12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	-	-	-
		IKM 13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	80	80	100
		IKM 14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		IKM 15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama, IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Baik" (Range Nilai 90%-<110%)

IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 18 ton pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini tidak hanya ditemukan pada lahan tanah saja, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Merujuk pada *the National Geographic*, sampah laut atau *marine debris* adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak. Studi *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada tahun 2021 menyebutkan, 80% sampah laut berasal dari daratan. Sampah itu terbawa aliran sungai, saluran air, hingga aktivitas pesisir. Sisanya datang dari aktivitas di laut, seperti perkapalan, perikanan, dan wisata bahari. Sampah laut di Indonesia didominasi oleh bahan sintesis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, polistirena, kaleng, botol plastik dan botol kaca, polietilen, plastik dan kaca.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 50,06 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen tidak terkelola, dan sebagian besar berakhir di laut. Diperkirakan 16,02 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia. Kemudian sampah laut sendiri dari aktivitas laut itu kurang lebih 20% atau 4 juta ton. Jadi ada kurang lebih 20 juta ton sampah laut yang harus ditangani per tahun.

Pencemaran lingkungan akibat sampah menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut, dimana ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Selain itu, tumpukan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghambat pertumbuhan biota yang berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat biota laut. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Tidak hanya lingkungan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga terdampak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi

masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan. Bagi nelayan, sampah laut berarti berkurangnya hasil tangkapan. Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa keberadaan sampah plastik dapat menurunkan hasil tangkap hingga 30% karena ikan menjauh dari habitat tradisional. Selain itu, 30–40% alat tangkap nelayan rusak akibat tersangkut sampah di laut. Kerugian ekonomi dari sampah laut di Indonesia ditaksir mencapai miliaran dolar per tahun.

Permasalahan sampah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai. Walaupun beberapa program pembersihan pantai telah dilakukan, akan tetapi, hasilnya belum signifikan karena sampah terus berdatangan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Salah satu dasar hukum yang mendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)”, antara lain:

1. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Desa Pesisir Bersih (DPB)

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pendukung IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut Sebasah).

KKP memandang sampah laut sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan ekonomi biru. Untuk menjawab persoalan ini, KKP meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai orkestrasi nasional pengurangan sampah laut. Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk

pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula Penghitungan Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" sebagai berikut:

Dihitung dari jumlah volume sampah yang terkumpul dari Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan jumlah volume sampah yang dikelola dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB).

Target dan realisasi IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 01 (SK-01)		Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 01		Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
17	51	-	-	-	-	18	-	1.244	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Namun demikian, telah dilakukan kegiatan pendukung IKU ini yang memberikan kontribusi capaian berupa jumlah sampah yang terkumpul sampai dengan triwulan III 2025 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.

(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).

2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Jadi, capaian tersebut di atas ini (jumlah sampah terkumpul seberat 79,2 ton) telah melebihi target IKU Nomor 01 pada tahun 2025 sebesar 18 ton.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Namun demikian, telah dilakukan kegiatan pendukung IKU ini yang memberikan kontribusi capaian berupa jumlah sampah yang terkumpul sampai dengan triwulan III 2025 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.

(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).

2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Terdapat perbedaan IKU pada tahun 2025 dengan 2024. Namun demikian, berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang bersih, penanganan sampah, dan penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada periode triwulan III 2024 menggunakan nomenklatur IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" dengan target kegiatan pendukung capaian IKU adalah Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan Desa Pesisir Bersih (DPB). Target "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" pada triwulan III 2024 sebanya 7 kawasan dengan capaian sebanyak 17 kawasan terdiri dari capaian Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) sebanyak 9 kawasan dan serah terima bantuan sarana pengelolaan sampah pada triwulan III tahun 2024 di 8 kawasan. Capaian 9 kawasan untuk ABPL sampai dengan triwulan III 2024 sebagai berikut:

- a. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Barat. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 700 kg.
- b. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 60-70 ton
- c. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka Rangkaian Festival Nelayan Petik Laut di Kabupaten Probolinggo. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 588,38 Kg yang terdiri dari 201,85 Kg sampah organik seperti daun dan ranting, serta 386,53 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- d. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka Festival Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1.512 Kg (1,5 ton) yang terdiri dari 450 Kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 1062 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- e. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka *World Oceans Day (WOD)* di 26 kabupaten/kota. Dalam memorandum ini juga disebutkan total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni dari 26 kabupaten/kota sebanyak 21.816 Kg.
- f. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Indramayu. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 24170 kg yang terdiri dari 18620 Kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 5550 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- g. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Buleleng. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1384 kg yang terdiri dari 1125 Kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 259 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- h. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Pasuruan. ABPL dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 12 dan 13 September 2024 dengan melibatkan 300 peserta dan 1 unit eskavator, 1 unit mini dozer, 4 unit dumptruck dan 4 unit motor roda tiga. Adapun sampah terkumpul selama kegiatan APBL pada hari pertama sebanyak 214,5 ton dan hari kedua 161,5 ton dengan jumlah total seberat 376 ton. Hasil sampah yang dikumpulkan, diangkut dan dilakukan penimbunan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan di Desa Tampung yang berlokasi sekitar 1,8 Km dari lokasi pantai Desa Jatirejo dan Desa Tambak Lekok.
- i. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Sumbawa. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 542,5 kg yang terdiri dari 279 kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 263,5 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.

Sedangkan capaian 8 kawasan untuk kegiatan serah terima bantuan sarana pengelolaan sampah pada triwulan III tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 14. Capaian Kegiatan Serah Terima Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah pada Triwulan III Tahun 2024

No	Lokasi	Bantuan	Kelompok Penerima Bantuan	Berita Acara Serah Terima (BAST)
1.a	Gampong Meulingge, Kec. Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3)	Bank Sampah Pelangi Pulo Aceh	BA. 88/DJPKRL.1/PL.600/VIII/2024 Tanggal 21 Agustus 2024
1.b	Jalan Samping Mesjid Gampong Meunasah Mesjid, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3)	Bank Sampah Generasi Milenial Lampuuk	BA. 89/DJPKRL.1/PL.600/VIII/2024 Tanggal 21 Agustus 2024
2	Pekon Negeri Ratu, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3)	Bank Sampah Tri Ratu	BA. 61/DJPKRL.1/PL.600/VIII/2024 Tanggal 8 Agustus 2024
3.a	Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3)	Bank Sampah Amanah Barokah	BA. 96/DJPKRL.1/PL.600/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024
3.b	Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3 merk VIAR)	Bank Sampah Amanah Barokah	BA. 14/DJPKRL.1/PL.600/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024
4	Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3)	Bank Sampah Semoga Berkah	BA. 40/DJPKRL.1/PL.600/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024
5	Kel. Pulau Buluh, Kec. Bulang, Kota Batam	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3)	Bank Sampah Pulau Buluh Bersih	BA. 40/DJPKRL.1/PL.600/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024
6	Desa Jayanti, Kec. Palabuhan Ratu, Kab. Sukabumi	1 unit Motor Roda Tiga Viar 300 cc	Kelompok Bank Sampah Cipta Madani (BSCM)	BA. 08/DJPKRL.1/PL.600/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024
7	Jalan Sudirman RT 06/RW 03 Desa Candi, Kec. Palmatak, Kab. Kep. Anambas	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 unit Kendaraan Roda 3)	Bank Sampah Sahabat Lestari	BA. 90/DJPKRL.1/PL.600/VIII/2024 Tanggal 21 Agustus 2024
8.a	Desa Balongan, Kec. Balongan, Kab. Indramayu	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 Paket)	Bank Sampah Wiralodra	BA. 07/DJPKRL.1/PL.600/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024

No	Lokasi	Bantuan	Kelompok Penerima Bantuan	Berita Acara Serah Terima (BAST)
8.b	Desa Balongan, Kec. Balongan, Kab. Indramayu	Bantuan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih (1 Paket)	Bank Sampah Wiralodra	BA. 103/DJPKRL.1/PL.600/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K (Triwulan III 2024)

Jadi, capaian kinerja IKU sampai dengan periode triwulan III 2025 lebih kecil dibandingkan dengan capaian IKU pada Triwulan III tahun 2024. Salah satu faktor yang menyebabkan lebih kecilnya capaian kinerja IKU pada Triwulan III tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2024 adalah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Namun demikian, telah dilakukan kegiatan pendukung IKU ini yang memberikan kontribusi capaian berupa jumlah sampah yang terkumpul sampai dengan triwulan III 2025 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.
(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).
2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Jadi, capaian IKU 01 ini sampai dengan periode triwulan III 2025 ini (sebesar 79,2 ton) telah melebihi target IKU Nomor 01 pada tahun 2025 (sebesar 18 ton).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Tidak ada target IKU ini pada Triwulan III 2025. Namun demikian, telah dilakukan kegiatan pendukung IKU ini yang memberikan kontribusi capaian berupa jumlah sampah yang terkumpul seberat 79,2 ton sampai dengan triwulan III 2025 sehingga capaian IKU 01 sampai dengan periode

triwulan III 2025 lebih besar dibandingkan target tahun 2025 pada target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029 yaitu 18 ton.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Namun demikian, telah dilakukan kegiatan pendukung IKU ini yang memberikan kontribusi capaian berupa jumlah sampah yang terkumpul sampai dengan triwulan III 2025 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).
2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" dimiliki secara khusus oleh Direktorat P3K pada tahun 2025 mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 ini.

Kebijakan penanganan sampah plastik yang dilakukan KKP serta Arahan Pengelolaan Sampah Plastik dalam RPJMN 2025-2029 dan *Sustainability Development Goals (SDGs)* dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penanganan Sampah Plastik yang Dilakukan KKP

Dasar hukum IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Eksistensi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 merupakan upaya akselerasi secara terpadu untuk mencegah pencemaran lingkungan laut dan kerusakan ekosistem perairan, serta menjaga kesehatan laut dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang terkait dengan pembersihan sampah plastik di laut.

Penanganan sampah plastik di laut merupakan salah satu dari lima program prioritas KKP. Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budi daya ramah

lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut.



Gambar 8. Program Prioritas KKP Tahun 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) mulai menerapkan skema penanganan sampah laut melalui Aksi Bersih Pantai Laut (ABPL) dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL). Skema ABPL dan Gernas BCL merupakan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah pesisir. Kegiatan ini menekankan pada partisipasi masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Esensi ABPL dan Gernas BCL adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan sampah di pesisir agar tidak bocor ke laut..

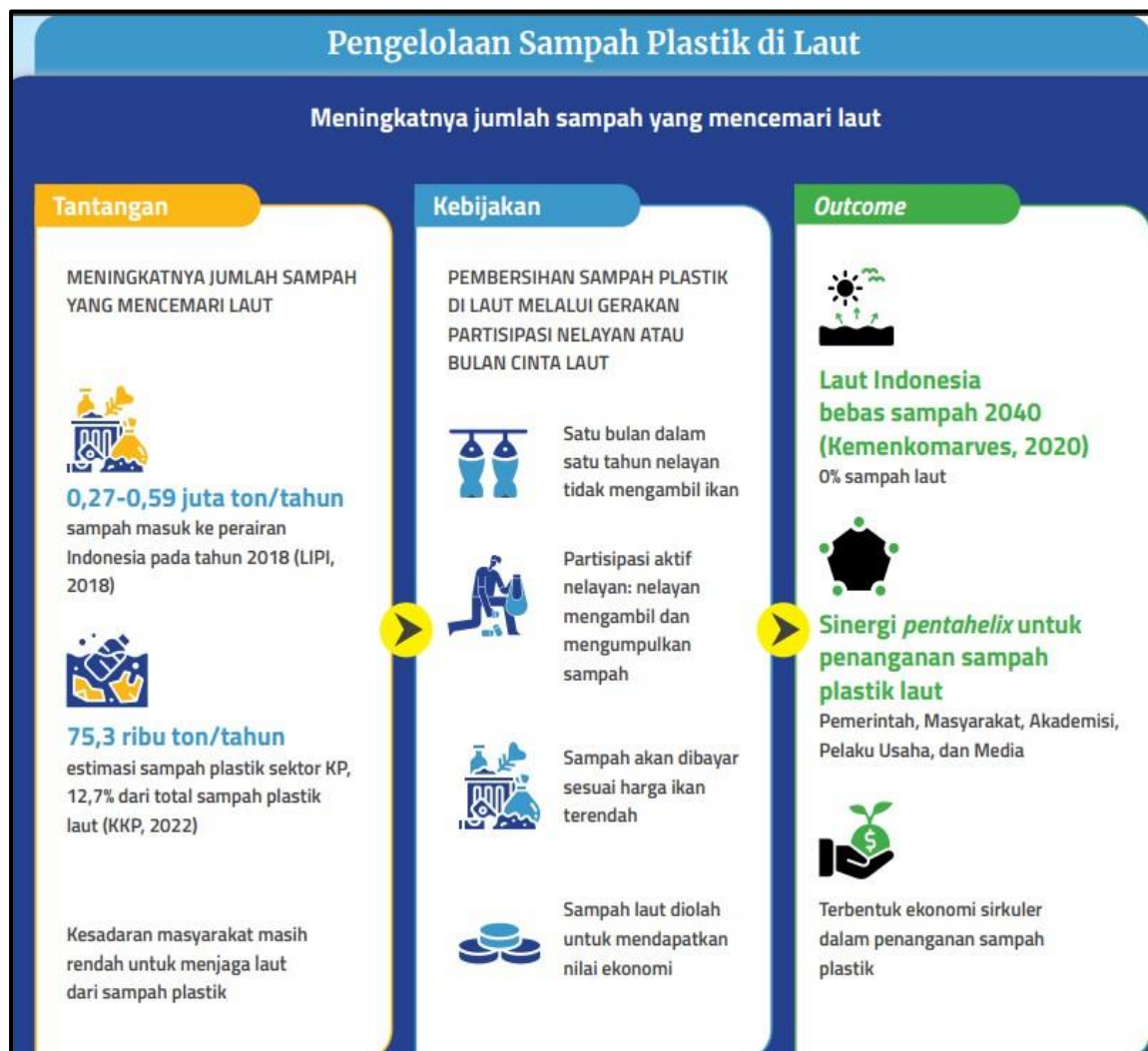
Penanganan sampah laut melalui berbagai kegiatan seperti ABPL, Gernas BCL, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh KKP tersebut di atas telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir, antara lain:

1. **Pengurangan Sampah Plastik di Laut:** Program ini berhasil mengurangi jumlah sampah plastik di laut dan pesisir. Dengan melibatkan nelayan dalam pengumpulan sampah, ribuan ton sampah plastik telah diangkat dari laut setiap tahunnya.
2. **Peningkatan Kesehatan Ekosistem Laut:** Dengan berkurangnya sampah plastik, ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove menjadi lebih sehat. Ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung kehidupan laut yang lebih berkelanjutan.
3. **Kesadaran Masyarakat yang Lebih Tinggi:** Program ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Edukasi dan kampanye yang dilakukan membantu masyarakat memahami dampak negatif sampah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
4. **Peningkatan Ekonomi Nelayan:** Nelayan yang berpartisipasi dalam program ini mendapatkan insentif ekonomi sebagai kompensasi atas sampah yang mereka kumpulkan. Ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan manfaat ekonomi tambahan. Partisipasi aktif ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Program penanganan sampah laut melalui berbagai aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh KKP akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi. Solidaritas yang terbangun melalui program ini memperkuat hubungan sosial dan kerjasama dalam komunitas. diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut semakin meningkat, dan Indonesia dapat mencapai target pengurangan sampah laut yang telah ditetapkan. Selanjutnya, program ini juga menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan untuk masalah lingkungan.

Pelaksanaan berbagai kegiatan guna mencegah kebocoran sampah ke laut yang dilakukan oleh KKP dalam rangka menciptakan laut bersih bebas sampah (Laut Sebasah). Berkaitan dengan Laut Sebasah ini, telah dilaksanakan Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara Jakarta Utara pada tanggal 6 Agustus 2025.

Seiring dengan berjalannya waktu, penanganan atau pengelolaan sampah plastik di laut menghadapi tantangan yaitu meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka kebijakan yang ditempuh oleh KKP sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 9: Tantangan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dan Kebijakan yang Ditempuh oleh KKP
Sumber: Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru (KKP, 2024)

2. Arahan Penanganan Sampah dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Beberapa arahan penanganan atau pengelolaan sampah termasuk sampah yang mencemari laut dalam RPJMN Tahun 2025-2029, antara lain:

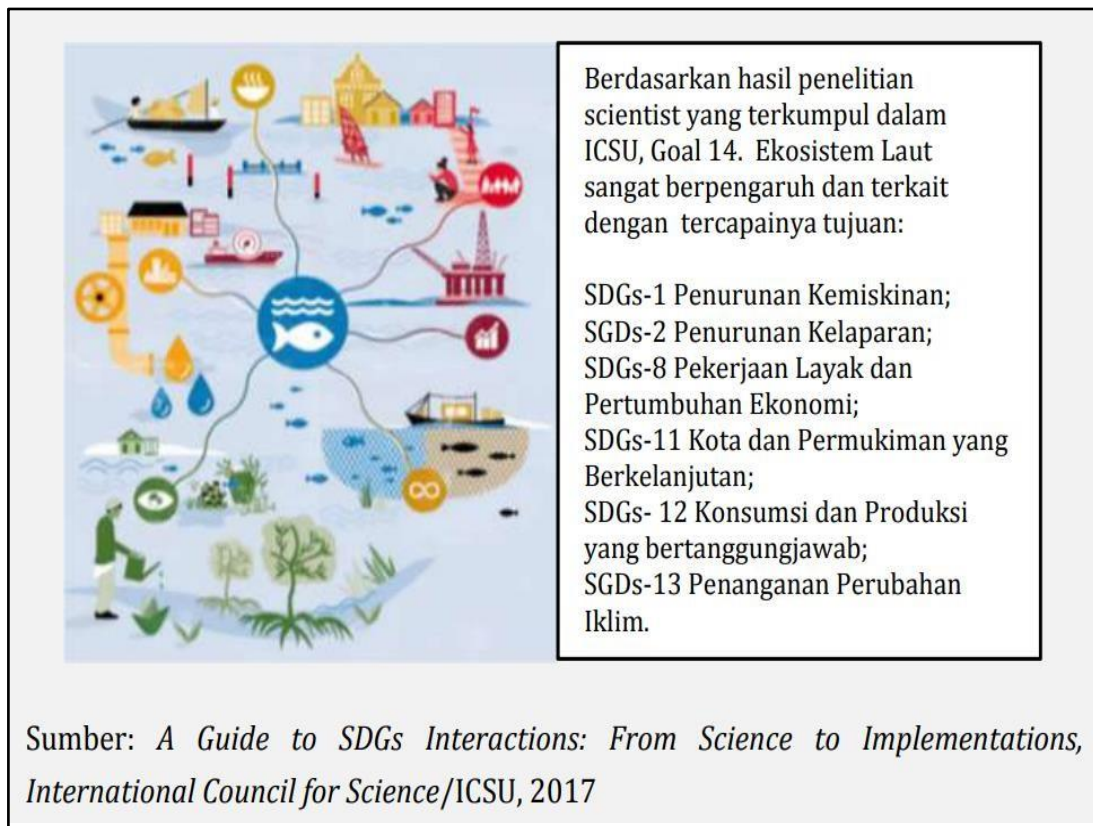
- a. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan.
- b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di berbagai tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang *clean and clear*, serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi dan konsisten dari mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset.
- c. Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemucuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, dan serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah. Di hilir, dilakukan optimalisasi pengolahan sampah berupa penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*-Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/*black soldier fly*, *refuse derived fuel*, *waste to energy*, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal; optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan *off-taker* hasil olahan sampah, penataan sistem pengelolaan lindi dan gas metana, konservasi tempat pemrosesan akhir dengan *landfill mining* serta pembatasan tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu sehingga hanya residu masuk ke tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu yang menerapkan sistem *sanitary landfill*.
- d. Sebagai upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan perairan, sarana dan prasarana penanganan sampah perairan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan persampahan land-based di daerah akan ditingkatkan. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut akan dilakukan melalui arah kebijakan berikut (a) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, (b) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu (LUR).
- e. Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

3. Arahan Penanganan Sampah Plastik dalam *Sustainability Development Goals (SDGs)*

Kebijakan penanganan sampah plastik di laut yang dilaksanakan DJPKRL atau Ditjen PK KKP ini sebagai upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Goals (SDGs)* 14. *Sustainable Development Goals 14 (SDGs 14)*, yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan pentingnya menjaga dan mengelola laut secara berkelanjutan. *SDGs 14* memiliki tujuan utama yaitu untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan menangani masalah lingkungan laut seperti polusi plastik, asam laut, serta penangkapan ikan yang berlebihan. Secara spesifik, tujuan yang dijawab adalah pada indikator 14.1.1 persentase penurunan sampah terbuang ke laut.

SDGs 14 ini, tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan, namun juga berdampak pada pencapaian *Goal SDGs* lainnya, yaitu: *Goal 1* (Penurunan Kemiskinan), *Goal 2* (Penurunan Kelaparan), *Goal 8* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), *Goal 11* (Kota dan

Permukiman Berkelanjutan), *Goal 12* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan *Goal 13* (Penanganan Perubahan Iklim). Hasil analisis ilmiah oleh *International Council of Science (ICSU, 2017* dalam Armida S. Alisjahbana, *et.al.*) memperlihatkan keterkaitan antara *Goal 14* dengan *goal-goal* tersebut di atas sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 10. Hubungan *SDG's 14* dengan *SDG's 1, SDG's 2, SDG's 8, SDG's 11, SDG's 12, dan SDG's 13*
 Sumber: *ICSU, 2017* dalam Armida S. Alisjahbana, *et.al. 2018. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi". UNPAD Press.*

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat

Bentuk dukungan para pihak pemangku kepentingan tersebut dalam penanganan sampah laut dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 15. Bentuk Dukungan Para Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Sampah Laut

No.	Pihak Pemangku Kepentingan	Bentuk Dukungan dalam Penanganan Sampah Laut
1.	Pemerintah Pusat (KKP dan K/L Lain)	a. KKP bekerjasama lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam upaya pembersihan sampah di laut. b. KKP memberikan bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (DPB)

No.	Pihak Pemangku Kepentingan	Bentuk Dukungan dalam Penanganan Sampah Laut
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)	Pemda turut membina masyarakat dan kelompok penggerak lingkungan, serta mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah terintegrasi.
3.	Pelajar dan mahasiswa	Pelajar dan mahasiswa terlibat dalam aksi bersih-bersih sampah laut dan sebagai inisiator kampanye kesadaran lingkungan.
4.	Komunitas dan Organisasi Lingkungan	Komunitas dan organisasi lingkungan berperan dalam pembersihan, pemilahan, dan daur ulang sampah plastik, serta memberikan pemahaman, mengedukasi, memberdayakan masyarakat..
5.	Lembaga Swasta dan Perguruan Tinggi/Universitas	Lembaga swasta dan perguruan tinggi/universitas sebagai mitra strategis dalam program.
6.	Masyarakat Pesisir dan Nelayan	Masyarakat pesisir dan nelayan terlibat aktif dalam Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), Gerakan Nasional Cinta Laut (Gernas BCL), dan program Laut Sebasah untuk membersihkan sampah dari laut.

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (2025)

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 didukung oleh Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap

Penanggulangan Dampak Pencemaran (kode QDD.001), dan Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kode 051), dan Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kode 051.OA).

Selain itu, IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 didukung oleh Bantuan Kelompok Masyarakat (QEH), Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih (QEH.003), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025.
2. Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali 16 – 20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton,
3. Rapat Pembahasan *Dashboard* Data dan Informasi Sampah Laut di GMB III Lantai 8, Ruang Rapat Selaru (21 Januari 2025).
4. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025).
5. *Workshop Consolidations and Coordination* Pengelolaan Sampah Laut di Kawasan Konservasi Perairan dan Pembiayaannya (23 Januari 2025).
6. Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Permen KP tentang Desa Pesisir Bersih (19 Februari 2025).
7. Pembahasan *Draft* Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih (21 Februari 2025).
8. Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut (27 Februari 2025).
9. Rapat rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang.Rapat Terubuk Lantai 10 GMB 3 (14 April 2025).
10. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (16 April 2025).
11. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt.8, Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (25 April 2025).
12. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Sampah Laut Terpadu (SiSalut) (5 Mei 2025).
13. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (8 Mei 2025).
14. Rapat Pembahasan Program LAUT SEBASA (Laut Sehat Bebas Sampah) melalui Aplikasi Zoom (11 Juni 2025).

15. Rapat Perhitungan Capaian Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) Tahun 2024 di Novotel Bandung dan Aplikasi Zoom (20 Juni 2025).
16. *High Level Meeting* Koordinasi Pembahasan Draft Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan Sampah di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta (26 Juni 2025).
17. Rapat Koordinasi Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025).
18. Narasumber Program dan Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Indonesia di Pantai Karangsong, Kabupaten Indramayu (2 Juli 2025).
19. *Workshop on Mitigation and Strategic Policy for Combating Microplastic Pollution for Marine and Freshwater Fisheries in Southeast Asia Region* di Lotus Sky Ballroom Lantai 27, Grand Mercure Jakarta Kemayoran (2 Juli 2025).
20. Rapat Koordinasi Kegiatan di Kamal Muara di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB III (8 Juli 2025).
21. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara dan Deklarasi Laut Sebasah di Ruang Rapat Tuna, GMB IV Lantai 15 dan aplikasi zoom (11 Juli 2025).
22. Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 di Hotel Aone Jakarta (15-16 Juli 2025).
23. Rapat Koordinasi Kerjasama Pameran UMKM dan Edukasi Pengelolaan Sampah di Kamal Muara Jakarta melalui aplikasi zoom (18 Juli 2025).
24. Rapat Persiapan Pameran UMKM dan Edukasi Pengelolaan Sampah di Kamal Muara, Jakarta di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Minabahari 3 Lantai 9 (23-24 Juli 2025).
25. Rapat Penyusunan Strategi Komunikasi dan Koordinasi Dokumentasi Liputan Kegiatan *Kick Off* Laut Sehat Bebas Sampah dan *Groundbreaking* Kawasan Mangrove Nasional di Ruang BHKLN, GMB I Lantai 5 (28 Juli 2025).
26. Audiensi dengan *Save The Children* Indonesia terkait program Laut Sebasah (Sehat Bebas Sampah) melalui Aplikasi Zoom (30 Juli 2025).
27. Rapat Koordinasi Rencana Kolaborasi Publikasi Laut Sebasah di Ruang Rapat Gedung Mina Bahari I Lantai 5 dan Aplikasi Zoom (31 Juli 2025).
28. Rapat Persiapan Pelaksanaan *Kick Off* Program Laut SEBASAH melalui Aplikasi Zoom (1 Agustus 2025).
29. Pelatihan Produk Olahan Sampah di SDN Kamal Muara 01, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (4 Agustus 2025).
30. *Kick off* Program Laut SEBASAH (6 Agustus 2025).
31. Rapat Pembahasan *ToR (Terms of References) Technical Assistance* dan *Timeline* Program Laut SEBASAH di Ruang Rapat Terubuk Lt. 10, Gedung Mina Bahari 3 (15 Agustus 2025).
32. *Focus Group Discussion* Pembahasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (20 Agustus 2025).
33. Pembahasan *Draft* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Laut SEBASAH di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (21 Agustus 2025).
34. Rapat Pembahasan Pelaksanaan *Policy Actions Program PBL Marine Debris* di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (26 Agustus 2025).

35. Surat Nomor B.919/MEN-KP/VIII/2025 Tanggal 31 Agustus 2025 Hal Masukan Materi dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah.
36. Pembahasan terkait Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (8 September 2025).
37. Narasumber Pelatihan Penanggulangan Pencemaran di *The Stones* Legian Bali (8-9 September 2025).
38. Rapat Penyusunan *Draft* Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut SEBASAH di Ruang Rapat Selaru, Gd. Mina Bahari 3 lantai 8 (15 September 2025).
39. *Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris* di Hotel Mandarin Oriental Jakarta (22 September 2025).
40. Diskusi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) dengan Topik "Persampahan" di *THE 101* Jakarta Sedayu Darmawangsa (26 September 2025).
41. Narasumber terkait Ekonomi Biru : Strategi Upaya Penanganan Pencemaran Sampah Laut dan Perubahan Iklim di Indonesia bertempat di Khas Palu Hotel (29 September 2025).
42. Rapat Koordinasi Pembahasan *Draft* Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan Sampah di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan (30 September 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai tanggal 30 September 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QDD.001.051. Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	141.680.000	94.205.000	90.991.175	1.250.000	92.241.175	97,92	1.963.825
QEH.003.051.OA. Desa Pesisir Bersih	701.319.000	344.319.000	265.040.208	11.866.398	276.906.606	80,42	67.412.394

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), LSM, Lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan isu penting karena wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman termasuk perubahan iklim dan bencana alam serta aktivitas manusia.

Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada kemampuan wilayah tersebut untuk menahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak negatif perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia yang merusak. Ini melibatkan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Beberapa hal yang berkaitan dengan IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: (a) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi; (b) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim; (c) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai).
2. Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi lakukan dengan kegiatan:
 - a. Rehabilitasi ekosistem mangrove.
 - b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
 - c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
 - d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
 - e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.
3. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim melalui peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim.
 - b. Pengembangan Kawasan Karbon Biru untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
 - c. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
4. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Struktur atau Fisik melalui pembangunan struktur alami dan/atau buatan.
 - b. Non Struktur atau Non-Fisik melalui penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir.
5. Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota. diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota.

Teknik menghitung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut:

Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.

Rumus Perhitungan:

$$NKW = (NRWP + NPPI + NMBP)/3$$

Dimana:

- NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir.
- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir.
- NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir.

1. Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP):dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NRWP dihitung berdasarkan lima komponen berikut:

- Rehabilitasi ekosistem mangrove.
- Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
- Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.

2. Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir (NPPI): dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim

Rumus perhitungan:

$$NPPI = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NPPI dihitung berdasarkan tiga komponen berikut:

- Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim.
- Kawasan Karbon Biru.
- Sekolah Pantai Indonesia.

3. Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir (NMBP) dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan mitigasi bencana kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$NMBP = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NMBP dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

- Struktur atau fisik.
- Non-struktur atau non-fisik.

Kategori Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai	Warna
Sangat Rendah	0–24	Merah
Rendah	25–49	Jingga
Sedang	50–74	Kuning
Tinggi	75–100	Hijau

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”
Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02)		Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil							
IKU – 02		Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	55	-	76	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025.

Metode perhitungan nilai indeks untuk ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan tiga indikator utama: rehabilitasi wilayah pesisir, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana.

Tahapan pengukuran IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”, antara lain: pengumpulan data, penghitungan nilai, dan pengategorian nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, tidak ada IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”.

Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III 2025 dengan Triwulan III 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Di samping itu, standar nasional maupun unit kerja lain tidak memiliki IKU "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)".

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di Kementerian.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2025 didukung oleh :

- a. Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA).
- b. NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001.051.OD).
- c. NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001.051.OE).
- d. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kode 051).

9. Kegiatan Pendukung

Metode perhitungan nilai indeks untuk ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan tiga indikator utama: rehabilitasi wilayah pesisir, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Sehubungan dengan hal ini, maka kegiatan pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 18. Kegiatan pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai Triwulan III tahun 2025

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
1.	Rehabilitasi Wilayah Pesisir	1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025) 2. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025) 3. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025). 4. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025) 5. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025) 6. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025) 7. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025) 8. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025) 9. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025) 10. <i>Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop</i> di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025) 11. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025) 12. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan <i>Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)</i> di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025) 13. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya <i>Waterfront Land</i> dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
		Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025) 14. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4C</i> di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025) 15. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025) 16. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025) 17. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025) 18. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025) 19. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4CR</i> di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025) 20. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025) 21. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025) 22. Narasumber dengan tema “Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove” terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025) 23. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025) 24. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 25. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 26. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025) 27. Rapat Koordinasi Kegiatan <i>Groundbreaking</i> Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025) 28. Rapat Rencana Kegiatan Peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (3 Juli 2025) 29. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui aplikasi zoom (22-23 Juli 2025) 30. Pembahasan Tindak Lanjut Kolaborasi Penanam Mangrove Nasional di Morodemak dan Muara Kamal di Ruang VIP Kantin Sehat, GMB II, KKP (30 Juli 2025)

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		31. Rencana Kerjasama Pengelolaan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 32. Narasumber terkait paparan dengan tema "Target dan Capaian Rehabilitasi Mangrove" di Shangri-La Jakarta, Kota BNI, Kota Jakarta Pusat (29 Juli 2025) 33. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui Aplikasi Zoom (5 Agustus 2025) 34. Serah terima Sertipikat Lahan Kamal Muara, Jakarta Utara Kamal Muara (5 Agustus 2025). 35. Kegiatan <i>Kick Off</i> "Laut Sehat Bebas Sampah" dan Groundbreaking Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara (6 Agustus 2025) 36. Narasumber pada acara Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia terkait Penguatan Ekosistem Karbon Biru untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan Pullman Hotel Jakarta (7 Agustus 2025) 37. Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (7 Agustus 2025) 38. Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Kota Pontianak (8 Agustus 2025) 39. Diskusi kegiatan restorasi dan konservasi mangrove serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 11 Provinsi wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi melalui dana hibah maupun investasi karbon mangrove di Ruang Rapat Terubuk Lt. 10, Gedung Mina Bahari (11 Agustus 2025) 40. Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025) 41. Narasumber pada kegiatan "<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta" di Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025) 42. Konsolidasi Isu Mangrove dalam Konteks <i>Enabling Blue Carbon</i> di Hotel JS Luwansa, Jakarta (15 Agustus 2025) 43. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di GOR Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Agustus 2025) 44. Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Kawasan Hutan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Mangrove di Anathera Resort Kuta, Bali (9 September 2025). 45. Tindak Lanjut Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Rehabilitasi Mangrove di Morodemak melalui Aplikasi Zoom (9 September 2025). 46. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (16 September 2025). 47. Rapat Pembahasan mekanisme koordinasi dan integrasi data Peta Mangrove Nasional di Ruang Rapat Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT Badan Informasi Geospasial - Gedung I Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (18 September 2025). 48. <i>Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris</i> di Hotel Mandarin Oriental Jakarta (22 September 2025).

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
		49. <i>Kick Off</i> Program Rehabilitasi Mangrove PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group Tahun 2025 di Desa Totoran, Indramayu, Jawa Barat (23 September 2025). 50. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (29 September 2025). 51. Telah dilakukan survey lokasi penanaman mangrove (Raja Ampat, Biak, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor). 52. Telah dilakukan survey calon lokasi rehabilitasi lamun (Pulau Kapoposang Kab. Pangkep)
2.	Pengendalian Perubahan Iklim	1. Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi <i>Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE)</i> Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025) 2. Permohonan Audiensi Tim <i>Climate Finance</i> Canada KKP (22 Januari 2025) 3. Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025) 4. <i>Panel Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants</i> di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025) 5. Permohonan Kehadiran Bersama pada <i>the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting</i> (melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>) (31 Januari 2025) 6. <i>Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation</i> (3-4 Februari 2025) 7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025) 8. Diskusi Perubahan Iklim dan NDC (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025) 9. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025) 10. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025) 11. Pertemuan Sosialisasi <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)</i> Ke-62 (10 Maret 2025) 12. Diskusi Penyelarasan Program / Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak dalam Krisis Iklim Melalui Aksi Gerakan Iklim (AGI) di Hotel Oria Jakarta Pusat (16 April 2025) 13. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Perlindungan Alam dan Iklim Kerja Sama RI-Persatuan Emirat Arab (PEA) di Hotel Pullman MH Thamrin Jakarta (21-22 April 2025) 14. Pembahasan Masukan RanKepmen KP tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025) 15. <i>Kick-Off Program ZCRA</i> “Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura Jawa Tengah – Tantangan, Strategi, dan Peluang Pendanaan” di Ballroom Hotel Gumaya Kota Semarang (5 Mei 2025) 16. Pertemuan <i>Kick-off</i> Persiapan Delegasi RI pada Sesi Perundingan <i>The United Nations Framework Convention</i>

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		on Climate Change (UNFCCC) Tahun 2025 di Hotel Pullman Jakarta dan Aplikasi Zoom (7 Mei 2025) 17. <i>Consultative Kick-off Meeting Advancing Demonstration in mangrove-based Adaptation and stakeholder Participation to climate agenda (ADAPT)</i> di Ruang Pertemuan Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta (2 Juni 2025) 18. <i>Invitation to Attend the Webinar "Climate Transition and Its Impacts in Asia"</i> (12 Juni 2025) 19. <i>Reception to celebrate Climateworks Centre's impact in accelerating climateaction over the past five years in Indonesia</i> I Wisma Habibie Ainun, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan (17 Juni 2025) 20. <i>Workshop</i> Evaluasi Capaian Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim TA 2024 di Le Meridien Jakarta (24 Juni 2025) 21. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (25 Juni 2025) 22. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (26 Juni 2025) 23. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan Workshop Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Cemara Hotel Jakarta (30 Juni 2025) 24. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan Workshop Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Cemara Hotel Jakarta (1 Juli 2025) 25. FGD "Peluang Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Risiko Bencana di Indonesia" di HARRIS Hotel & Convention Bekasi, Jawa Barat (8 Juli 2025) 26. Pembahasan Bersama terhadap Modul Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) di AONE Meeting/Abeto Restoran (9 Juli 2025) 27. Sosialisasi Hasil Pertemuan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Bureau</i> Ke-69 di Ruang Rimbawan 3C, Gedung Manggala Wanabakti dan aplikasi zoom (15 Juli 2025) 28. Narasumber dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Nasional Kegiatan Tahun 2023-2024 di Hotel Le Meriden Jakarta (15 Juli 2025) 29. <i>Workshop</i> Diseminasi Hasil Akhir Rekomendasi untuk Pengembangan Strategi Implementasi Sektor RAN GPI 2024-2030 terkait Pencegahan KBG dan Penguatan Ketahanan Perempuan Terhadap Perubahan Iklim di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta dan aplikasi zoom (15 Juli 2025) 30. Pembahasan Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Aloft Hotel Jakarta (16 Juli 2025)

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
		31. Rapat Inisiasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Aloft Hotel Jakarta (18, 31 Juli 2025) 32. Lokakarya Awal Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Wakatobi melalui Aplikasi Zoom (11 Agustus 2025) 33. Pelatihan Proyeksi Iklim Nasional di Hotel Aston, Bintaro (19-20 Agustus 2025) 34. Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara” di Hotel Galaxy Inn Baubau (20-22 Agustus 2025) 35. Narasumber, Moderator dan Fasilitator terkait Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Daratan pada FGD ke-2 yang akan fokus pada tema kajian risiko dan dampak perubahan iklim sebagai dasar penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim di Hotel Borobudur, Jakarta (25 Agustus 2025) 36. Temu Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Harper Kupang (27-28 Agustus 2025) 37. Konsultasi <i>Climate Change Adaptation Working Group</i> Untuk Penyusunan Dokumen <i>NPOA CTI-CFF</i> Indonesia di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (17 September 2025). 38. Narasumber terkait Implementasi Integrasi Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem Pesisir untuk Adaptasi Perubahan Iklim pada FGD Penyusunan Baseline dan Implementasi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim: Jakarta Kota Global yang Berketahanan pada aktivitas Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Provinsi DKI Jakarta Gedung JB. Tower, Jakarta Pusat (22 September 2025). 39. Narasumber terkait Ekonomi Biru : Strategi Upaya Penanganan Pencemaran Sampah Laut dan Perubahan Iklim di Indonesia bertempat di Khas Palu Hotel (29 September 2025)
3.	Mitigasi Bencana	1. Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025) 2. Pertemuan Pembahasan Submisi “<i>Mitigation Work Programme</i> dan <i>Just Transition</i>” (14 Februari 2025) 3. Pemberitahuan Pelatihan OPRC IMO dan Permohonan Narasumber Pelatihan Penanggulangan Pencemaran di Bandung (21 April 2025) 4. Rapat Diskusi Pemantapan Substansi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Kajian Risiko Bencana di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat (23 Mei 2025) 5. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (11 Juni 2025) 6. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (12 Juni 2025)

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
		7. FGD Data dan Informasi Program Solusi Terpadu untuk Pengelolaan Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial (ISASP) di Double Tree by Hilton Jakarta (22 Juli 2025) 8. Narasumber Focus Group Discussion Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) melalui Aplikasi Zoom (23 Juli 2025) 9. <i>Focus Group Discussion</i> Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) melalui Aplikasi Zoom (23 Juli 2025) 10. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menko PMK dan Keputusan Menko PMK tentang Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di Hotel Gran Meliá Jakarta (20 Agustus 2025)
4.	Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, Dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak Di Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 1 Agustus 2025. 2. Proses Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (rencana dalam bentuk Kepmen KP). 3. Proses Penyusunan Peta Abrasi dan Akresi (rencana dalam bentuk Kepdirjen PK)

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai tanggal 30 September 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA.001.051.OA Rehabilitasi Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	177.244.201	17.379.398	194.623.599	73,96	68.523.401
QDD.002.051. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	567.385.000	134.491.000	86.249.429	0	86.249.429	64,13	48.241.571

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.
- b. Mengumpulkan data.
- c. Menghitung nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Mengategorikan nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 "Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil". IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
- b. Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir.
- c. Penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim.

Dua alasan mengapa pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim, yaitu:

1. Kapasitas adaptasi masyarakat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya menjadi lebih tinggi.
2. Proyeksi kenaikan paras muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau.

Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sumber daya air tanah atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil juga menyusut. Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai sehingga tentu saja akan mengimbas ke segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berdataran rendah.

Dalam buku berjudul "Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada cetakan ke-3 tahun 2013, Subandono Diposaptono, *et.al* menyebutkan dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Gambar di bawah ini.

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat mempengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir *rob*, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap.

Kenaikan paras muka air laut berdampak pada dua hal terhadap pohon mangrove. Pertama, pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak ke arah darat. Atau kedua, pohon mangrove itu mati lantaran tak menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Salah satu faktor penting dan terbukti efektif guna mendorong iklim perubahan yang lebih baik dan mengerem perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan emisi (*Greenhouse Gases* atau *GHG*) atau gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan CO_2 . Adaptasi melibatkan penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap perubahan iklim.

Dalam kaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi *chlorofluorocarbon (CFC)*, menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan bahan bakar biomasa dan kompor masak, penggunaan teknologi energi yang dapat diperbarui, mencegah deforestasi dan kebakaran hutan, reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu, upaya adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. Dengan mengadaptasi (*IPCC, 1990*), pengelolaan wilayah pesisir (*coastal management*) bertujuan:

1. Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan rentan.
2. Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik.
3. Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap rasa aman serta kesejahteraan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengedukasi sumberdaya manusia (SDM) berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim adalah Sekolah Pantai Indonesia (SPI). SPI diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30

April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu **dari, oleh, dan untuk** siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu **4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi)**.

1. **Amati** adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. **Analisa** adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
3. **Ajarkan** adalah penyebaran hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. **Aksi** adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya mengurangi risiko bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Ini melibatkan berbagai tindakan untuk meminimalkan dampak negatif bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah pesisir. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat agar dapat menghadapi bencana alam seperti banjir rob, tsunami, dan abrasi pantai dengan lebih baik.

Formula Penghitungan IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sebagai berikut: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim, dan/atau bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim.

Target dan Capaian IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" periode Triwulan III tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02)		Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil							
IKU – 03		Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	8	-	-	-	-	1	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)" pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU ini yaitu Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) di Kamal Muara Jakarta Utara pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)”. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan III tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan pada tahun 2024. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara triwulan III tahun 2025 dengan triwulan III tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025. Namun demikian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU ini yaitu SPI dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” dimiliki secara khusus oleh Direktorat P3K pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kebijakan terkait dengan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025-2029 maupun dokumen lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025-2029 maupun *SDG's*

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan kegiatan, termasuk pengembangan vegetasi pantai, pembangunan infrastruktur pelindung pantai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Upaya peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penyadaran-tahuan masyarakat dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) yang berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk generasi muda dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,"	RPJMN Tahun 2025-2029: 1. Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. 2. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana. 3. Memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. 4. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. 5. Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrem. Di wilayah pesisir, dampak

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (<i>coastal inundation</i>). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai. 6. Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari Climate Central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir. 7. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. 8. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (<i>triple planetary crisis</i>) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. 9. Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir (<i>ocean climate</i>), air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	10. Penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana. <i>Sustainable Development Goals (SDG's):</i> 1. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah penanganan perubahan iklim yaitu mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 2. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>SDG's</i> yaitu penanganan perubahan iklim, sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki lima target yaitu: a. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. b. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. c. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. d. Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar <i>dollar AS</i> per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin. e. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal. Keterangan : <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	dan planet Bumi. <i>SDG's</i> dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup DJPRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada tahun 2025 didukung oleh:

- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kode 052.OA).
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) (Kode 052.OA).

- c. Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001), NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya (Kode 051), dan NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OD).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 22. Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai Triwulan III tahun 2025

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)”	Kegiatan Pendukung
1.	Pengendalian Perubahan Iklim	1. Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi <i>Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE)</i> Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025) 2. Permohonan Audiensi Tim <i>Climate Finance</i> Canada KKP (22 Januari 2025) 3. Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025). 4. <i>Panel Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants</i> di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025). 5. Permohonan Kehadiran Bersama pada <i>the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting</i> (melalui Aplikasi Zoom Meeting) (31 Januari 2025). 6. <i>Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation</i> (3-4 Februari 2025). 7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025). 8. Diskusi Perubahan Iklim dan NDC (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025). 9. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025). 10. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025). 11. Pertemuan Sosialisasi <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)</i> Ke-62 (10 Maret 2025). 12. Diskusi Penyelarasan Program / Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak dalam Krisis Iklim Melalui Aksi Gerakan Iklim (AGI) di Hotel Oria Jakarta Pusat (16 April 2025).

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)"	Kegiatan Pendukung
		13. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Perlindungan Alam dan Iklim Kerja Sama RI-Persatuan Emirat Arab (PEA) di Hotel Pullman MH Thamrin Jakarta (21-22 April 2025). 14. Pembahasan Masukan RanKepmen KP tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025). 15. <i>Kick-Off Program ZCRA</i> "Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura Jawa Tengah – Tantangan, Strategi, dan Peluang Pendanaan" di Ballroom Hotel Gumaya Kota Semarang (5 Mei 2025). 16. Pertemuan <i>Kick-off</i> Persiapan Delegasi RI pada Sesi Perundingan <i>The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> Tahun 2025 di Hotel Pullman Jakarta dan Aplikasi Zoom (7 Mei 2025). 17. <i>Consultative Kick-off Meeting Advancing Demonstration in mangrove-based Adaptation and stakeholder Participation to climate agenda (ADAPT)</i> di Ruang Pertemuan Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta (2 Juni 2025). 18. <i>Invitation to Attend the Webinar "Climate Transition and Its Impacts in Asia"</i> (12 Juni 2025). 19. <i>Reception to celebrate Climateworks Centre's impact in accelerating climateaction over the past five years in Indonesia</i> I Wisma Habibie Ainun, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan (17 Juni 2025). 20. <i>Workshop</i> Evaluasi Capaian Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim TA 2024 di Le Meridien Jakarta (24 Juni 2025). 21. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (25 Juni 2025). 22. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (26 Juni 2025). 23. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan <i>Workshop</i> Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Cemara Hotel Jakarta (30 Juni 2025) 24. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan <i>Workshop</i> Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Cemara Hotel Jakarta (1 Juli 2025) 25. FGD "Peluang Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Risiko Bencana di Indoensia" di HARRIS Hotel & Convention Bekasi, Jawa Barat (8 Juli 2025) 26. Pembahasan Bersama terhadap Modul Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)"	Kegiatan Pendukung
		Bencana (API-PRB) di AONE Meeting/Abeto Restoran (9 Juli 2025) 27. Sosialisasi Hasil Pertemuan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Bureau</i> Ke-69 di Ruang Rimbawan 3C, Gedung Manggala Wanabakti dan aplikasi zoom (15 Juli 2025) 28. Narasumber dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Nasional Kegiatan Tahun 2023-2024 di Hotel Le Meriden Jakarta (15 Juli 2025) 29. <i>Workshop</i> Diseminasi Hasil Akhir Rekomendasi untuk Pengembangan Strategi Implementasi Sektor RAN GPI 2024-2030 terkait Pencegahan KBG dan Penguatan Ketahanan Perempuan Terhadap Perubahan Iklim di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta dan aplikasi zoom (15 Juli 2025) 30. Pembahasan Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Aloft Hotel Jakarta (16 Juli 2025) 31. Rapat Inisiasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Aloft Hotel Jakarta (18, 31 Juli 2025) 32. Lokakarya Awal Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Wakatobi melalui Aplikasi Zoom (11 Agustus 2025) 33. Pelatihan Proyeksi Iklim Nasional di Hotel Aston, Bintaro (19-20 Agustus 2025) 34. Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara" di Hotel Galaxy Inn Baubau (20-22 Agustus 2025) 35. Narasumber, Moderator dan Fasilitator terkait Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Daratan pada FGD ke-2 yang akan fokus pada tema kajian risiko dan dampak perubahan iklim sebagai dasar penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim di Hotel Borobudur, Jakarta (25 Agustus 2025) 36. Temu Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Harper Kupang (27-28 Agustus 2025) 37. Konsultasi <i>Climate Change Adaptation Working Group</i> Untuk Penyusunan Dokumen <i>NPOA CTI-CFF</i> Indonesia di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (17 September 2025). 38. Narasumber terkait Implementasi Integrasi Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem Pesisir untuk Adaptasi Perubahan Iklim pada FGD Penyusunan Baseline dan Implementasi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim: Jakarta Kota Global yang Berketahanan pada aktivitas Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)"	Kegiatan Pendukung
		Karbon di Provinsi DKI Jakarta Gedung JB. Tower, Jakarta Pusat (22 September 2025). 39. Narasumber terkait Ekonomi Biru : Strategi Upaya Penanganan Pencemaran Sampah Laut dan Perubahan Iklim di Indonesia bertempat di Khas Palu Hotel (29 September 2025)
2.	Mitigasi Bencana	1. Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025) 2. Pertemuan Pembahasan Submisi "<i>Mitigation Work Programme</i> dan <i>Just Transition</i>" (14 Februari 2025) 3. Pemberitahuan Pelatihan OPRC IMO dan Permohonan Narasumber Pelatihan Penanggulangan Pencemaran di Bandung (21 April 2025) 4. Rapat Diskusi Pemantapan Substansi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Kajian Risiko Bencana di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat (23 Mei 2025) 5. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (11 Juni 2025) 6. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (12 Juni 2025) 7. FGD Data dan Informasi Program Solusi Terpadu untuk Pengelolaan Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial (ISASP) di Double Tree by Hilton Jakarta (22 Juli 2025) 8. Narasumber Focus Group Discussion Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) melalui Aplikasi Zoom (23 Juli 2025) 9. Focus Group Discussion Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) melalui Aplikasi Zoom (23 Juli 2025) 10. Sekolah Pantai Indonesia dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) di Kamal Muara Jakarta Utara (4 dan 6 Agustus 2025) 11. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menko PMK dan Keputusan Menko PMK tentang Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di Hotel Gran Meliá Jakarta (20 Agustus 2025)
3.	Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:	1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 1 Agustus 2025.

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)"	Kegiatan Pendukung
		2. Proses Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (rencana dalam bentuk Kepmen KP). 3. Proses Penyusunan Peta Abrasi dan Akresi (rencana dalam bentuk Kepdirjen PK)

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai tanggal 30 September 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QDD.002.052.OA . Sekolah Pantai Indonesia.	418.445.000	70.240.000	38.010.694	5.933.199	43.943.893	62,56	26.296.107
QDD.002.051.OA . Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	567.385.000	11.797.000	10.206.625	0	10.206.625	86,52	1.590.375
PFA.001.051.OD. NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	0	0	0	0	0	0
PFA.001.051.OE. NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 September 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut, dan para pihak terkait lainnya dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil.

IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 "Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi". IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Beberapa hal atau definisi yang berkaitan dengan IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)", antara lain:

1. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.
2. Kegiatan pendukung sehubungan dengan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, antara lain:
 - a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
 - b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove
3. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
4. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Teknik menghitung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sebagai berikut:

Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

Rumus Perhitungan:

$$\text{NRWP} = (b_1 \times nRM) + (b_2 \times nPR)$$

Dimana:

- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- nRM: Nilai Rehabilitasi Mangrove.
- nPR: Nilai Penguatan Regulasi.
- b_1, b_2 : Bobot kontribusi kegiatan, dengan $b_1 + b_2 = 1$.

Kriteria bobot kontribusi:

- $b_1 = 70\%$
 - ✓ Kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada kondisi kawasan
- $b_2 = 30\%$
 - ✓ Regulasi kegiatan yang belum berdampak langsung kondisi kawasan

Kategori Nilai sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0–24
Rendah	25–49
Sedang	50–74
Tinggi	75–100

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan III 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03)		Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU – 04		Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	55	-	76	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025.

Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

Tahapan pengukuran IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”, antara lain: pengumpulan data, penghitungan nilai, dan pengategorian nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Tidak ada IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2024.

Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan III 2025 dengan triwulan III 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Di samping itu, standar nasional maupun unit kerja lain tidak memiliki IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”.

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di kementerian.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK)

maupun UPT lingkup Ditjen Perencanaan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebagai berikut:

- b. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- d. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 didukung oleh :

- a. Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA).
- b. Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya (Kode PFA.001.051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai Triwulan III tahun 2025

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
1.	Rehabilitasi Wilayah Pesisir	1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025) 2. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025) 3. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025). 4. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025) 5. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025) 6. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025) 7. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025)

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		8. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025) 9. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025) 10. <i>Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop</i> di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025) 11. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025) 12. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan <i>Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)</i> di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025) 13. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya <i>Waterfront Land</i> dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025) 14. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4C</i> di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025) 15. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025) 16. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025) 17. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025) 18. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025) 19. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4CR</i> di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025) 20. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025) 21. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025) 22. Narasumber dengan tema "Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove" terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025)

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		23. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025) 24. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 25. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 26. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025) 27. Rapat Koordinasi Kegiatan <i>Groundbreaking</i> Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025) 28. Rapat Rencana Kegiatan Peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (3 Juli 2025) 29. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui aplikasi zoom (22-23 Juli 2025) 30. Pembahasan Tindak Lanjut Kolaborasi Penanaman Mangrove Nasional di Morodemak dan Muara Kamal di Ruang VIP Kantin Sehat, GMB II, KKP (30 Juli 2025) 31. Rencana Kerjasama Pengelolaan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 32. Narasumber terkait paparan dengan tema "Target dan Capaian Rehabilitasi Mangrove" di Shangri-La Jakarta, Kota BNI, Kota Jakarta Pusat (29 Juli 2025) 33. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui Aplikasi Zoom (5 Agustus 2025) 34. Serah terima Sertipikat Lahan Kamal Muara, Jakarta Utara Kamal Muara (5 Agustus 2025). 35. Kegiatan <i>Kick Off</i> "Laut Sehat Bebas Sampah" dan <i>Groundbreaking</i> Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara (6 Agustus 2025) 36. Narasumber pada acara Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia terkait Penguatan Ekosistem Karbon Biru untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan Pullman Hotel Jakarta (7 Agustus 2025) 37. Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (7 Agustus 2025) 38. Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Aston Pontianak

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		Hotel & Convention Center, Kota Pontianak (8 Agustus 2025) 39. Diskusi kegiatan restorasi dan konservasi mangrove serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 11 Provinsi wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi melalui dana hibah maupun investasi karbon mangrove di Ruang Rapat Terubuk Lt. 10, Gedung Mina Bahari (11 Agustus 2025) 40. Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025) 41. Narasumber pada kegiatan "<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta" di Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025) 42. Konsolidasi Isu Mangrove dalam Konteks <i>Enabling Blue Carbon</i> di Hotel JS Luwansa, Jakarta (15 Agustus 2025) 43. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di GOR Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Agustus 2025) 44. Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Kawasan Hutan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Mangrove di Anathera Resort Kuta, Bali (9 September 2025). 45. Tindak Lanjut Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Rehabilitasi Mangrove di Morodemak melalui Aplikasi Zoom (9 September 2025). 46. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (16 September 2025). 47. Rapat Pembahasan mekanisme koordinasi dan integrasi data Peta Mangrove Nasional di Ruang Rapat Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT Badan Informasi Geospasial - Gedung I Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (18 September 2025). 48. <i>Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris</i> di Hotel Mandarin Oriental Jakarta (22 September 2025). 49. <i>Kick Off Program Rehabilitasi Mangrove PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group Tahun 2025</i> di Desa Totoran, Indramayu, Jawa Barat (23 September 2025). 50. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (29 September 2025). 51. Telah dilakukan survey lokasi penanaman mangrove (Raja Ampat, Biak, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor). 52. Telah dilakukan survey calon lokasi rehabilitasi lamun (Pulau Kapoposang Kab. Pangkep)

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
2.	Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perkembangan kegiatan pendukung, antara lain: 1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 1 Agustus 2025. 2. Proses Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (rencana dalam bentuk Kepmen KP). 3. Proses Penyusunan Peta Abrasi dan Akresi (rencana dalam bentuk Kepdirjen PK)

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai tanggal 30 September 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA.001.051.OA Rehabilitasi Mangrove di Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	177.244.201	17.379.398	194.623.599	73,96	68.523.401
PFA.001.051.OA Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	121.640.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	100	0

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 September 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.
- Mengumpulkan data.
- Menghitung nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi.
- Mengategorikan nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi adalah kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
- b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Formula Penghitungan IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.

Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” periode Triwulan III tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)”
Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03)		Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU – 05		Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra

					III Tahun 2024				
8 kawasan (luas 82,62 ha)	13 kawasan (luas 224,78 ha)	-	-	-	-	1			

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)" pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha".

Target dan capaian IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 8 kawasan dengan luas 82,62 hektar (ha).

Tabel 28. Target dan capaian IKU 10 "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada triwulan III tahun 2024

No	Lokasi	Luas (Ha)	Tanggal Kegiatan	Nama Kelompok Pelaksana	Keterangan
1	Desa Wiromartan, Kec. Mirit, Kab. Kebumen	2,51	27 Juni 2024	Pokmaswas Ngudidoyo	Capaian TW II
2	Desa Daiama, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	14	23 Juli 2024	Pokdakan Karna Kasih	Capaian TW III
3	Kelurahan Tambak Sarioso. Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya	20,72	3 Agustus 2024	Pokmaswas Bunga Lestari	Capaian TW III
4.a	Desa Sanggi, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran Lampung	3	25 Juni - 2 Juli 2024	KUB Langgeng	Capaian TW III
4.b	Desa Sanggi, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran Lampung	10	25 Juni - 2 Juli 2024	KUB Bintang Terang	Capaian TW III
5	Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Kab. Situbondo	2,2	4 - 11 Agustus 2024	KUB Karang Laut	Capaian TW III
6	Desa Keude Unga, Kec. Indra Jaya, Kab. Aceh Jaya	8,8	19 Agustus 2024	Kelompok Subang Aquatic	Capaian TW III
7	Desa Polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang	10,29	11 September 2024	KUB Selat Baru	Capaian TW III
8	Kelurahan Kepel, Kota Pasuruan	11,1	13 September 2024	Pokmaswas Muara Indah	Capaian TW III
	Jumlah	82,62			

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K (Triwulan III Tahun 2024)

Jadi, capaian Triwulan III tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

IKU Nomor “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” dimiliki secara khusus oleh Direktorat P3K pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K yang disusun pada Bulan Juni 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2025 ini.

Kebijakan terkait dengan mangrove di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan mangrove di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun *SDG's* dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29. Kebijakan Mangrove di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Mangrove di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun *SDG's*

Kebijakan Mangrove di KKP	Kebijakan Mangrove dalam RPJMN 2025-2029 dan Sustainable Development Goals (SDG's)
1. Rehabilitasi mangrove adalah upaya yang bisa dilakukan untuk memulihkan ekosistem pesisir, mencegah abrasi dan kerusakan ekosistem serta spesies inti mangrove seperti kepiting dan ikan. Kerusakan mangrove dan ekosistem di pesisir sering kali diakibatkan oleh kelalaian manusia. Salah satunya akibat pencemaran akibat limbah sampah. Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terus mendorong dan mengajak seluruh masyarakat bersama pemerintah menjaga kawasan mangrove agar bersih dari sampah. Ini penting dilakukan agar mangrove dapat memberikan nilai ekologi, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (https://www.kkp.go.id/news/news-detail/cegah-abrasi-kkp-tanam-ratusan-ribu-mangrove-di-sumenep65c1cd9a57a63.html).	1. Pembangunan Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai ; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan

Kebijakan Mangrove di KKP	Kebijakan Mangrove dalam RPJMN 2025-2029 dan Sustainable Development Goals (SDG's)
2. Aksi nyata dilakukan melalui kebijakan ekonomi biru yaitu dengan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada 2045, perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, akuakultur berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik laut. Saat ini Indonesia telah melindungi lebih dari 29 juta hektare kawasan laut dan menjadi salah satu negara dengan cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17% karbon biru global dari mangrove dan lamun (Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : SP.243/SJ.5/VI/2025 dalam Alamat tautan : https://kkp.go.id/news/news-detail/indonesia-tegaskan-komitmen-kelola-laut-berkelanjutan-di-unoc-ke-3-WPRE.html) 3. <i>Groundbreaking</i> Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan ekosistem mangrove nasional. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) aktif terlibat dalam program pengelolaan ekosistem mangrove nasional, yang diprakarsai oleh KKP. Menteri Trenggono sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan program bersama dalam pengembangan ekosistem mangrove nasional (https://kkp.go.id/djpk/groundbreaking-kawasan-mangrove-nasional-kamal-muara-K8Vx/detail.html).	hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan (Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029). 2. Sebasai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas perairan laut 6,4 juta km² dengan potensi sumber daya perikanan 12,01 juta ton pada fl wilayah pengelolaan perikanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut dan ekosistem pesisir yang terdiri dari 3,36 juta hektare mangrove, 293 ribu hektare lamun, dan 2,5 juta hektare terumbu karang. Untuk menjamin keberlanjutan dari keanekaragaman hayati laut tersebut, pada tahun 2023 Indonesia telah menetapkan 29,1 juta hektare kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sumber daya perikanan dan ekosistem tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan ketahanan pangan akuatik dan meningkatkan kesehatan laut Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029) (Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029). 3. Rehabilitasi mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil sangat relevan dengan berbagai Sustainable Development Goals (SDG's), antara lain: a. <i>SDG's 14 (Kehidupan di Bawah Air)</i> Rehabilitasi mangrove membantu menjaga kesehatan ekosistem laut, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan melindungi garis pantai dari erosi. b. <i>SDG's 15 (Kehidupan di Darat)</i> Mangrove berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies, termasuk yang terancam punah. c. <i>SDG's 13 (Aksi Perubahan Iklim)</i> Hutan mangrove membantu mengurangi emisi karbon dan menyerap gas rumah kaca sehingga berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Kebijakan Mangrove di KKP	Kebijakan Mangrove dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	d. <i>SDG's</i> 1 (Tanpa Kemiskinan) Rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pariwisata, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. e. <i>SDG's</i> 8 (Pertumbuhan Ekonomi yang Pantas). Rehabilitasi mangrove dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan agribisnis yang berkelanjutan. Keterangan: <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. <i>SDG's</i> dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.

- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2025 didukung oleh Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (Kode REA), Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), dan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA) serta Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sampai Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025.
2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025).
3. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025).
4. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025).
5. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025).
6. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025).
7. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025).
8. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025).
9. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025).
10. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025).
11. *Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop* di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025).
12. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025).
13. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan *Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)* di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025).
14. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya *Waterfront Land* dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025).
15. Pertemuan *Steering Committee Program M4C* di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025).
16. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025).

17. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025).
18. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025).
19. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025).
20. Pertemuan *Steering Committee Program M4CR* di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025).
21. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025).
22. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025).
23. Narasumber dengan tema "Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove" terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025).
24. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025).
25. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).
26. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).
27. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025).
28. Rapat Koordinasi Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025).
29. Rapat Rencana Kegiatan Peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (3 Juli 2025)
30. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui aplikasi zoom (22-23 Juli 2025)
31. Pembahasan Tindak Lanjut Kolaborasi Penanaman Mangrove Nasional di Morodemak dan Muara Kamal di Ruang VIP Kantin Sehat, GMB II, KKP (30 Juli 2025)
32. Rencana Kerjasama Pengelolaan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3
33. Narasumber terkait paparan dengan tema "Target dan Capaian Rehabilitasi Mangrove" di Shangri-La Jakarta, Kota BNI, Kota Jakarta Pusat (29 Juli 2025)
34. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui Aplikasi Zoom (5 Agustus 2025)
35. Serah terima Sertipikat Lahan Kamal Muara, Jakarta Utara Kamal Muara (5 Agustus 2025).
36. Kegiatan *Kick Off* "Laut Sehat Bebas Sampah" dan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara (6 Agustus 2025)
37. Narasumber pada acara Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia terkait Penguatan Ekosistem Karbon Biru untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan Pullman Hotel Jakarta (7 Agustus 2025)
38. Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (7 Agustus 2025)
39. Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Kota Pontianak (8 Agustus 2025)

40. Diskusi kegiatan restorasi dan konservasi mangrove serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 11 Provinsi wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi melalui dana hibah maupun investasi karbon mangrove di Ruang Rapat Terubuk Lt. 10, Gedung Mina Bahari (11 Agustus 2025)
41. Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025)
42. Narasumber pada kegiatan "*Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta" di Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025)
43. Konsolidasi Isu Mangrove dalam Konteks *Enabling Blue Carbon* di Hotel JS Luwansa, Jakarta (15 Agustus 2025)
44. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di GOR Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Agustus 2025)
45. Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Kawasan Hutan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Mangrove di Anathera Resort Kuta, Bali (9 September 2025).
46. Tindak Lanjut Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Rehabilitasi Mangrove di Morodemak melalui Aplikasi Zoom (9 September 2025).
47. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (16 September 2025).
48. Rapat Pembahasan mekanisme koordinasi dan integrasi data Peta Mangrove Nasional di Ruang Rapat Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT Badan Informasi Geospasial - Gedung I Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (18 September 2025).
49. *Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris* di Hotel Mandarin Oriental Jakarta (22 September 2025).
50. *Kick Off Program Rehabilitasi Mangrove PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group Tahun 2025* di Desa Totoran, Indramayu, Jawa Barat (23 September 2025).
51. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (29 September 2025).
52. Telah dilakukan survey lokasi penanaman mangrove (Raja Ampat, Biak, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor).
53. Telah dilakukan survey calon lokasi rehabilitasi lamun (Pulau Kapoposang Kab. Pangkep)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" sampai tanggal 30 September 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" Sampai dengan Akhir 30 September 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
REA.001.051. OA. Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	177.244.201	17.379.398	194.623.599	73,96	68.523.401

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 September 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil,
- b. Melakukan penanaman mangrove maupun lamun.
- c. Melakukan *Mutual Check (MC)*.
- d. Menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan pemerintah penanaman mangrove maupun lamun.

IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 04 “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Target IKU ini sebanyak 3 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, penyusunan prospektus pengembangan gugus pulau dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau,

IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBPN) atau Sertipikat HAT; dan/atau
2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus); dan/atau
3. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

A. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBPN) atau Sertipikat HAT

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBPN dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertipikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA);
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya;
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk;
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura);
6. PPK/T yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
7. PPK/T dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertifikat sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPK/T prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 13. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T
Sumber: Tim Kerja Pengelolaan Lahan (PL), Direktorat P3K

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai Triwulan II Tahun 2025 telah terbit sebanyak total 81 bidang tanah (sertipikat) di 70 pulau kecil, dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 68 bidang di 58 pulau PPKT dan 13 bidang di 12 pulau non PPKT. Data Sertipikat Hak Atas Tanah di PPK/T dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 14. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T

Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T) yang sudah terbit atas nama pemerintah RI *cq* Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 31. Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit

PPKT						
No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Tanah (M ²)
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	290.000
2	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	2.645
3	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	800
4	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Kota Batam	Kepulauan Riau	11.703
5	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	7.700
6	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	1.195
7	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	10.510
8	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	14.270
9	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	41.200
10	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	12.143

11	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	400
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	9.243
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	1.918
13	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kepulauan Riau	1.304
14	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	4.355
15	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kepulauan Riau	8.964
16	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	9.919
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	3.786
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	50.300
17	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	99.000
18	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	36.820
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	1.923
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	4.000
19	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Aceh	1.000
20	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	11.530
21	Pulau Salaut Besar	Langi	Alafan	Simeulue	Aceh	1.422.000
22	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	14.110
23	Pulau Rupat	Tanjung Punak	Rupat Utara	Bengkalis	Riau	17.060
24	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	2.630
25	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Riau	8.924
26	Pulau Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.037.000
27	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Lampung	40.000
28	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	3.750

29	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	2.197
30	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalimantan Utara	12.000
31	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur	6.976
32	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Sulawesi Tengah	1.124
33	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Sulawesi Tengah	8.290
34	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	29.760
35	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	83.200
36	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	97.400
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	1.768
37	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	6.897
38	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	4.784
39	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	123
40	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	660
41	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	3.700
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.300
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.422
42	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	99.500
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	15.690
43	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	612.300
44	Pulau Batek	Netemnanu Utara	Amfoang Timur	Kupang	NTT	62.700
45	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	901

46	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	21.480
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	15.040
47	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Maluku	77.900
48	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	4.027
49	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Maluku	14.460
50	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	276
51	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Maluku	2.500
52	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Maluku	50.100
53	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Maluku	45.290
54	Pulau Liran	Ustutun	Wetar	Maluku Barat Daya	Maluku	4.518
55	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara	117.000
56	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	20.000
57	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	10.000
58	Pulau Bras	Mapia	Supriori Barat	Supriori	Papua	25.550
NON PPKT						
59	Pulau Morotai (SKPT)	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	52.200
60	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kepulauan Riau	2.957
61	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	433
62	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) I	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	678.400
	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) II	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	140.797
63	Pulau Sumangga Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.708

64	Pulau Sumangga Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	34.183
65	Pulau Buraolei	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	422
66	Pulau Gusunduan	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	2.625
67	Pulau Lalungan	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.140
68	Pulau Kamarian Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	1.388
69	Pulau Kamarian Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	8.362
70	Pulau Malamber Marinni	Balabalakang Timur	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	32.582

Sumber: Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Direktorat P3K (Triwulan III 2025)

Adapaun contoh bentuk sertifikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 15. Contoh Sertifikat yang telah terbit

B. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus)

Gugus Pulau adalah sekelompok pulau, termasuk perairan yang ada di dalamnya yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya, serta bentuk alami lain yang dijumpai, yang membentuk suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis dan politik.

Gugus pulau merupakan kumpulan beberapa pulau kecil yang jarak antar pulau-pulainya saling berdekatan dengan batas fisik yang jelas, saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain, dan memiliki keterikatan dalam berbagai aspek, seperti sosial dan budaya, ekonomi, serta ekosistemnya.

Pengembangan gugus pulau merujuk pada upaya terencana untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil yang saling berdekatan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pengembangan gugus pulau memerlukan beberapa syarat utama sebagai berikut:

1. Gugus pulau harus memiliki potensi untuk menjadi wilayah mandiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.
2. Pengembangan harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dan ruang yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Konektivitas antar pulau dalam gugus tersebut harus ditingkatkan untuk memudahkan mobilitas dan interaksi antar masyarakat pulau.

Tujuan utama dari pengembangan gugus pulau adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembangunan wilayah kepulauan. Gugus pulau membantu dalam pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, pengembangan potensi wilayah, serta mempermudah hubungan antar pulau, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.

C. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

Fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar adalah kegiatan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dilakukan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang melakukan kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pulau-Pulau Kecil/terluar yang telah disertipikatkan Hak Atas Tanah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi target untuk dilakukan kerjasama pemanfaatannya.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen fasilitasi kerjasama pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar. Sedangkan outcome yang dapat dihasilkan dengan terciptanya kerjasama dalam pemanfaatan pulau diharapkan dapat meningkatkan PNPB bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau-pulau kecil.

Target dan Capaian IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" periode Triwulan III tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04)		Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan							
IKU – 06		Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	31	-	-	-	-	3	-		

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" sebanyak 3 pulau pada tahun 2025. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada 16 dokumen pulau sampai dengan Triwulan III 2025 sebagai berikut:

1. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduian, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
9. Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
10. Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11. Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dan

Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" sebanyak 3 pulau. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, sampai dengan triwulan III Tahun 2025 telah ada 16 dokumen pulau sebagai berikut:

- 1) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 3) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 4) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduian, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 5) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

- 6) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 7) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 8) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 9) Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
- 10) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 11) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan

Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terdapat perbedaan nomenklatur IKU pada tahun 2025 dengan 2024. Nomenklatur IKU yang digunakan pada tahun 2024 adalah "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)". Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Tidak ada target IKU ini pada Triwulan III 2024. Namun demikian, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah terdapat 24 dokumen terdiri dari dokumen fasilitas perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebanyak 11 pulau dan dokumen fasilitas sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil sebanyak 13 pulau sebagai berikut:

Tabel 33. Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan fasilitas sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan III 2024

No	Nama Dokumen	PNBP (Rp)	Jenis Kegiatan
A. Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil			
1	Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Nusa Lembongan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali.	-	-
2	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kelebung, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	432.820.000	KBLI 55110 -Hotel Bintang
3	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kepayang (Pulau Aji), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	284.897.400	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
4	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kera 1 (Pulau Kerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2.036.800	55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek)
5	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	763.800	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
6	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Maratua, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur.	66.705.200	KBLI 55110 -Hotel Bintang
7	Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam	-	-

	Rangka PMA di Pulau Gili Gede (1), Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB.		
8	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Lumut, kabupaten Karimun	-	-
9	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Parit di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
10	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Tulang di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
11	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Parit, Pulau Tulang dan Pulau Lumut di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
B. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil			
1	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Buraidi, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
2	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Buraolei, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
3	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Gusunduan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
4	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
5	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Kamarian Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
6	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lalungan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
7	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Sumanga Kayyang, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
8	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Sumanga Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
9	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lamudaan Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
10	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
11	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Tappilagaan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
12	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Tasambela, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
13	Pembayaran PNB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lumulumu, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K (Triwulan III 2024)

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" sebanyak 3 pulau pada tahun 2025. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah ada 16 dokumen pulau sebagai berikut:

- 1) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 3) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 4) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 5) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 6) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 7) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 8) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 9) Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
- 10) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 11) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan

Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat..

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada tahun 2025 sebanyak 3 pulau. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian sebanyak 16 pulau sampai dengan Triwulan III 2025 yakni dokumen:

- 1) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 3) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 4) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 5) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

- 6) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 7) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 8) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 9) Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
- 10) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 11) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dan

Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan,, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jadi, capaian IKU ini pada periode Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada tahun 2025 sebanyak 3 pulau. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian sebanyak 16 pulau sampai dengan Triwulan III 2025 yakni dokumen:

1. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
9. Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
10. Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11. Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dan

Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan,, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun KKP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL terdekat.
- c. Penjadwalan kegiatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi cuaca.
- d. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P3K.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL dan pertemuan secara daring (*online*) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah Kebijakan Bidang kemaritiman dan Kelautan (Kode PBW) khususnya berkaitan dengan Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (Kode PBW.002), dan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khususnya berkaitan dengan Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.002.051).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

- 1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBK) atau Sertipikat HAT**

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini antara lain:

1. Audiensi Sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK Kepulauan Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 16 Januari 2025;
2. Rapat Koordinasi Progres Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada tanggal 26 Februari 2025;
3. Rapat Koordinasi Progres Sertifikasi Kawasan Hutan di Pulau-Pulau Kecil Terluar pada tanggal 13 Maret 2025;
4. Dokumen Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 20 Maret 2025;
5. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
6. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
7. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
8. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Kamarian Marinni, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
9. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
10. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
11. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
12. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
13. Fasilitasi Sertifikasi Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote tanggal 16-22 Mei 2025;
14. Rapat Persiapan Sertifikasi Lahan K-SIGN di Jakarta tanggal 28 Mei 2025;
15. *Kick Off* Pembangunan K-SIGN dan Peninjauan Calon Modeling Lahan Garam tanggal 1-5 Juni 2025;
16. Sosialisasi dan Survey Pemetaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote tanggal 18-22 Juni 2025;
17. Survei Lokasi Pemanfaatan Pengelolaan Lahan Pengembangan Eduwisata Mangrove, Kamal Muara, Jakarta Utara;
18. Dukungan Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Sosial Perikanan di Kawasan Muara Angke melalui aplikasi zoom (14 Juli 2025)
19. *Podcast* Segara "Pulau Kecil Bukan Buat Dijual: Kompak Menjaga Masa Depan Laut Kita" di Media Center GMB IV Lantai GF (14 Juli 2025)
20. Audiensi PT Kapuknaga Indah terkait Reklamasi Pulau C di Ruang Direktur P3K Lantai 8, GMB III (17 Juli 2025)
21. Rapat Pembahasan Data dan Informasi Lokasi yang Memiliki Potensi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, Pulau-Pulau Kecil dan Lokasi yang Sudah dan Belum Pernah Mendapatkan Bantuan *Loan*/Hibah di Ruang Rapat Cakalang Lantai 3 GMB III (22 Juli 2025)

22. Audiensi terkait peraturan pulau-pulau kecil (*small island policy*) di Indonesia di Ruang Rapat Selaru Lt. 8 GMB III (21 Agustus 2025)
23. Rapat Koordinasi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, Gedung Mina Bahari III, Lt.12 (4 Agustus 2025)
24. Rapat Koordinasi Penyelesaian Pemetaan, Sertifikasi, RDTR, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom (3 September 2025)
25. Rapat Pembahasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Pulau Bunyu dan Sipora di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (4 September 2025)
26. Audiensi terkait Kegiatan Pertambangan Pulau Pulau Kecil di Prov. Kepulauan Riau bersama Pemda Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Padaido GMB III Lt. 11 (16 September 2025)
27. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) No 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Pulau Enggano dan Normalisasi Alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu melalui Video conference di lokasi masing-masing (16 September 2025)
28. Rapat kegiatan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Ruang Rapat Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan Gedung. A. Yani Lantai VIII (17 September 2025)
29. Diskusi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Kerja Dirjen PK Lantai 11 GMB 3 (18 September 2025)
30. Rapat Koordinasi Penyelesaian Sertifikasi Pulau – Pulau Kecil Terluar dalam Kawasan Hutan melalui Aplikasi Zoom (22 September 2025)



Gambar 16. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus)

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain:

1. Rapat Pembahasan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, (5) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB pada tanggal 21 April 2025.
2. Rapat Koordinasi Program Prioritas P3K membahas proteksi Pantura Jawa, Pembangunan gugus pulau utk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan penanganan sampah laut melalui *meeting zoom* (13 Mei 2025),
3. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan mengenai Pengembangan Kawasan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, (5) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB, pada tanggal 11 Juni 2025.
4. Pembahasan Gugusan Pulau Tujuh dan Pulau Dua di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kantor Kementerian Dalam Negeri (2 Juli 2025).
5. Klarifikasi Pengusulan Pulau-Pulau Kecil dan Gugus Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam RPP RTRWN dan Klarifikasi Peta Potensi Lahan Garam dan Strategi Spasial Hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Staf Khusus Lantai 6 GMB I (7-8 Juli 2025).
6. Sosialisasi Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lombok Timur di Ruang Rapat Kantor Bupati Lombok Timur (17 Juli 2025)
7. Rapat Pembahasan Pulau-Pulau Kecil dan Gugus Pulau-Pulau Kecil sebagai PKSN dalam RPP RTRWN di Ruang Rapat Cakalang GMB III Lantai 1 (21 Juli 2025).
8. Rapat Teknis Perumusan Klaster Pulau-Pulau Kecil yang akan Diintegrasikan dalam RTRWN di Ruang Direktur Perencanaan Ruang Peraliran GMB III Lantai 9 (29-30 Juli 2025).
9. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Gili Kondo di Ruang Rapat Kantor Bupati Lombok Timur (11 September 2025).

3. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi kerjasama pemanfaatannya

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini sampai dengan Triwulan III tahun 2025, antara lain:

1. Rapat Pembahasan Rekomendasi Temuan BPK-RI atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam tanggal 2 Januari 2025.
2. Rapat Rencana Pengembangan Ekonomi di Wilayah Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 Januari 2025.
3. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) tanggal 13-16 Januari 2025.
4. Rapat Pembahasan Tim Akselerasi Pengembangan Pulau Lusi tanggal 24 Januari 2025.
5. Rapat Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa Kota Batam tanggal 12 Februari 2025.
6. Rapat Pembahasan Persiapan *Site Survey* Pemanfaatan Lahan Pulau Nipa pada tanggal 24 Februari 2024.
7. Rapat evaluasi terhadap investasi dan kewajiban Mitra atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 Maret 2025.
8. Rapat pembahasan NSPK terkait Penyusunan *Draft* Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Pedoman Teknis Investasi Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 2 Juni 2025.
9. Sosialisasi Persiapan Pengembangan Kawasan di Kamal Muara tanggal 10 Juni 2025;

10. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Inpres No. 12 Tahun 2025 tentang Pulau Baai dan Pulau Enggano melalui Aplikasi Zoom (3 Juli 2025)
11. Rapat Pembahasan Koreksi Piutang KSP Pulau Nipa di Ruang Rapat Kawaluso, Lantai 9, GMB III (29 September 2025)





Gambar 17. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Kerjasama Pemanfaatannya

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” sampai tanggal 30 September 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 002. Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.599.999.000	935.790.000	284.177.473	257.176.209	541.353.682	57,85	394.436.318
PFA 002.051. NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	381.939.000	280.502.000	17.787.500	89.411.600	107.199.100	38,22	173.302.900

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 September 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 adalah melaksanakan kegiatan:

- Fasilitasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Rote Ndao.
- Fasilitasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Lombok Timur.
- Fasilitasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Sidoarjo.
- Fasilitasi Pengadaan Tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.
- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara.

IKU 07. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 04 yaitu “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana.

Pada tahun 2025, IKU Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya berkaitan dengan bantuan sarana ekonomi produktif yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang menerima bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan.

Tabel 35. Target dan Realisasi “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04)		Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan							
IKU – 07		Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	56	-	-	-	-	47	-		

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi. Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Terdapat perbedaan nomenklatur IKU pada tahun 2025 dengan 2024. IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" berkaitan dengan bantuan ekonomi produktif pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2024, IKU "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" berhubungan dengan Pembangunan prasarana dermaga apung di pesisir dan pulau-pulau kecil. Nomenklatur IKU pada tahun 2024 adalah "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)". Tidak ada target maupun capaian IKU "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" pada Triwulan III 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Jadi, capaian Triwulan III 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi. Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi. Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. sehingga capaian Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi.

IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis keberhasilan dari IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” pada periode Triwulan III tahun 2025 antara lain pekerjaan verifikasi kelompok penerima bantuan dan proposal pengajuan bantuan sebagian besar dilakukan lebih awal pada tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Di samping itu, masih adanya proposal terlambat diterima, proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang lama, dan bantuan yang diusulkan tidak memiliki TKDN.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: berkoordinasi dengan dinas terkait untuk percepatan proposal, berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa, dan memverifikasi usulan bantuan yang diusulkan agar memiliki TKDN, melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di daerah guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup DJPRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang berkaitan dengan IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” ini adalah Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar khususnya berkaitan dengan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode QEG.001.051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)” sampai Triwulan III tahun 2025 antara lain:

1. Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.
2. Koordinasi dengan Tim Kerja PPKT terkait pembagian Lokasi rencana Bantuan Sarana Ekonomi Produktif ke masing masing anggota tim (24 Februari 2025).
3. Bimbingan Teknis Modul Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (13 Maret 2025).
4. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom (28 April 2025).
5. Pembahasan Implementasi Modul Bantuan Pemerintah pada Portal Data KKP melalui Aplikasi Zoom (30 April 2025).
6. Sosialisasi Percepatan Distribusi KUSUKA Cetak BRI di Ruang Rapat Vicon, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 dan Aplikasi Zoom (21 Mei 2025).
7. Validasi Data Informasi Geospasial Tematik Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2024 di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 dan Aplikasi Zoom (26 Juni 2025)
8. Perkembangan kegiatan pendukung pada Bulan Juli 2025, antara lain:

- a. Daftar Usulan Proposal yang masuk untuk selanjutnya di jadwalkan verifikasi (25 Proposal/ 23 Paket) yaitu: 1) Kebumen, 2) Pati, 3) Pati, 4) Indramayu dan Cirebon, 5) Alor, 6) Wonosobo, 7) Mamuju, 8) Lampung Timur, 9) Tabanan, 10) Tulang Bawang, 11) Aceh Utara, 12) Pangandaran, 13) Sumbawa, 14) Banyuasin, 15) Kalimantan Barat, 16) Kalimantan Barat, 17) Kalimantan Barat, 18) Kab.Tarakan, 19) Kab.Pangkalan Bun, 20) Sukabumi, 21) Rote Ndao, 22) Cianjur, 23) Cianjur (2 Proposal).
 - b. Verifikasi Kelompok (11 Paket), yaitu : 1) Kebumen, 2) Pati, 3) Pati, 4) Indramayu dan Cirebon, 5) Wonosobo, 6) Tabanan, 7) Pangandaran, 8) Rote Ndao, 9) Kalimantan Barat, 10) Kalimantan Barat, 11) Kalimantan Barat.
 - c. Persiapan Pengadaan (10 Paket), yaitu : 1) Kebumen, 2) Pati, 3) Pati, 4) Indramayu dan Cirebon, 5) Wonosobo, 6) Tabanan, 7) Pangandaran, 8) Kalimantan Barat 9) Kalimantan Barat 10) Kalimantan Barat.
9. Perkembangan kegiatan pendukung pada Bulan Agustus 2025, antara lain:
- a. Daftar Usulan Proposal (34 Paket): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Alor, (4). Cianjur 1, (5). Cianjur 2, (6). Sukabumi, (7). Indramayu dan Cirebon, (8). Pangandaran 1, (9). Pangandaran 2, (10). Pati 1, (11). Pati 2, (12). Wonosobo, (13). Kebumen, (14). Mamuju, (15). Sambas, (16). Sanggau, (17). Landak, (18). Kotawaringin Barat, (19). Tarakan, (20). Karimun, (21). Tulang Bawang 1, (22). Tanggamus, (23). Tulang Bawang 2, (24). Maluku Tengah, (25). Sumbawa, (26). Rote Ndao, (27). Sorong, (28). Merauke, (29). Asmat, (30). Jeneponto, (31). Poso, (32). Pesisir Selatan, (33). Kota Pariaman, (34). Banyuasin.
 - b. Verifikasi Kelompok (14 Paket): (1). Tabanan, (2). Indramayu dan Cirebon, (3). Pangandaran 1, (4). Pati 1, (5). Pati 2, (6). Wonosobo, (7). Kebumen, (8). Sambas, (9). Sanggau, (10). Landak, (11). Tulang Bawang, (12). Sumbawa, (13). Rote Ndao, (14). Banyuasin.
 - c. Persiapan Pengadaan (12 Paket): (1). Tabanan, (2). Indramayu dan Cirebon, (3). Pangandaran 1, (4). Pati 2, (5). Wonosobo, (6). Kebumen, (7). Sambas, (8). Sanggau, (9). Landak, (10). Tulang Bawang, (11). Sumbawa, (12). Banyuasin.
10. Perkembangan kegiatan pendukung pada Bulan September 2025, antara lain:
- a. Daftar Usulan Proposal (38 Lokasi): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Bantul dan Gunung Kidul, (4). Alor, (5). Cianjur 1, (6). Cianjur 2, (7). Cianjur 3, (8). Sukabumi, (9). Indramayu dan Cirebon, (10). Pangandaran 1, (11). Pangandaran 2, (12). Pati 1, (13). Pati 2, (14). Wonosobo, (15). Kebumen, (16). Banyuwangi, (17). Mamuju, (18). Sambas, (19). Sanggau, (20). Landak, (21). Kotawaringin Barat, (22). Tarakan, (23). Karimun, (24). Tulang Bawang 1, (25). Tanggamus, (26). Tulang Bawang 2, (27). Maluku Tengah, (28). Sumbawa, (29). Lembata, (30). Rote Ndao, (31). Sorong, (32). Merauke, (33). Asmat, (34). Jeneponto, (35). Poso, (36). Agam dan Kota Padang, (37). Kota Pariaman, (38). Banyuasin.
 - b. Verifikasi Kelompok dan Persiapan Pengadaan (23 Lokasi): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Alor, (4). Sukabumi, (5). Indramayu dan Cirebon, (6). Pangandaran 1, (7). Pangandaran 2, (8). Pati 1, (9). Pati 2, (10). Wonosobo, (11). Kebumen, (12). Sambas, (13). Sanggau, (14). Landak, (15). Karimun, (16). Tulang Bawang 1, (17). Sumbawa, (18). Rote Ndao, (19). Sorong, (20). Jeneponto, (21). Agam dan Kota Padang, (22). Kota Pariaman, (23). Banyuasin.
 - c. Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Kontrak (9 Lokasi): (1). Tabanan, (2). Pangandaran 1, (3). Pati 2, (4). Wonosobo, (5). Kebumen, (6). Sambas, (7). Sanggau, (8). Landak, (9). Banyuasin.

11. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)" sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" Sampai Dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran T.A. 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QEG.001.051.OA. Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000.000	5.500.000.000	188.356.535	97.372.709	285.729.244	5,20	5.214.270.756

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 September 2025)

12. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025, antara lain:

- Koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk akselerasi persyaratan administrasi, verifikasi administrasi, pengadaan bantuan sarana/prasarana, pemberian bantuan sarana/prasarana, dan serah terima bantuan sarana/prasarana.
- Verifikasi calon penerima dan penetapan kelompok serta proses pengadaan barang berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- Penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari KKP kepada kelompok masyarakat.

IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 05 yaitu “Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya (komunitas) adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dari kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk generasi mendatang.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 37. Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)		Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal							
IKU – 08		Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025 dan tidak ada IKU ini pada tahun 2024. Jadi, capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 2 komunitas sehingga capaian Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 2 komunitas sehingga capaian Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 2 komunitas.

IKU Nomor “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah dukungan pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, maupun kelompok masyarakat.

b. Kendala

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui BANTUAN perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian target Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada Triwulan III tahun 2025 adalah Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Kode PFA.001.052.OA), Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya (Kode QDD.001), serta Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (QDD.003).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sampai periode Triwulan III tahun 2025 antara lain:

1. Rapat Pembahasan Indeks Kemandirian MHA di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (Rapat Internal Direktorat P4K) (14 Januari 2025).
2. Rapat Tindak Lanjut Fasilitasi Penguatan MHA Provinsi Maluku Kantor Rare Indonesia Kota Bogor (16 Januari 2025).
3. Asia *Land Forum* 2025 Panel diskusi dengan tema “Reforma Agraria Bagi Penghormatan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Nelayan.” (19 Februari 2025).
4. Menerima Audiensi dari Ketua Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seluruh Indonesia (12 Maret 2025).
5. Penanggap pada tema: “Pemulihan Lingkungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat di Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil: Potret Pembelajaran Pengelolaan Areal Konservasi Kelola Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui Aplikasi Zoom (24 April 2025).
6. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kabupaten Bombana di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8 (8 Mei 2025).
7. Audiensi Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat di Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Ruang (8 Mei 2025).
8. Rapat Koordinasi Persiapan Diseminasi MHA Kab. Teluk Wondama di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).
9. Rapat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kantor Bupati Kabupaten Bintan (21 Mei 2025).

10. Diskusi Terpimpin Nasional mengenai "Pendekatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat: Pembelajaran dari *Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)*, Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan Kawasan Konservasi Peraliran di Indonesia (3 Juni 2025)
11. *Kick Off* Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (24 Juni 2025)
12. Penanggap *talk show* dalam *Kick Off* Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Hotel Mercure Sabang (24 Juni 2025)
13. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPRL Masyarakat Lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (25 Juni 2025).
14. Diskusi Seri Ke-1 Mengangkat Tema "Pengakuan Wilayah Adat dan Reforma Agraria Inklusif" di Hotel Erian Jakarta (15 Juli 2025)
15. Narasumber pada Kegiatan Lokakarya Peluang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat dalam Kerangka Kebijakan Nasional dan Daerah: Pembelajaran Pemetaan Partisipatif di Desa Sumberklampok, Penjarakan, Sumberkima, dan Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (15 Juli 2025)
16. Narasumber terkait Identifikasi Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan/atau Masyarakat Lokal pada acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan di Hotel Borobudur Jakarta (16 Juli 2025)
17. FGD RUU Masyarakat Adat di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Kementerian HAM (17 Juli 2025)
18. Koordinasi terkait Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan MHA Ohoi Ohoirenang di Ruang Rapat Selaru, GMB III, Lantai 8 dan aplikasi zoom (17 Juli 2025)
19. Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Wilayah Pesisir di *Holiday Inn Express* Jakarta (18 Juli 2025)
20. Koordinasi Teknis Fasilitasi Pengakuan dan Penguatan MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kantor Rare Indonesia, Kota Bogor (22 Juli 2025)
21. Rapat Identifikasi dan Fasilitasi Wilayah Administrasi Kecamatan dan Pulau di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kantor Kementerian Dalam Negeri (22 Juli 2025)
22. Rapat Persiapan Koordinasi Awal Fasilitasi Pengakuan MHA Kab. Seram Bagian Barat melalui Aplikasi Zoom (29 Juli 2025)
23. Sarasehan "Masyarakat Adat sebagai Penjaga Tradisi Pangan Lokal dan Benih Leluhur Nusantara" di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Lantai 1, Jakarta (7 Agustus 2025)
24. Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara" di Hotel Galaxy Inn Baubau (20 Agustus 2025)
25. "Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara" di Hotel Galaxy Inn Baubau (21-22 Agustus 2025)
26. Pembahasan Analisis Data Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Grand Savero Hotel Bogor (21 Agustus 2025)
27. Penanggap pada kegiatan Diseminasi Kajian: "Menegaskan Hak, Mengukuhkan Ruang Hidup – Praktik Pemetaan Partisipatif di Wilayah Adat" di Hotel di Bogor (27 Agustus 2025)
28. Serial Diskusi Para Ahli untuk mempertajam rumusan arah kebijakan dan strategi Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Pada Diskusi Seri Ke-3 kami mengangkat tema 'Ancaman dan Risiko terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di ARTOTEL Hub Simpang Temu Jakarta (4 September 2025) (4 September 2025)
29. Audiensi terkait Kegiatan Pertambangan Pulau Pulau Kecil di Prov. Kepulauan Riau bersama Pemda Provinsi Kepulauan Riau di RR. Padaido GMB III Lt. 11 (16 September 2025)
30. Sosialisasi Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal melalui Aplikasi Zoom (22 September 2025)
31. Persiapan kegiatan peningkatan kapasitas MHA Wapulaka dan pembahasan penyusunan materi/modul bimtek peningkatan Kapasitas MHA Wapulaka di Ruang Rapat Selaru Gedung Mina Bahari III Lantai 8 dan Aplikasi Zoom (30 September 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PFA.001.052.OA Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000.000	2.613.000	2.612.700	0	2.612.700	99,99	300
QDD.001. Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000.000	474.746.000	86.107.257	111.424.100	197.531.357	41,61	277.214.643
QDD.003. Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 September 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada periode Triwulan IV tahun 2025, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan kelompok Masyarakat.
- Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat Wapulaka, Kabupaten Buton Selatan.
- Penyelesaian modul inventarisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan

IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 06 yaitu “Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya baik PMA, PMDN, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat ataupun perseorangan, mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melengkapi dokumen legalitas usaha dan perizinan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik untuk kegiatan penanaman modal asing (PMA) maupun kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN), wajib memiliki izin atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- a. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA); atau
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib mengajukan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 mulai berlaku.

Tujuan utama penertiban perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah untuk memastikan pemanfaatan pulau-pulau tersebut dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Perizinan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan pulau-pulau kecil, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak terkontrol.

Dengan demikian, penertiban perizinan bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Teknik menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

Dokumen pulau-pulau kecil yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, atau penerbitan perizinan pemanfaatan);

Σ Dokumen Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil + Σ Dokumen Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil + Σ Dokumen Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Tabel 39. Target dan Realisasi IKU "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif (Dokumen)" Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 06 (SK-06)		Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 09		Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	152	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Tidak ada target IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Namun demikian, telah ada 120 dokumen pulau-pulau kecil yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, atau penerbitan perizinan pemanfaatan) sampai dengan Triwulan III 2025 sebagai berikut:

- 1) Dokumen Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Matahari Terbenam.
- 2) Dokumen Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Onu Mentawai Internasional.
- 3) Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Selu, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
- 5) Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB oleh PT Ultimate Gili Gede.

- 6) Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa Mimpi).
- 7) Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa Kubu).
- 8) Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa dalam Pembangunan).
- 9) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Dharma Inti Bersama.
- 10) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Pisang, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Kepri Island Resort.
- 11) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Pisangbatu (Pisang Anak), Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Kepri Island Resort.
- 12) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Arnalaya Resorts.
- 13) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Bali Cruises Nusantara.
- 14) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT BJTP Gamat Sunset.
- 15) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Castaway Villas Lembongan.
- 16) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Dive Resort Internasional.
- 17) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Eco Warisan Penida.
- 18) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Indiana Island I.
- 19) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Indiana Island II.
- 20) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Java Pama Temple.
- 21) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Jukung Dive Penida Resort.
- 22) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Lembongan Jati.
- 23) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Mantascape Diving Indonesia.
- 24) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Pretty Sally Indonesia.
- 25) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Seven Dreams Nusa Penida.

- 26) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT The Palms Ceningan.
- 27) Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Two Fish Bali.
- 28) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Alas Villa.
- 29) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Aurora Beach View.
- 30) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Baliwood Social Club.
- 31) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Baruna Frangipani.
- 32) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Bay Shore Huts.
- 33) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Coconut Village Guest House.
- 34) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh CV Mola Mola Lembongan.
- 35) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Byas Dream Beach Club and Villa.
- 36) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Coin Lembongan Cottage and Spa.
- 37) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Muncuk Huts Lembongan.
- 38) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Darsan Lembongan.
- 39) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Fin Island Bar and Restaurant.
- 40) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Jenggala Hill.

- 41) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Jennys Place Lembongan.
- 42) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Kawan Inn Lembongan.
- 43) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Kenanga Spa.
- 44) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Koji Garden Huts.
- 45) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Le Biu Garden View.
- 46) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Le Nusa Beach Club.
- 47) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lembongan Beach Club Bar & Restoran Resort.
- 48) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lembongan Spa.
- 49) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lemongrass Bar & Restaurant.
- 50) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Indah Bungalow.
- 51) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Indah Onai.
- 52) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Veranda Sunset Villa.
- 53) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Oishii Bar and Grill.
- 54) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Pondok Jenggala.
- 55) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Dream Beach Lembongan.

- 56) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Laksana Perkasa Group.
- 57) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Laksana Perkasa Group II.
- 58) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Love Land Management.
- 59) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Nusa Bali Mesari.
- 60) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Selancar Nusa Abadi.
- 61) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Tiara Cipta Nirwana.
- 62) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Tirta Nusa Mesari.
- 63) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Puri Kirana Cottage Lembongan.
- 64) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Secret Point Huts.
- 65) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Song Lambung Beach Huts.
- 66) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Sunset Garden Nusa Lembongan.
- 67) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Palm Grove Villas.
- 68) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Tanis Villa.
- 69) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The White Orchid.
- 70) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Widari Spa.

- 71) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Twin Islands Villas.
- 72) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Villa Giyor.
- 73) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Villa Kembang.
- 74) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Warung Bambu.
- 75) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Water Blow Huts Lembongan.
- 76) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Aamandalay Hotel.
- 77) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Atlante Hostel.
- 78) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Aulia Homestay.
- 79) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Ayu Hotel.
- 80) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Basa-Basi Karimunjawa.
- 81) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Berkah Homestay.
- 82) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Blue Laguna Inn.
- 83) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh CV Alcheringa Bermimpi Bahagia Jepara.
- 84) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh CV Kinara Kinari Alam Lestari.
- 85) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Karimun Jaya Bersama.

- 86) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Dafista Homestay.
- 87) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Deepsky Villa.
- 88) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Dua Putri Homestay.
- 89) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Griya Zeni Homestay.
- 90) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Homestay Windisari.
- 91) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Hotel Summer Inn.
- 92) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Inap.Inap.
- 93) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Karimunjannah House.
- 94) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Lazuardy Guest House.
- 95) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Liandri.
- 96) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Loyal Friend Hostel.
- 97) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Mekarsari Homestay.
- 98) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Mirabelle Joglo Village.
- 99) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Nemo Homestay.
- 100) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pak Wawan Homestay.

- 101) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pantura Homestay.
- 102) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pondok Wisata Septiana.
- 103) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pondok Wisata Zaenal.
- 104) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Blue Garden Boutique Hotel.
- 105) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Putri Karimunjawa.
- 106) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Sadewo.
- 107) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Salma Dive Shop.
- 108) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Sama-sama Homestay.
- 109) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh *The Big K*.
- 110) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Toko Mak Yul.
- 111) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Tri Putra Homestay.
- 112) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Wahyu Izza.
- 113) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Wisma Cikal.
- 114) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Zahra Homestay.
- 115) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Zahra Homestay.

- 116) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Leandra.
- 117) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Kemujan Indah Resort.
- 118) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Karimun Indah Raya.
- 119) Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Bunga Jabe.
- 120) Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Zahra Homestay.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Tidak ada target IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Namun demikian, telah ada 120 dokumen pulau-pulau kecil yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, atau penerbitan perizinan pemanfaatan) sampai dengan Triwulan III 2025.

Terdapat perbedaan IKU pada tahun 2025 dan 2024. Pada tahun 2024 menggunakan IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)". Target IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" sebanyak 8 pulau pada tahun 2024. Tidak ada target IKU ini pada Triwulan III 2024. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah terdapat 11 dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan 13 dokumen fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

Tabel 40. Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (11 pulau) dan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil (13 pulau) Pada Triwulan III 2024

No	Nama Dokumen	PNBP (Rp)	Jenis Kegiatan
A. Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil			
1	Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Nusa Lembongan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali.	-	-
2	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kelebung, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	432.820.000	KBLI 55110 -Hotel Bintang
3	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kepayang (Pulau Aji), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	284.897.400	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
4	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kera 1 (Pulau Kerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2.036.800	55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek)

5	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	763.800	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
6	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Maratua, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur.	66.705.200	KBLI 55110 -Hotel Bintang
7	Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Gili Gede (1), Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB.	-	-
8	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Lumut, kabupaten Karimun	-	-
9	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Parit di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
10	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Tulang di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
11	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Parit, Pulau Tulang dan Pulau Lumut di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
B. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil			
1	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Buraidei, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
2	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Buraolei, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
3	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Gusunduian, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
4	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
5	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Kamarian Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
6	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lalungan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
7	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Sumanga Kayyang, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
8	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Sumanga Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
9	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lamudaan Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
10	Pembayaran PNBP, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-

11	Pembayaran PNPB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Tappilagaan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
12	Pembayaran PNPB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Tasambela, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
13	Pembayaran PNPB, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lumulumu, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K (Triwulan III 2024)

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Tidak ada target IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Namun demikian, telah ada 120 dokumen pulau-pulau kecil yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, atau penerbitan perizinan pemanfaatan) sampai dengan Triwulan III 2025

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Namun demikian, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai dengan Triwulan III 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Namun demikian, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai dengan Triwulan III 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah; dan (iii) pelaksanaan gerai perizinan kepada pelaku usaha lebih intensif dilaksanakan..

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025.

Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya sebagai berikut: 1) adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan secara daring (*online*) terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki oleh Direktorat P3K (BMN), 4) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL, dan 5) Pelaksanaan verifikasi administrasi perizinan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah Kebijakan Bidang kemaritiman dan Kelautan (Kode PBW) khususnya berkaitan dengan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PBW.001), dan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khususnya berkaitan dengan Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.002.051).

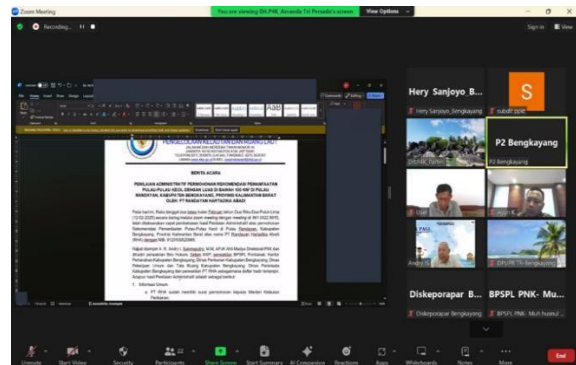
9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

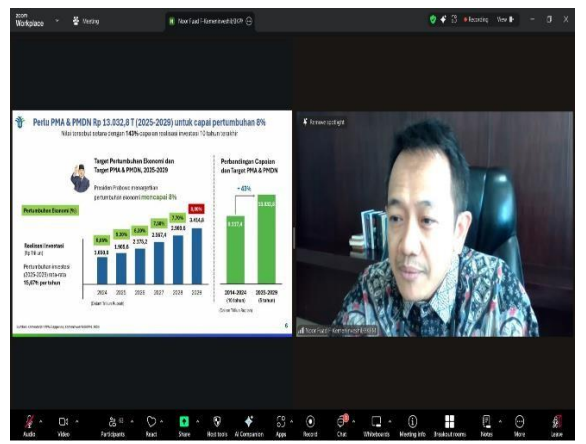
1. Rapat Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Pulau dengan PSDKP tanggal 13 Januari 2025;
2. Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Sipora pada tanggal 14-18 Januari 2025;
3. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Penebang tanggal 9-16 Februari 2025;
4. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Randayan tanggal 12 Februari 2025;
5. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Randayan tanggal 17-20 Februari 2025;
6. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Gili Gede pada tanggal 6 Maret 2025;
7. Pembahasan Validasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 11 April 2025;
8. Pembahasan dan Finalisasi Usulan Penyempurnaan KBLI Tahun 2020 lingkup KKP pada tanggal 16 April 2025;

9. Audiensi dari Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 17 April 2025;
10. Verifikasi Administrasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Seliu pada tanggal 30 April 2025;
11. Audiensi dengan PT Batamindo Investment Cakrawala pada tanggal 5 Mei 2025;
12. Rapat Pembahasan Implementasi Fiktif Positif Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Mei 2025;
13. Rapat Koordinasi Pendataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 9 Mei 2025;
14. Rapat Tindak Lanjut Surat Forum Pelaku Pariwisata di Pantai Timur Pulau Bintan pada tanggal 21 Mei 2025;
15. Audiensi dari team kelompok kerja regional unesco terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 22 Mei 2025;
16. Kunjungan Lapangan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12-14 Juni 2025;
17. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisang pada tanggal 20 Juni 2025;
18. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisangbatu pada tanggal 20 Juni 2025;
19. Verifikasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisang pada tanggal 21 Juni 2025;
20. Verifikasi Administrasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisangbatu pada tanggal 21 Juni 2025;
21. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) oleh PT Darma Inti Bersama di Pulau Penebang pada tanggal 23 Juni 2025;
22. Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali pada tanggal 14 Juni sd 4 Juli 2025;
23. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora oleh PT Bela Sulu Mentawai (I) pada tanggal 8 Juli 2025;
24. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora oleh PT Bela Sulu Mentawai (II) pada tanggal 8 Juli 2025;
25. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora oleh PT Bela Sulu Mentawai (III) pada tanggal 8 Juli 2025;
26. Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Pada Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 24 Juli 2025;
27. Rapat Koordinasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 25 Juli 2025;
28. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Pisang oleh PT Kepri Island Resort pada tanggal 3 Agustus 2025;
29. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Pisangbatu oleh PT Kepri Island Resort pada tanggal 3 Agustus 2025;
30. Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Jepara pada tanggal 28 Juli – 15 Agustus 2025;

31. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pendahuluan dalam Rangka Permohonan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri pada tanggal 26-28 Agustus 2025;
32. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 5 September 2025;
33. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2025;
34. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 16-17 September 2025;
35. Konsultasi Publik Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 25 September 2025;







Gambar 18. Kegiatan Pendukung Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 001. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	6.600.000.000	3.438.916.000	698.095.190	560.531.806	1.258.626.996	36,60	3.310.836.190
PFA 002.051. NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	381.939.000	280.502.000	17.787.500	89.411.600	107.199.100	38,22	173.302.900

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 September 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025, antara lain:

- Koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan kelompok Masyarakat.
- Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Berau.
- Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bulungan.
- Harmonisasi dan Penetapan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024.

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

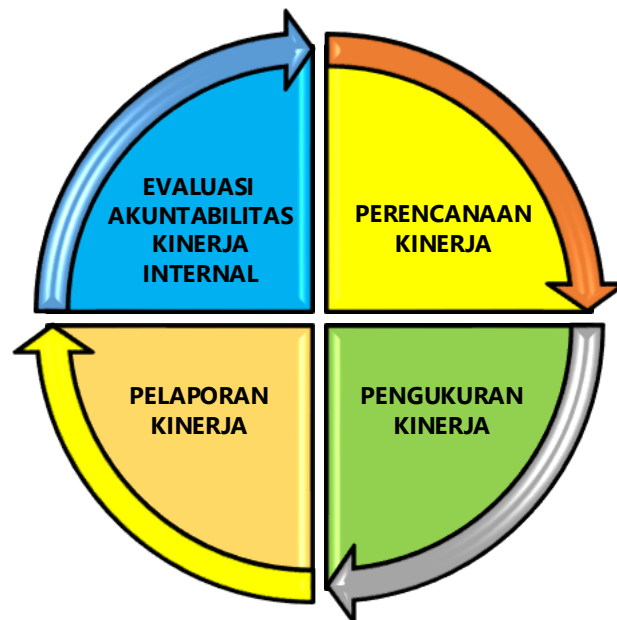
Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 10 “**Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 88 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian, antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).



Gambar 19. Siklus Pengelolaan Kinerja

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.

Tabel 42. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada periode Triwulan III tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 43. Target dan Capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 10		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW II	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	86,60	-	-	-	-	70	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis target dan capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 70.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 maupun pada Triwulan III tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan sehingga capaian IKM ini **tidak dapat dibandingkan** untuk periode Triwulan III tahun 2025 maupun Triwulan III tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Target IKM 10 ini pada tahun 2025 sebesar 70 sehingga capaian kinerja IKM ini pada periode Triwulan III tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan** dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Namun demikian, Direktorat P3K khususnya pada periode Triwulan III tahun 2025 berupaya untuk:

- a. Menyiapkan dokumen dan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) pada 4 (empat aspek) yaitu aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Tidak ada kendala pada IKM ini. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital dengan baik dan tertib.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07

“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode Triwulan III tahun 2025, antara lain:

1. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPKRL Tahun 2025 Ruang Rapat Wunga Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (8-9 Januari 2025).
2. Rapat Pemaparan Rancangan Awal Renstra DJPKRL 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III dan Aplikasi Zoom (10 Januari 2025).
3. Pembahasan Matriks *Cascading* Kinerja DJPKRL Tahun 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (13 Januari 2025).
4. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (14-16 Januari 2025).
5. Rapat Evaluasi Kegiatan 2024 dan Rencana Kegiatan 2025 di RR. Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (15 Januari 2025).
6. Pembahasan Rancangan Awal Kerangka Kinerja dan Pendanaan DJPK dan DJPRL Tahun 2025 – 2029 (19, 21-22 Januari 2025).
7. Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (23-24 Januari 2025).
8. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Eselon I baru (4 Februari 2025).
9. Dialog kinerja serta pengisian SKP TA 2025 di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8 GMB III (25-26 Februari 2025).
10. Rapat Penyusunan Uraian Fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Ndana, Gedung Mina Bahari III Lt. 9 (26 Februari 2025).
11. Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut (13 Maret 2025).
12. Pembahasan Manual Indikator Kinerja Level 2 satker lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Zoom (19 Maret 2025).
13. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Kinerjaku KKP melalui Aplikasi Zoom (14 April 2025).
14. Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja KKP dan Unit Organisasi Eselon I Triwulan I Tahun 2025 (15 April 2025)
15. Rapat Pimpinan Penyiapan Rancangan Program dan Anggaran KKP Tahun 2026 di RR Tuna, GMB IV Lantai 15 (15 April 2025).
16. Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2025 di R.R. Terubuk Lantai 10 GMB 3 (17 April 2025).
17. Penyusunan Laporan Kinerja KKP Triwulan I Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025).
18. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV dan Aplikasi Zoom (21 April 2025).
19. Rapat Rancangan Awal Renstra KKP 2025-2029 di Ruang Rapat Biro Perencanaan, GMB I Lantai 3A (21 April 2025).
20. Permohonan Hadir mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI terkait Pembahasan mengenai, Efisiensi Anggaran (Blokir) Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV), Gedung Nusantara II (22 April 2025).
21. Rapim Program dan Anggaran 2026 – 2029 di GMB I Lantai 7 (24 April 2025).
22. Pembahasan Program dan Kegiatan DJPK Tahun 2025 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9 Gedung Mina Bahari III (30 April 2025).

23. Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026-2029 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (2 Mei 2025).
24. Koordinasi Pembagian Personil, Penganggaran, dan Dokumen (P3D) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (9 Mei 2025).
25. Rapat Pembahasan Usulan Pemuktahiran Renja DJPK TA 2025 dan TA 2026 melalui Aplikasi Zoom (16 Mei 2025).
26. Pembahasan Program Prioritas Lingkup Ditjen PK di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (23 Mei 2025).
27. *Launching* Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP melalui Aplikasi Zoom (4 Juni 2025)
28. Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026-2029 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (11 Juni 2025)
29. Rapat Pimpinan Pembahasan *Strategic Planning* KKP Tahun 2025-2029 (26 Juni 2025)
30. Rapat Pimpinan Pembahasan *Strategic Planning* KKP Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat ZEE, GMB I Lantai 7 (30 Juni 2025).
31. Rapat Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBP Tahun 2025 pada Ditjen PK dan Ditjen PRL di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (1 Juli 2025)
32. Pembahasan Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Lingkup DJPK Tahun 2026 di Ruang Rapat Kawaluso, Lantai 9, GMB III (3 Juli 2025)
33. Rapat Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBP Tahun 2025 pada Ditjen PK dan Ditjen PRL di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB III (7 Juli 2025)
34. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026 dan Isu-Isu Aktual Lainnya (7 Juli 2025)
35. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL dengan UAPPA-E1 Periode Semester I 2025 (8-11 Juli 2025)
36. Penyusunan dan Reviu Dokumen Anggaran Pagu Indikatif Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 di Hotel Aone Jakarta (16 Juli 2025)
37. Penyusunan Laporan Kinerja KKP Triwulan II Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Perencanaan GMB I Lantai 3 A (21 Juli 2025)
38. Penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2025 di HR Building, Jakarta Pusat (23 Juli 2025)
39. Pemaparan dan Diskusi terkait Pengelolaan PNBP Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (28 Juli 2025)
40. Rapat Pembahasan Penggunaan PNBP di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III (31 Juli 2025)
41. Penyusunan dan Reviu Dokumen Pagu Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2026 di Grand Mercure Harmoni (1 Agustus 2025)
42. Pembahasan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas KKP Juni 2025 melalui Aplikasi Zoom (1 Agustus 2025)
43. Konfirmasi Penyesuaian Target RO berdasarkan Anggaran Efektif Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (8 Agustus 2025)
44. Reviu dokumen penambahan pagu penggunaan dana PNBP TA. 2025 di RR. Selaru Gd Mina Bahari III Lt. 8 (12-14 Agustus 2025)
45. Pembahasan Program Prioritas Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran DJPK Tahun 2026 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (20 Agustus 2025)
46. Rapat Progress Persiapan RAKERNIS DJPK melalui zoom meeting (8 September 2025)
47. Raker Komisi IV DPR RI - Penyesuaian RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV), Gedung Nusantara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta (16 September 2025)

48. Rapat pembahasan progres kegiatan Dit. P3K Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (19 September 2025)
49. Rapat Pembahasan Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026 di Ruang Graha Sawala, Gd. Ali Wardhana Lantai 1 Kemeko Bidang Perekonomian (22 September 2025)
50. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
51. Pengenalan Hasil Pengembangan Fitur Aplikasi Kinerja KKP lingkup DJPK di Ruang Rapat Lantai G1, Gedung HR, Kantor Lautra (29 September 2025)
52. Rapat Pimpinan Persiapan Rencana Kerja Teknis (Rakernis) DJPK Tahun 2025 (29 September 2025)

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 44. Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CC Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Direktorat P3K	151.360.000	129.307.709	85,43	22.052.291
WA.2367.EBA.962.051.CD Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	244.226.000	125.398.785	51,35	118.827.215
Rata-rata			68,39	

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 September 2025 terdiri dari:

- a. WA.2367.EBA.962.051.CC. Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi 85,43%.
- b. WA.2367.EBA.962.051.CD. Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi 51,35%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran dari *pont* a dan b sebesar 68,39%.

10. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 antara lain Direktorat P3K berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta memperhatikan dan berupaya meningkatkan nilai empat aspek tersebut pada periode mendatang.

IKM 11. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 11 "**Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 "**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Target dan capaian IKU ini pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 2 dokumen (penjumlahan dari 1 capaian dokumen di triwulan I dan 1 capaian dokumen di triwulan II 2025) sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Definisi:

- 1) Dasar Hukum:
 - a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 2) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL
- 3) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan III Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2025.

Teknik menghitung adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Target dan capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada Triwulan III 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Target dan Capaian IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 11		Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra

					Capaian TW III Tahun 2024		Target PK 2025		
3	4	2	2	100	100	3	66,67	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menggunakan IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)"

Analisis Target dan Capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Target dan capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada Triwulan III tahun 2025 adalah sama yaitu 2 dokumen (penjumlahan dari 1 capaian dokumen di triwulan I dan 1 capaian dokumen di triwulan II 2025) sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Target dan capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada Triwulan III tahun 2025 lebih kecil dibandingkan target dan capaian pada Triwulan III tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur Direktorat yang mulai diimplementasikan pada triwulan II 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2024

Capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada Triwulan III tahun 2025 adalah 2 dokumen (penjumlahan dari 1 capaian dokumen di triwulan I dan 1 capaian dokumen di triwulan II 2025). Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 3 dokumen sehingga capaian kinerja IKM ini pada periode Triwulan III tahun 2025 sebesar 66,67% dari target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target dan capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada Triwulan III tahun 2025 adalah 2 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Target tahun 2025 sebanyak 3 dokumen.

Capaian IKM pada triwulan III 2025 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sama dengan capaian di Unit kerja Eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan pada Triwulan III tahun 2025 yaitu sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100% artinya bahwa target sebanyak 2 dokumen (penjumlahan dari 1 capaian dokumen di triwulan I dan 1 capaian dokumen di triwulan II 2025) terpenuhi dengan capaian sebanyak 2 dokumen juga.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis keberhasilan dari IKM ini antara lain (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini karena pengumpulan dokumen data dukung dikoordinasikan dengan Tim Kerja lingkup Direktorat P3K dan Tim Kerja Keuangan dan BMN Setditjen Pengelolaan Kelautan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada Triwulan III tahun 2025, antara lain: pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan Laporan SPIP triwulanan.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 46. Realisasi Anggaran IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penunjang Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P3K)	71.669.000	49.617.000	69,23	22.052.000

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penunjang Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Risiko (Dit. P3K) yang mendukung IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar 69,23%.

11. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025 adalah Direktorat P3K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

IKM 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKU pada tahun 2025 ini sebesar 80. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran.

Beberapa definisi berkaitan dengan IKM 12 “**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**”, antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), Kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat PIM, Diklat Teknis/Jabfung, Diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2024 lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P3K.
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
1. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
2. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
3. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
4. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2025 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

Cara Mengukur

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalisme
- IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i
- IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
- IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
- IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
- IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

- $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j
- $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k
- $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l
- $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Target dan capaian IKM Nomor 12 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)" pada Triwulan III tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 12		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat P3K (indeks)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	88,06	-	-	-	-	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P3K (indeks)" pada periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Sebagai informasi bahwa capaian IKM ini pada triwulan II (semester I 2025) adalah 82,34.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Triwulan III tahun 2025 maupun triwulan III tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Sebagai informasi bahwa capaian IKM ini pada triwulan II (semester I 2025) adalah 82,34.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Sebagai informasi bahwa capaian IKM ini pada triwulan II (semester I 2025) adalah 82,34.

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Triwulan III tahun 2025 dengan unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan pada Triwulan III 2025.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. Analisis Keberhasilan

IKM Nomor 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPK.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.
- 3) Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan tidak telat melakukan presensi.

b. Kendala

Kendala pada IKM ini, antara lain:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat disebabkan oleh keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.
- 2) Unit kerja eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BPPSDM KP.
- 3) Masih kurangnya perhatian (*attention*) dan kesadaran para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-kinerja BKN masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN).

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P3K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung IKM Nomor 12 "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" periode Triwulan III tahun 2025 antara lain:

- a. Mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) pada Bulan Juli hingga September 2025 baik yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun pihak eksternal.
- b. Melakukan presensi (kehadiran) pada saat datang di kantor dan pulang kantor melalui aplikasi e-presensi.
- c. Penginputan target dan capaian SKP Triwulan III tahun 2025.
- d. Melakukan unggahan (*upload*) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diterima ke dalam aplikasi My ASN BKN.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 48. Realisasi Anggaran IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	143.338.000	110.260.000	76,92	33.078.000

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penunjang kepegawaian dan kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar 76,92%.

11. Rencana Aksi Pada Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode Triwulan III tahun 2025 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, memotivasi para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

IKM 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini adalah 80 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit. P3K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. P3K}} \times 100$$

Tabel 49. Target dan Capaian IKM 13 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 13		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
100	93,10	80	80	100	Penurunan 20%	80	100	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 80% berdasarkan Surat Nomor B. 2556/DJPK.1/TU.210/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan III tahun 2025. Ini berarti bahwa capaian sama dengan target yang ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 100% sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar (*screenshot*) di bawah ini.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JEP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL: ditjen@kkp.go.id

Nomor : B. 2556/DJPK.1/TU.210/X/2025 14 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan III Tahun 2025

Yth. 1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katimja Program
Di Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 944/ITJ.0/RC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan III Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ljen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan III Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 81,5% yaitu sebanyak 163 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 200 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan ljen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke IV Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan,

Mitahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal PK
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : B.2556/DJPK.1/TU.210/X/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Selditjen PK	55	44	80	11	20	80
2	Dit. KE	22	18	82	4	18	82
3	Dit. PKK	25	20	80	5	20	80
4	Dit. Jasbar	5	5	100	0	0	100
5	Dit. SDK	19	19	100	0	0	100
6	Dit. KSG	8	8	100	0	0	100
7	BKPPN Kupang	15	15	100	0	0	100
8	BPSPL Makassar	18	18	100	0	0	100
9	BPSPL Padang	9	9	100	0	0	100
10	LPSPL Sorong	10	10	100	0	0	100
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKPPN Pekanbaru	15	15	100	0	0	100
13	BPSPL Denpasar	7	7	100	0	0	100
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
15	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		200	163	81,50	37	18,50	81,50

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan,

Mitahul Huda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 20. Tangkapan Layar Capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Ditjen PK" Periode Triwulan III 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 80% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 100%.

Target IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 80% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 80% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 80% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Frekuensi pengukuran IKM

ini adalah triwulanan. Sedangkan target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah tahunan. Capaian IKM ini pada Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 dalam target Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan target dan capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" di Unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PK periode Triwulan III tahun 2025 tersaji pada tangkapan layar (*screenshot*) berdasarkan surat Nomor B. 2556/DJPK.1/TU.210/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan III Tahun 2025 di bawah ini.

Lampiran
Nomor : B.2556/DJPK.1/TU.210/X/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	55	44	80	13	3	80
2	Dit. KE	22	18	82	13	1,4	82
3	Dit. P3K	25	20	80	11	0,7	80
4	Dit. Jasbar	5	5	100	100	0	100
5	Dit. SDK	19	19	100	100	0	100
6	Dit. KSG	8	8	100	100	0	100
7	BKKPN Kupang	15	15	100	100	0	100
8	BPSPL Makasar	18	18	100	100	0	100
9	BPSPL Padang	9	9	100	100	0	100
10	LPSPL Sorong	10	10	100	100	0	100
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	15	15	100	100	0	100
13	BPSPL Denpasar	7	7	100	100	0	100
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
15	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		200	163	81,50	37	14,4	81,50

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan,

Miftahul Huda

Gambar 21. Tangkapan Layar Rekapitulasi Capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Ditjen PK" Periode Triwulan III 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa target kinerja IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" di Unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen PK Triwulan III tahun 2025 sebesar 80. Tiga satker level II lingkup Ditjen PK (Setditjen PK, Direktorat KE, dan Direktorat P3K) mendapatkan capaian 80% pada Triwulan III 2025 sedangkan satker lainnya mencapai nilai 100 pada periode triwulan III 2025. Hal ini berarti bahwa tiga satker level II lingkup Ditjen PK belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, serta perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi internal satker untuk menuntaskan rekomendasi pengawasan dari Itjen sampai dengan akhir tahun 2025.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja (Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Kegiatan pendukung pencapaian target IKM 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan III tahun 2025, antara lain Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti.

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 50. Realisasi Anggaran IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.649.000	106.545.000	70,72	44.104.000
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	71.669.000	49.617.000	69,23	22.052.000
Rata-rata			69,98	

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 September 2025 terdiri dari:

- WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 70,72%.
- WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 69,23%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran sebesar 69,98%.

10. Rencana Aksi Triwulan TW IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP.

IKM 14. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 14 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat P3K merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Teknik menghitung “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit P3K yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit P3K}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target dan capaian IKM 14 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 51. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 14		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode Triwulan III tahun 2025 maupun Triwulan III tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 100%. Tidak ada capaian IKM ini pada periode Triwulan III tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Tidak ada capaian IKM ini pada periode Triwulan III tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK di Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PK (%)" pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Pencapaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" ini nantinya akan didukung komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 14 "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan Nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2025 adalah melakukan koordinasi

dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K guna menyelesaikan temuan lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 14 "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 52. Realisasi Anggaran IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.649.000	106.545.000	70,72	44.104.000
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	71.669.000	49.617.000	69,23	22.052.000
Rata-rata			69,98	

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 14 "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 September 2025 terdiri dari:

- WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 70,72%.
- WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 69,23%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran sebesar 69,98%.

10. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan IV Tahun 2025 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)**" masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". (IKM) 15 "**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)**" merupakan IKM yang muncul pada tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sebagai berikut:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip.
 - Penggunaan Arsip.
 - Pemeliharaan Arsip.
 - Penyusutan Arsip.

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 60. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 15		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW III 2024	2024	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian TW III	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW III 2025 Thd Capaian TW III Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW III 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	96,74	-	-	-	-	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode Triwulan III tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75. Sedangkan target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode Triwulan III tahun 2025 maupun Triwulan III tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada periode Triwulan III tahun 2025. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada Triwulan III tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada periode Triwulan III tahun 2025. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada Triwulan III tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PKRL" pada periode Triwulan III tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dari Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2025 antara lain adanya komitmen Pimpinan untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P3K.

b. Kendala/Permasalahan

Pada Triwulan III tahun 2025, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P3K.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (efisiensi penggunaan anggaran melalui penatausahaan kearsipan dari kegiatan lingkup Direktorat P3K dilakukan di kantor (Direktorat P3K)); 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang

memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K (BMN).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan Triwulan III tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi Penyeleggaraan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PKRL di Ruang Rapat Kawaluso GMB 3 Lantai 9 (6 Januari 2025).
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (13 Januari 2025).
3. Sosialisasi Pelatihan Kearsipan Tahun 2025 (14 Januari 2025).
4. Pemaparan Menu TTDE Lingkup PKRL (19 Januari 2025).
5. Program Kegiatan Kearsipan Tahun 2025 di R.R.Tuna Lantai 15 GMB 4 (21 Januari 2025).
6. Sosialisasi Penyusutan Arsip Dinamis melalui Usul Musnah dan Usul Serah (23 Januari 2025).
7. Sosialisasi Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2025 (24 Januari 2025).
8. Rencana Kerja Kegiatan Tim Penyelamatan dan Penataan Arsip Dinamis Lingkup Kantor Pusat KKP (19 Februari 2025).
9. Rapat Koordinasi Penyesuaian Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan(21 Februari 2025).
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (10 Maret 2025).
11. Publikasi Arsip KKP pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) lingkup DJPT dan Ditjen PKRL (12 Maret 2025).
12. Tindak Lanjut Publikasi Arsip KKP pada JIKN di lingkungan DJPKRL (14 Maret 2025).
13. Asistensi Arsip Usul Musnah DJPKRL Tahun 2025 di Ruang Rapat Ndana, DJPKRL Gedung Mina Bahari III Lantai 9 (17 Maret 2025).
14. Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana GMB II Lantai 14 (16 April 2025).
15. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025 di Ruang Rapat Tuna GMB IV Lantai 15 (30 April 2025).
16. Pemantauan Pengisian Form ASKI Pengawasan Kearsipan di Ruang Rapat Kawaluso Lt. 9 Gedung Mina Bahari 3 (28 Mei 2025).
17. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana, GMB II Lantai 14 (4 Juni 2025)
18. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (10 Juni 2025)
19. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (11 Juni 2025)
20. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (12 Juni 2025)
21. Verifikasi dokumen pengawasan kearsipan internal lingkup kantor pusat tahun 2025 (18 Juni 2025)
22. Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga di Ballroom, GMB III KKP (7 Juli 2025)
23. Rapat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III dan aplikasi zoom (15 Juli 2025)

24. Verifikasi dokumen pengawasan kearsipan internal lingkup UPT Tahap I tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1 (25-27 Agustus 2025)
25. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (21 Agustus 2025)
26. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI lingkup Ditjen PK di Ruang Rapat Cakalang, Gedung Mina Bahari III Lantai 1 (3 September 2025)
27. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom (9-11 September 2025)
28. Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Arwana, GMB II Lantai 14 (15 September 2025)
29. Pembahasan Manual Indikator Kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal pada Direktorat dan UPT Tahun 2025 pasca pengembangan organisasi DJPKRL di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (15 September 2025)
30. Pembahasan Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat dan UPT Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana (24 September 2025)

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 September 2025 sebagai berikut:

Tabel 62. Realisasi Anggaran IKM "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 September 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	143.338.000	110.260.000	76,92	33.078.000

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar 76,92%.

10. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi periode Triwulan IV Tahun 2025 antara lain: mendokumentasikan, menata, dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P3K.

3.2. PERKEMBANGAN KARBON BIRU (*BLUE CARBON*) SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Blue carbon atau karbon biru merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) sampai dengan periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 63. Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) sampai Triwulan III (Januari-September) tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Diskusi tim KI dengan IBCI terkait Karbon Biru di Ruang Direktur P4K Lantai 8 GMB 3 (21 Januari 2025)
2.	Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi dan Pentahapan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 (22 Januari 2025)
3.	Diskusi penjaringan masukan dalam rangka penyelarasan kebijakan, regulasi dan inisiatif eksisting lintas Kementerian/Lembaga terkait <i>Roadmap</i> Pelaksanaan Strategi Karbon Biru Indonesia (31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	<i>Talkshow</i> Bincang Bahari Edisi I Tahun 2025 "Pengelolaan Karbon Biru Yang Berkelanjutan Tapi Berpotensi Cuan" (6 Februari 2025)
2.	Diskusi antar Kementerian/Lembaga Tentang Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan (13 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN di Harper Malioboro Yogyakarta (6-7 Maret 2025)
2.	Rencana Pertemuan tentang Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) (11 Maret 2025)
3.	Audiensi terkait Perdagangan Karbon (11 Maret 2025)
4.	Diskusi lanjutan pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN (17-18 Maret 2025)
5.	Pembahasan Lokasi Cadangan Karbon Biru (18 Maret 2025)
6.	Narasumber Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (19 Maret 2025)
7.	Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru dan Kelembagaan NBCAP (21 Maret 2025)
Bulan April 2025	
1.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional) (11 April 2025)
2.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 di Ruang Rapat Cakalang Lantai 1 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
3.	Rapat Koordinasi Capaian Penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan <i>Blue Carbon</i> di Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Selaru Lt.8 Gedung Mina Bahari III (15 April 2025)

No.	Uraian Kegiatan
4.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 di Ruang Rapat Cakalang Lantai 1 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
5.	Percepatan Ekosistem Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Sumatera Hotel Shangri-La Jakarta (16 April 2025)
6.	Koordinasi Kerjasama <i>Enabling Blue Carbon</i> di Ruang Direktorat P3K GMB 3 Lantai 8 (21 April 2025)
7.	Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun di Hotel Oria, Jakarta (23-24 April 2025)
8.	Rapat Tingkat Menteri Pelaporan Hasil Masukan Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca di Ruang Rapat Utama, Graha Mandiri, Gd. Kemenko Bidang Pangan, Lantai 3 (25 April 2025)
9.	Pembahasan Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) dan Pembentukan Tim Teknis Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (30 April 2025)
10.	Rapat pembahasan pengusulan KBLI pengelolaan karbon biru sektor kelautan di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (30 April 2025)
Bulan Mei 2025	
1.	Rapat Konsolidasi Pengelolaan Karbon Biru di Ruang Rapat Direktur Konservasi Ekosistem Lantai 10, GMB III (5 Mei 2025)
2.	Pertemuan dengan YKAN tentang Blue Carbon (6 Mei 2025)
3.	Diskusi Percepatan Enabling Conditions Karbon Biru Menuju Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Rapat Kawaluso Lt 9 Gedung Mina Bahari III (7 Mei 2025)
4.	Audiensi Konservasi Indonesia terkait Karbon Biru di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 Gedung Mina Bahari III KKP
5.	Rapat Konsolidasi Pengelolaan Karbon Biru di Ruang Rapat Direktur Konservasi Ekosistem Lantai 10, GMB III (5 Mei 2025)
6.	Rapat Koordinasi Status Data Terumbu Karang dan Padang Lamun di RR Kawaluso Lt. 9 Gedung Mina Bahari III (8 Mei 2025)
7.	Diskusi dalam rangka Penyusunan <i>Draft Roadmap Blue Carbon</i> di Ruang Rapat Kakap Putih Lantai 6, GMB IV (16 Mei 2025)
8.	Pertemuan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (20 Mei 2025)
9.	Diskusi Hasil Studi Kelayakan Proyek Karbon di KKP3K-KDPS di Kantor DKP Provinsi Kalimantan Timur (20 Mei 2025)
10.	Pertemuan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (21 Mei 2025)
11.	Diskusi Tentang Perencanaan Belitong sebagai <i>Carbon Free Island</i> melalui Aplikasi Zoom (22 Mei 2025)
12.	Pertemuan <i>Start-up Team Proyek Enabling Blue Carbon in Indonesia</i> di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta (23 Mei 2025)
Bulan Juni 2025	
1.	Koordinasi <i>High Integrity Blue Carbon Market Project</i> di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, Gedung Minabahari III (2 Juni 2025)
2.	<i>Workshop Pengembangan Desain Capacity Building Blue Carbon Development IPB International Convention Center, Botani Square Building, Kota Bogor</i> (3 Juni 2025)
3.	Rapat Persiapan Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Lt. II Gedung Mina Bahari II (3 Juni 2025)
4.	Diskusi Perdagangan Karbon di Ruang Rapat Direktorat Jasa Bahari Lt. 2, Gedung Mina Bahari 2 (16 Juni 2025)

No.	Uraian Kegiatan
5.	Rapat penyiapan rencana tata kelola karbon biru dengan menyusun peta jalan dan rencana aksi karbon biru nasional (23 Juni 2025)
Bulan Juli 2025	
1.	Demo Day Program Blue Innovative Startup Acceleration (BISA) di Soehanna Hall, The Energy Building Lantai 2, SCBD Lot 11A (1 Juli 2025)
2.	Workshop Integrasi Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke Dalam Strategi Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Nasional di Aryaduta Hotel Menteng (2 Juli 2025)
3.	Koordinasi Penyusunan Peta Terumbu Karang dan Lamun Nasional di Hotel Mercure Sabang (3 Juli 2025)
4.	Pertemuan Start-Up Team Pembaruan Roadmap Blue Carbon di Novote Bogor Golf Resort and Convention Center (11 Juli 2025)
5.	Pemetaan Ekosistem Karbon Biru Berbasis SIG di Hotel Lombok Astoria, NTB (15-17 Juli 2025)
6.	Pertemuan Komite Pengarah (Steering Committee) Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) Wyndham Casablanca di Casablanca VII, Level B-1 (16 Juli 2025)
7.	Diskusi Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru di Morrissey Hotel Jakarta Pusat (16 Juli 2025)
8.	Diskusi Kerangka dan Mekanisme Pembiayaan Komersial dan Non Profit untuk Mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di The Hermitage Hotel Jakarta Pusat (17 Juli 2025)
9.	Validasi Publik Penyusunan Peta Terumbu Karang dan Padang Lamun Indonesia di Hotel Arya Duta Menteng Jakarta dan aplikasi zoom (22 Juli 2025)
10.	Audiensi Penjajakan Kerjasama Karbon Biru di Ruang Rapat Direktorat Jasa Bahari GMB II Lantai 2 (22 Juli 2025)
11.	Koordinasi Awal Penyusunan Status Terumbu Karang Nasional di Hotel Aone Jakarta Pusat (23 Juli 2025)
12.	Diskusi Pemanfaatan Karbon Biru Peluang Ekonomi Baru di Hotel Harper, Kota Kupang (23 Juli 2025)
13.	Pembahasan Program Carbon di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (28 Juli 2025)
14.	Penyelarasan dan Implementasi Proyek Karbon Biru di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (28 Juli 2025)
15.	Workshop Peningkatan Kapasitas Perhitungan Emisi Karbon Biru Lamun Hotel Luminor Padjadjaran, Kota Bogor (29-30 Juli 2025)
16.	Pembahasan Dokumen Mandate Agreement untuk Dukungan Teknis dan Transaction Advisory Services (TAS) dalam Pengembangan Karbon Biru melalui Aplikasi Zoom (30 Juli 2025)
Bulan Agustus 2025	
1.	Internal Workshop Penyusunan Standar Metodologi Pemantauan dan Inventarisasi Karbon Lamun di Hotel Novotel Makassar (1 Agustus 2025)
2.	Diskusi Inisiatif Kawasan Carbon Free Island melalui Aplikasi Zoom (1 Agustus 2025)
3.	Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru di Hotel Novotel Jakarta Cikini (5 Agustus 2025)
4.	Narasumber pada acara Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia terkait Penguatan Ekosistem Karbon Biru untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan di Pullman Hotel Jakarta (7 Agustus 2025)
5.	Rapat Pembahasan Muatan Karbon Biru Dalam Renstra KKP 2025-2029 di Hotel Grand Savero Kota Bogor (8 Agustus 2025)
6.	Pembahasan Dokumen Mandate Agreement untuk Dukungan Teknis dan Transaction Advisory Services (TAS) dalam Pengembangan Karbon Biru melalui Aplikasi Zoom (8 Agustus 2025)

No.	Uraian Kegiatan
7.	Pelaksanaan Proyek Karbon Biru di Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Terbuk Lantai 10, GMB III (11 Agustus 2025)
8.	Pertemuan <i>Training Measurement, Reporting, and Verification (MRV)</i> Proyek Karbon dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Karbon Biru di Indonesia untuk Proyek Indonesia <i>Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i> di Hotel The 101 Suryakencana, Bogor (14 Agustus 2025)
9.	Konsolidasi Isu Mangrove dalam Konteks <i>Enabling Blue Carbon</i> di Hotel JS Luwansa, Jakarta (15 Agustus 2025)
10.	Penyusunan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun di Mercure Sabang Jakarta (19-20 Agustus 2025)
11.	Pembahasan Dokumen Pengadaan terhadap persetujuan <i>No Objection Letter (NOL)</i> pekerjaan <i>"The Assessment of Blue Carbon as a Nature-based Solution for Climate Change Mitigation"</i> di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 GMB 3 (19 Agustus 2025)
12.	Penyusunan SK Kelompok Kerja Terumbu Karang dan Padang Lamun Nasional di Mercure Sabang Jakarta (21 Agustus 2025)
13.	FGD Validasi Data dan Informasi Dokumen Rencana Aksi (RENAKSI) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Hotel Pullman Jakarta (22 Agustus 2025)
14.	Diskusi Pemanfaatan Karbon Biru Peluang Ekonomi Baru di Hotel Lombok Astoria (22 Agustus 2025)
15.	Narasumber Sosialisasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Hotel Lombok Astoria (22 Agustus 2025)
16.	Diskusi Peta Jalan dan Kelembagaan Karbon Biru di Hotel Aone Jakarta (25 Agustus 2025)
17.	Diskusi <i>Seagrass Monitoring Kit</i> untuk Pokmaswas melalui Aplikasi Zoom (25 Agustus 2025)
18.	Pembahasan Rencana Identifikasi Lokasi Calon Proyek Karbon Biru di Hotel Aone Jakarta (26 Agustus 2025)
19.	Workshop Penguatan Jejaring Data Karbon Biru di Hotel Harper Kupang (26 Agustus 2025)
20.	Permohonan Hadir Bersama Pada Rapat Antar Kementerian Pembahasan Revisi Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pencapaian Target Kontribusi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam hal pembangunan nasional di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan (28 Agustus 2025)
Bulan September 2025	
1.	Pembahasan Draft Pokja Penyusunan Peta Jalan Karbon Biru dan Penentuan Lokasi untuk persiapan pendanaan dari mitra di Ruang Gedung Mina Bahari II Lantai 2 (1 September 2025)
2.	Pelaporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Agustus 2025 melalui Aplikasi Zoom (2 September 2025)
3.	<i>Kick-off Meeting</i> Tim Pelaksana Komite Teknis Program <i>Low Carbon Development Indonesia (LCDI)</i> di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan dan Aplikasi Zoom (8 September 2025)
4.	Rapat Koordinasi Pengembangan Proyek Karbon Biru di Mercure Cikini, Jakarta (9 September 2025)
5.	Permohonan Hadir Bersama Pada Kegiatan Konsinyering Pembahasan Revisi Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (9 September 2025)
6.	Penyusunan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun di Mercure Cikini, Jakarta (10-11 September 2025)
7.	Pertemuan Pembahasan Dukungan GGGI dan Roadmap Ekosistem Karbon Biru di THE 101 Bogor Suryakencana dan Aplikasi Zoom (12 September 2025)
8.	Pertemuan Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional

No.	Uraian Kegiatan
	dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional di Hotel Grand Melia Jakarta (16 September 2025)
9.	Diskusikan terkait tata kelola restorasi mangrove dan karbon biru melalui Aplikasi Zoom (16 September 2025)
10.	Pertemuan Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional di Hotel Gran Melia Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (16-17 September 2025)
11.	Penyusunan Draft Awal <i>Roadmap Blue Carbon</i> di Mercure Hotel Cikini (22 September 2025)
12.	Pembahasan Proses Perizinan dan Pengembangan Karbon Biru di Ruang Rapat Terubuk, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 (25 September 2025)
13.	Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pengembangan Proyek Karbon Biru di Hotel Aryaduta (26 September 2025)
14.	Pembahasan Dokumen Mandate Agreement untuk Dukungan Teknis dan <i>Transaction Advisory Services (TAS)</i> dalam Pengembangan Karbon Biru melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
15.	Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Penataan Kawasan Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah di RR. Segoro Waseso, Gedung Mina Bahari II, Lt. 15, KKP (30 September 2025)

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan Bulan September 2025)

3.3. PERKEMBANGAN OCEAN FOR PROSPERITY (LAUTRA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Bagian ini memberikan sekilas informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan “Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)”. LAUTRA akan membantu meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Melalui LAUTRA, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia termasuk terumbu karang dan ekosistem wilayah pesisir.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan LAUTRA sampai dengan periode Triwulan III (Januari-September) tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 64. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai dengan Triwulan III (Januari-September) Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (13 Januari 2025)
2.	Tindak Lanjut Rapat Pimpinan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA Ruang Rapat Ndana Lantai 9 Gedung Mina Bahari III (16 Januari 2025)
3.	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (19 Januari 2025)
4.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (22 Januari 2025)
5.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (23-24, 30-31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	Rapat finalisasi materi Lautra (khususnya terkait OMS & dana bergulir) (5 Februari 2025)
2.	Rapat Pembahasan Hasil Audit Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (6 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Rapat Pembahasan Mekanisme Pendanaan Bergulir <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4 Maret 2025)
2.	Rapat Pembahasan <i>Ocean Monitoring System (OMS)</i> Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4, 19-20 Maret 2025)
3.	Rapat pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (6 Maret 2025)
4.	Rapat Restrukturisasi Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (10 Maret 2025)
Bulan April 2025	
1.	Pembahasan paparan terkait LAUTRA di Ruangan meeting DIRJEN PKRL - GMB III lantai 11 (14 April 2025)
2.	Pendampingan kegiatan MKP terkait Pembahasan terkait LAUTRA (14 April 2025)
3.	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit Pertanggungjawaban LAUTRA TA 2024 pada Satker DJPKRL di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
4.	Rapat Pembahasan Team Garam dan LAUTRA terkait Pembentukan SK Team Garam dan Team Lautra di Ruangan meeting DIRJEN PKRL - GMB III lantai 11 (15 April 2025)
5.	Rapat Pembahasan LAUTRA Komponen 2 di RR. Ditjen Pengelolaan Kelautan Lt. 11 GMB 3 (21 April 2025)
6.	Rapat Pembahasan LAUTRA Komponen 2 di RR. Ditjen Pengelolaan Kelautan Lt. 11 GMB 3 (22 April 2025)

No.	Uraian Kegiatan
7.	Pertemuan Persiapan Kegiatan OMS <i>Oceans for Prosperity Project</i> -LAUTRA di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (28 April 2025)
8.	Rapat Pembahasan Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program Infrastruktur Terumbu Karang Lautan Sejahtera (Insan Terang-Lautra): Perluasan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi di Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Lt.2, Gedung Mina Bahari II dan Aplikasi Zoom (29 April 2025)
Bulan Mei 2025	
1.	Pertemuan Penyusunan Naskah Option Paper dan Explanatory Note Komponen 1.1 OMS Proyek Oceans for Prosperity – Lautra melalui Aplikasi Zoom (2 Mei 2025)
2.	Pembahasan Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program Infrastruktur Terumbu Karang Lautan Sejahtera (Insan Terang-Lautra): Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Lt. II Gedung Mina Bahari II (8 Mei 2025)
3.	Rapat Koordinasi Proyek LAUTRA Tahun Anggaran 2025 pasca ditandatanganinya Risalah Persetujuan Pelaksanaan Proyek di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (9 Mei 2025)
4.	Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pelaksanaan Proyek Oceans for Prosperity – Lautra Tahun Anggaran 2025 di Aviary Hotel Bintaro dan Aplikasi Zoom (16 Mei 2025)
5.	Permohonan Pemaparan Kronologis Pinjaman LAUTRA (9498-ID) di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB 3 (19 Mei 2025)
6.	<i>Request for Meeting on</i> LAUTRA – KKP (21 Mei 2025)
7.	Finalisasi Rancangan Pengelolaan Anggaran Proyek LAUTRA Pasca Persetujuan di Grand Mercure Harmoni (21-22 Mei 2025)
8.	Pertemuan Persiapan <i>Implementation Support Mission</i> Proyek LAUTRA di Grand Mercure Harmoni, Jakarta (27-28 Mei 2025)
Bulan Juni 2025	
1.	Pembahasan Restrukturisasi Proyek LAUTRA di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (2 Juni 2025)
2.	Pertemuan <i>Implementation Support Mission</i> Proyek LAUTRA di Thamrin Room Lantai 3 Mandarin Oriental Hotel (3-4 Juni 2025)
3.	Koordinasi Pengamanan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Safeguard</i>) <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 dan Aplikasi Zoom (5 Juni 2025)
4.	Pembahasan usulan Program Prioritas Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) Ruang Rapat Lantai 11, GMB III (5 Juni 2025)
5.	Pembahasan <i>Term of Reference</i> dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa LAUTRA
6.	Rapat Persiapan Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra Tahun 2026 di Hotel Aviary Bintaro (25 Juni 2025)
7.	Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra 2026 di Hotel Aviary Bintaro (25-26 Juni 2025)
8.	Rapat dengan PPK dan penanggung jawab tiap komponen LAUTRA di Hotel Aviary Bintaro (25 Juni 2025)
9.	Sosialisasi Petunjuk Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Oceans for Prosperity Project – LAUTRA di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025)
Bulan Juli 2025	
1.	Penyusunan dan Reviu Dokumen Anggaran <i>Ocean for Prosperity Project</i> (LAUTRA) Pagu Indikatif Tahun 2026 di Hotel Aone Jakarta (16 Juli 2025)
2.	Potensi Dukungan untuk Program LAUTRA di Aloft Hotel Jakarta (16 Juli 2025)
3.	Rapat Koordinasi Rencana Kerjasama Riset Komunikasi, Penyusunan Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Media untuk Program LAUTRA di Ruang Rapat Perpustakaan GMB IV Lantai 2 (17 Juli 2025)

No.	Uraian Kegiatan
4.	Pembahasan <i>Progress Ocean for Prosperity Project</i> – LAUTRA Komponen 2 di Hotel Platinum Jimbaran (18 Juli 2025)
5.	Pertemuan Teknis Restrukturisasi PHLN LAUTRA di Ruang Rapat Padaido GMB III, Lantai 11 (22 Juli 2025)
6.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 LAUTRA di Hotel Herper Kota Kupang (22-23 Juli 2025)
7.	Penyelarasan dan Percepatan Proyek LAUTRA Komponen 1 Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di Hotel Herper Kota Kupang (22-23 Juli 2025)
8.	<i>Steering Committee Meeting</i> Proyek <i>Oceans for Prosperity</i> – LAUTRA di Ruang Rapat SS 1-2, Lt 2 Gedung 2A Bappenas (25 Juli 2025)
9.	Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Proyek LAUTRA Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (25 Juli 2025)
10.	Rapat Pimpinan Progres Pelaksanaan Proyek <i>Oceans For Prosperity</i> – Lautra Tahun Anggaran 2025 di HR Building Lantai G2, Jakarta (29 Juli 2025)
11.	Workshop Pengadaan Barang/Jasa Proyek LAUTRA di Kantor Proyek LAUTRA, Menteng, Jakarta Pusat dan Aplikasi Zoom
Bulan Agustus 2025	
1.	Tindak Lanjut Penyiapan Dokumen Lelang LAUTRA di HR Building Lantai 1, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta (20 Agustus 2025)
2.	Audiensi Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Riset Komunikasi Program <i>Oceans for Prosperity Project</i> (LAUTRA) di Ruang Rapat GMB II lantai 17 dan Aplikasi Zoom (25 Agustus 2025)
3.	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Nota Penjelasan Restrukturisasi Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (26 Agustus 2025)
4.	Workshop Ocean Monitoring System (OMS) LAUTRA Kantor LAUTRA di Gedung HR, Menteng, Kota Jakarta Pusat (27 Agustus 2025)
5.	Finalisasi Nota Penjelasan Restrukturisasi Proyek LAUTRA di Hotel Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (28 Agustus 2025)
6.	Audiensi Lautra dengan Bank Dunia melalui Aplikasi Zoom (29 Agustus 2025)
7.	Pembahasan Perkembangan Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (29 Agustus 2025)
Bulan September 2025	
1.	Reviu RKAKL LAUTRA TA 2025 di Kantor LAUTRA, Lantai G1, Jakarta Pusat dan Aplikasi Zoom (8 September 2025)
2.	Rapat Evaluasi Progress LAUTRA melalui zoom meeting (8 September 2025)
3.	Implementasi Proyek LAUTRA dengan Bank Dunia Kayu di Room Lantai 1, Swiss-Belhotel Airport Jakarta (10 September 2025)
4.	Pertemuan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA TA. 2025 Episode Hotel Gading Serpong, Tangerang (17 September 2025)
5.	Pertemuan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA TA. 2025 Episode Hotel Gading Serpong (18 September 2025)
6.	Pertemuan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA TA. 2025 Episode Hotel Gading Serpong (19 September 2025)
7.	OMS Benchmarking Workshop – LAUTRA di Kantor World Bank Indonesia, IDX Tower 2 Lantai 12 dan Aplikasi Zoom (23 September 2025)
8.	Monitoring dan Evaluasi Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
9.	Pembahasan Konsolidasi Procurement PHLN LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
10.	Diskusi dan Berbagi Informasi Kegiatan LAUTRA (Lautan Sejahtera) di Ruang Rapat Selaru Lt. 8 GMB 3 (29 September 2025)

Sumber: Direktorat P4K (Sampai dengan Bulan September 2025)

Perkembangan kegiatan LAUTRA Direktorat P3K hingga akhir September 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) *Blue Carbon Assessment* dalam proses penyampaian perbaikan hasil revidi dan diperkirakan tender akan diumumkan pada 23 September 2025. Pelaksanaan pembayaran kegiatan jasa konsultan direncanakan dengan menggunakan 3 termin (40%,40%,20%) sesuai dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.920/MEN-KP/IX/2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Rencana pengadaan alat pengolahan data yang direncanakan akan diberikan kepada Wilker UPT Ditjen PK, antara lain berupa *drone multi spectral; drone lidar; under water eddy covariance and GHG flux instrument*; dan *logger* diharapkan dapat dikoordinasikan dengan PIC Lautra lainnya dan Sesditjen PK selaku Kuasa Pengguna Barang Ditjen PK sehingga peralatan yang akan diberikan dapat efektif dan efisien.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas direncanakan berupa pelatihan penggunaan alat pengukuran dan pelatihan terkait lainnya. Pelatihan akan diberikan kepada personil wilker/pengelola kawasan sebagai tindak lanjut pengadaan barang.
4. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem karbon biru, terutama rehabilitasi mangrove, perlu untuk berkoordinasi dengan PMO dan *World Bank* dengan menyampaikan TOR terkait. Hal ini mengingat kegiatan dimaksud belum masuk dalam *Project Development Objective (PDO)* meskipun telah masuk dalam *Project Appraisal Document (PAD)*.

3.4. PERKEMBANGAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN DUKUNGAN PENYIAPAN LAHAN GARAM TAHUN 2025

Garam merupakan salah satu bahan sederhana yang lazim ditemukan di dapur rumah tangga, sesungguhnya merupakan komoditas strategis bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia.

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan intensitas matahari tinggi sepanjang tahun, seharusnya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung garam dunia. Namun ironi terjadi, selama bertahun-tahun, negeri maritim ini justru mengimpor ratusan ribu ton garam setiap tahunnya terutama bagi sektor industri. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menargetkan swasembada garam.

Pada tahun 2024, produksi garam nasional mencapai sekitar 2,04 juta ton garam, melampaui target 2 juta ton. Sementara itu, produksi garam konsumsi pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 2,25 juta ton, dengan stok cadangan 836 ribu ton. Jumlah ini diperkirakan mampu memenuhi sekitar 63% dari total kebutuhan nasional.

Kebutuhan nasional garam diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5 juta ton, dengan lebih dari 3 juta ton digunakan oleh sektor industri. Industri pangan, farmasi, dan *Chlor Alkali Plant (CAP)* merupakan pengguna utama garam berkualitas tinggi. Garam yang diproduksi dalam negeri harus memenuhi standar SNI 8207:2016, yakni memiliki kadar *Natrium Klorida (NaCl)* di atas 97% dan kadar air maksimal 0,5 persen. Saat ini, kualitas dan kuantitas produksi domestik masih terbatas, sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri dan menyebabkan ketergantungan terhadap impor.

Ketimpangan antara kapasitas produksi nasional dan kebutuhan industri menjadi faktor utama yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap impor garam. Meskipun produksi garam nasional menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, kesenjangan (*gap*) antara pasokan dan permintaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan target swasembada garam pada tahun 2027 melalui sejumlah kebijakan dan strategi penguatan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya transformasi industri garam sebagai penopang ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional serta upaya pemerintah mengurangi ketergantungan negara pada garam impor, dimana Indonesia menargetkan swasembada garam pada tahun 2027 (bunyi Pasal 2 Ayat 1 Perpres 17/2025). Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tersebut sekaligus mencabut Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang kebijakan serupa. Swasembada garam sendiri berarti kemampuan suatu negara memenuhi seluruh kebutuhan garam dari produksi dalam negeri. Swasembada garam bukan sekadar ambisi retorik, tetapi menjadi keharusan untuk memperkuat kedaulatan pangan, industri, dan ekonomi nasional.

Swasembada garam akan dapat dicapai melalui keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan garam nasional yang terus meningkat. Dalam rangka pencapaian target swasembada garam tersebut, maka perlu adanya strategi optimasi usaha pergaraman dari hulu ke hilir mulai dari tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran. Untuk mewujudkan pengelolaan pergaraman dari hulu ke hilir dan terbatasnya waktu untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027 perlu dibangun suatu kawasan industri sebagai sentra garam nasional. KKP akan melaksanakan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao sebagai *modelling* ekstensifikasi lahan garam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono melakukan *kick-off* pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa

Tenggara Timur pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Pasca kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahtu Trenggono dalam rangka *Kick Off* Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao yang mulai dikerjakan tahun ini, Pemkab Rote Ndao menggelar Sosialisasi Percepatan Penyiapan Lahan K-SIGN yang digelar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 di Desa Daiama Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam proses penyiapan lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025 bersama masyarakat pemilik lahan.

Pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026, yang ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2025.

Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan. Proses penyiapan lahan akan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.

Berdasarkan target lahan dari pemerintah pusat, lahan yang dibutuhkan sekitar 13.000 hektare lebih yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dikerjakan 1.000 hektare lebih, tahap kedua 9.000 hektare, dan tahap ketiga 4.000 hektare lebih.

Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam nasional. Rote Ndao dipilih sebagai kawasan sentra industri garam nasional karena lokasi tersebut memiliki iklim yang mendukung untuk produksi garam dimana jumlah bulan panasnya bisa mencapai 6-8 bulan per tahun, selain itu, lokasi tersebut mempunyai potensi geografis yang sesuai karena memiliki topografi relatif datar, tanah yang tidak porus dan tersedia dalam hamparan yang luas. Rote Ndao juga memiliki kualitas air yang baik sebagai sumber air baku garam. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2025 meliputi:

- a. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao (pembuatan kolam lahan tambak garam, pembuatan meja garam/meja kristalisasi, saluran air tua, pekerjaan instalasi pompa dan utilitas, pekerjaan pemasangan pelapis geomembran dan struktur petak, jalan inspeksi lime stone), jalan sekunder asfalt mix. dan pekerjaan jalan utama asfalt).
- b. Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao (kantor pengelola, dan gudang garam).

Program K-SIGN diperkirakan menyerap sekitar 13.000 hingga 26.000 pekerja langsung dan 15.000 hingga 20.000 pekerja tidak langsung, dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta menghidupkan usaha turunan lainnya. Program K-SIGN ini akan berdampak kepada pembukaan lowongan pekerjaan untuk para pekerja baik pekerja langsung maupun pekerja tidak langsung seperti pada sektor logistik, perdagangan, dan jasa.

Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkaitan dengan pergaraman pada tahun 2025 adalah dukungan penyiapan lahan. Besaran anggaran untuk dukungan penyiapan lahan garam pada tahun 2025 sebesar Rp 6.024.750.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan Bulan September 2025 sebesar Rp 1.496.354.966 atau 24,84% dari besaran anggaran, sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp 4.528.395.034.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pergaraman sampai dengan Bulan Agustus 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 65. Perkembangan Kegiatan Terkait Pergaraman Sampai Dengan Bulan September 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan April	
1.	Rapat Koordinasi Hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Kawaluso, GMB III Lantai 9 (24 April 2025)
Bulan Mei	
1.	Rapat Pembahasan Tim Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (15 Mei 2025)
2.	Rapat Pembahasan Tim Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (19 Mei 2025)
3.	Rapat Pembahasan Dukungan Pemda dalam Program Modeling Tambak Garam di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Mina Bahari 2 dan Aplikasi Zoom (23 Mei 2025)
4.	Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Modeling Produksi Garam Tahun 2025 – 2026 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Lt.2, Gedung Mina Bahari II (27 Mei 2025)
Bulan Juni	
1.	Konferensi Pers Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Media Center KKP, GMB 4 Lt.1 (11 Juni 2025)
2.	Rapat Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Mina Bahari II (12 Juni 2025)
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Garam di Ruang Rapat DJPK, GMB III Lantai 11 (15 Juni 2025)
4.	Undangan Rapat Konfirmasi Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) KKP Tahun 2025 dalam rangka Swasembada Pangan dan Garam Nasional (23 Juni 2025)
5.	Rakor Tim Garam di Ruang Rapat Padaido GMB III lantai 11 (26 Juni 2025)
Bulan Juli	
1.	Perbaikan Usulan ABT Garam ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (3 Juli 2025)
2.	Klarifikasi pengusulan Pulau-pulau Kecil dan Gugus Pulau-pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam RPP RTRWN dan Klarifikasi peta potensi lahan garam dan strategi spasial hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Staf Khusus Lantai 6 GMB I (7 Juli 2025)
3.	Pembahasan ABT Garam Tahun 2025 di Ruang Rapat Itjen Lantai 3 GMB III (9 Juli 2025)
4.	Rapat Evaluasi Progress Swasembada Garam di Ruang Rapat Padaido, GMB III Lt. 11 (10 Juli 2025)
5.	Pembahasan Pelaksanaan Program Kegiatan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido (DJPK) GMB 3 Lantai 11 (14 Juli 2025)
6.	Rapat Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Produksi Garam mealui Aplikasi Zoom (20 Juli 2025)
7.	Pembahasan Swasembada Garam dengan OPD di Hotel Harper, Kota Kupang (22 Juli 2025)
8.	Pemaparan dan Diskusi terkait Pembangunan Pergaraman Nasional Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (28 Juli 2025)
Bulan Agustus	
1.	Sosialisasi Progress Program Swasembada Garam di Media Gathering KKP (1 Agustus 2025)
2.	Rapat Pembahasan Penyusunan Video Project History Pembangunan Swasembada Garam di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (14-15 Agustus 2025)
3.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao di Ruang Rapat Padaido GMB III Lt. 11 (20 Agustus 2025)
4.	Agenda : Pembahasan Persiapan paparan WamenKP; Progress Garam, Progress RENSTRA & Perencanaan 2026 di Ruang Kerja Dirjen PK GMB III Lt. 11 (21 Agustus 2025)

No.	Uraian Kegiatan
5.	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk Mendukung Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III lantai 11 (24-25 Agustus 2025)
6.	Penandatanganan BAST Konsolidasi Penyiapan Lahan Garam di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (27 Agustus 2025)
7.	Pembahasan FS Swasembada Garam dan Evaluasi Kegiatan Swasembada Garam melalui Aplikasi Zoom (29 Agustus 2025)
8.	Rapat Konsolidasi Penyiapan Lahan Garam di Kabupaten Rote Ndao bertempat di Aviary Hotel Bintaro (31 Agustus 2025)
Bulan September 2025	
1.	Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari III Lt 15 (2 September 2025)
2.	Rapat Koordinasi Usulan PSN Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido GMB III lantai 11 (2 September 2025)
3.	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pergaraman di Aviary Hotel Bintaro dan Aplikasi Zoom (2 September 2025)
4.	Pembahasan Panen Raya Garam bersama Dirut PT. Garam melalui Zoom Meeting (2 September 2025)
5.	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pergaraman di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (3 September 2025)
6.	Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan K-SIGN Kab. Rote Ndao sesuai ketentuan yang berlaku di Ruang Kerja Inspektur I (4 September 2025)
7.	Rapat Penyiapan Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao di Balai KIPM Denpasar (11 September 2025)
8.	<i>Entry Meeting</i> Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan Kawasan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, Peningkatan Infrastruktur untuk Budidaya Udang (IISAP), serta Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahun 2025 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali (12 September 2025)
9.	Sosialisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pembayaran LS Kontraktual dan Non Kontraktual ABT Garam TA.2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat (16 September 2025)
10.	Rekonsiliasi Lanjutan Data Keuangan dan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Anggaran ABT Garam 2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat (17 September 2025)
11.	Penandatanganan Kontrak AMDAL Garam Rote Ndao di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (18 September 2025)
12.	Persiapan Pengadaan Lahan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Bupati Rote Ndao (19 September 2025)
13.	Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Swasembada Garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan di Dalam Negeri di Maluku Room, Aryaduta Hotel Menteng (23 September 2025)
14.	Pembahasan Perencanaan untuk Perizinan K-SIGN di Aone Hotel Jakarta (24 September 2025)
15.	Diskusi atas Program Pergaraman Nasional pada Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (24 September 2025)
16.	Audiensi Pengadaan Tanah dan/atau Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Modeling Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tambak Garam di Ruang Rapat Lantai 2 Direktur Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Belakang Sarinah) (24 September 2025)
17.	Rapat Rancangan Dokumen Perizinan KSIGN melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)

No.	Uraian Kegiatan
18.	Ekspose Proses Pengadaan Lahan K-SIGN oleh Kepala Kanwil BPN/ATR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (30 September 2025)
19.	Pembahasan Percepatan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Itjen Lt.2 GMB III (30 September 2025)

Sumber: Direktorat P3K (2025)

Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung penyiapan lahan garam sampai dengan akhir Bulan Agustus 2025, antara lain:

1. Telah dilaksanakan survei untuk administrasi pemetaan BPN seluas 13.868 Ha.
2. Telah dilaksanakan sosialisasi Tahap I di 5 Desa.
3. Telah dilaksanakan proses DIP4T Tahap I seluas 1.693,49 Ha.
4. Telah dilaksanakan serah terima BAST konsolidasi lahan Tahap I.
5. Telah dilaksanakan sosialisasi Tahap II di 8 Desa, dan proses persiapan 1 Desa lagi.
6. Proses pelaksanaan pemetaan lahan K-SIGN oleh pihak ketiga.

Perkembangan (*progress*) fisik dukungan penyiapan lahan garam sekitar 30% berupa sosialisasi, survei dan pemetaan lahan garam di Pulau Rote.

Kendala dalam kegiatan dukungan penyiapan lahan garam yaitu KKPR dan pelepasan PIPPIB menunggu proses PSN selesai.

Rencana kegiatan dukungan penyiapan lahan garam pada periode ttriwulan IV tahun 2025, antara lain:

1. Pelasanaan sosialisasi Desa Renalai.
2. DIP4T Lokasi Tahap 2.
3. Penyelesaian Proses Perizinan.
4. Proses Pengadaan Tanah.

Beberapa *slide* paparan berkaitan dengan Lokasi Tambak Garam Industri di Pulau Rote Provinsi NTT Tahun 2025 sebagai berikut:



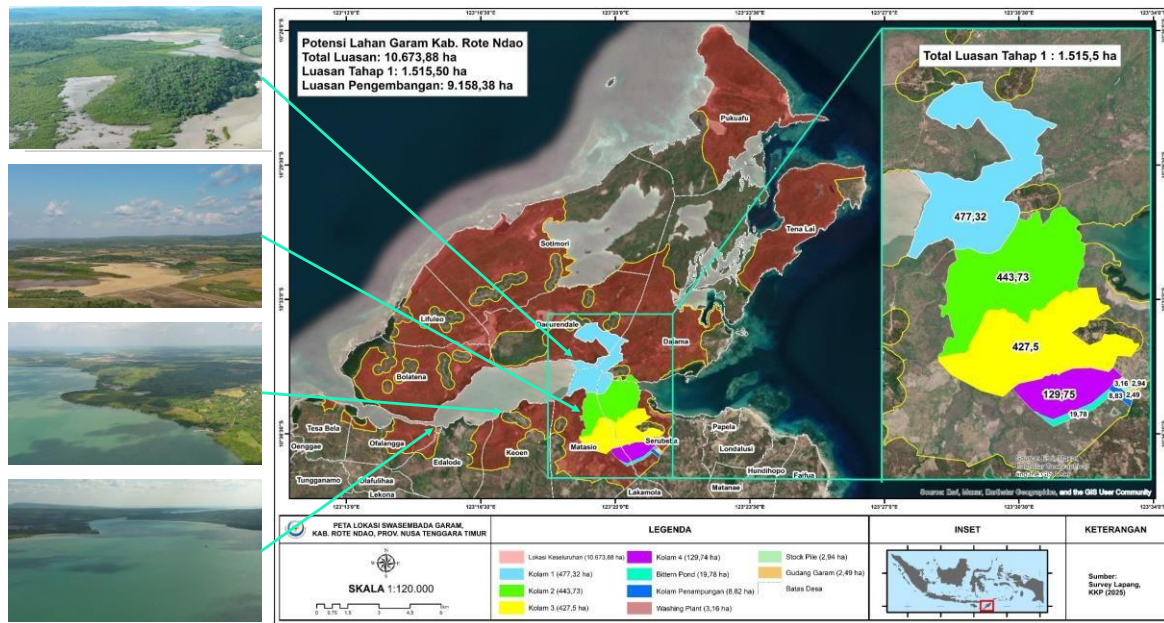


H6sil Survey Renc6n6 Lok6si T6mb6k G6r6m Industri di Pul6u Rote, Nus6 Tengg6r6 Timur

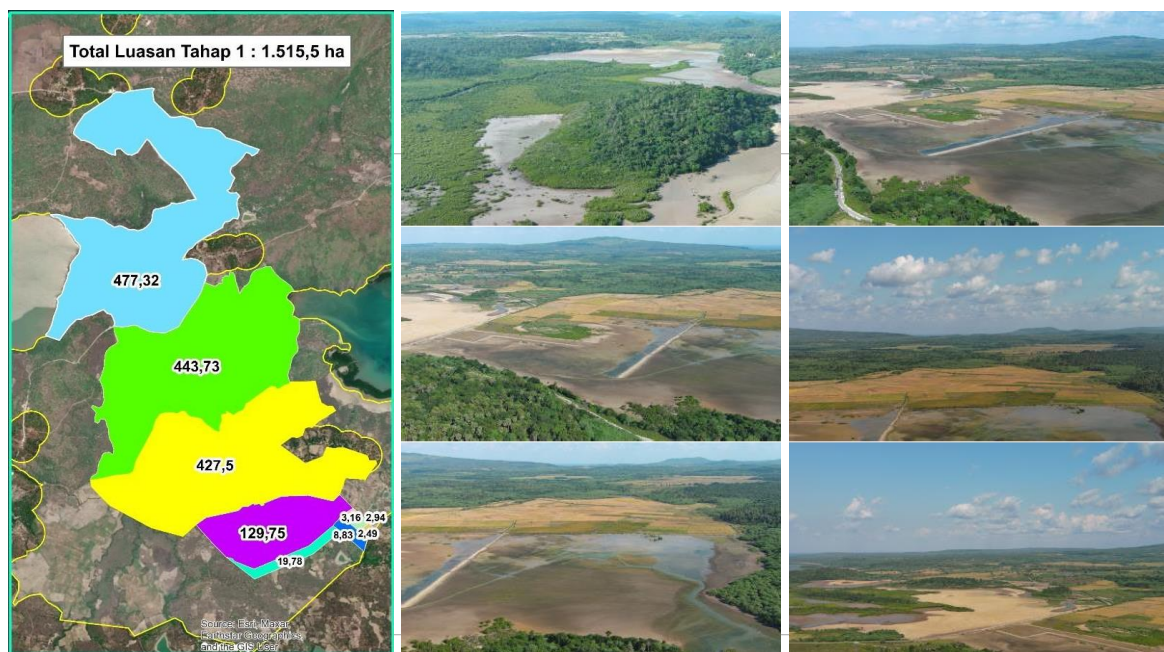
17 Mei 2025





Sumber: KKP



Gambar 22. Hasil Survey Rencana Lokasi Tambak Garam Industri di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur

Sedangkan rencana *modelling* ekstensifikasi tambak garam di Sabu Raijua dan Teluk Kupang sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 23. Rencana *Modelling* Ekstensifikasi Tambak Garam di Sabu Raijua dan Teluk Kupang
 Sumber: Bahan Paparan Wamen KKP tentang Peluang Investasi dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan : Peningkatan Populasi Penduduk Dunia Berdampak Pada Kebutuhan Pangan. Tahun 2025

3.5. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT P3K PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025

A. Realisasi Anggaran Per Tanggal 30 September 2025

Realisasi anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) per tanggal 30 September 2025 berdasarkan data Web SAKTI sebesar Rp 6.905.831.945,- atau 16,77% dari total pagu sebesar Rp 41.177.266.000,- dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025												
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;												
Periode September 2025												
Kementerian :			032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Unit Organisasi			07	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT								
Satuan Kerja :			622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT								
Uraian					Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN	
							Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					41.177.266.000	0	4.094.698.352	2.811.133.593	6.905.831.945	16,77 %	34.271.434.055	
	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Peraliran			10.190.000.000	0	397.729.219	449.884.650	847.613.869	8,23 %	9.342.386.131	
	REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			10.190.000.000	0	397.729.219	449.884.650	847.613.869	8,23 %	9.342.386.131	
	REA.004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA			10.190.000.000	0	397.729.219	449.884.650	847.613.869	8,23 %	9.342.386.131	
	051	Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera			10.190.000.000	0	397.729.219	449.884.650	847.613.869	8,32 %	9.342.386.131	
	051.EA	Penyusunan NSPK Karbon Biru			565.000.000	0	179.771.499	9.375.000	189.146.499	33,48 %	375.853.501	
	051.EB	Penilaian Karbon Biru			2.900.000.000	0	0	0	0	0,00 %	2.900.000.000	
	051.EC	Pengembangan Database dan sistem informasi			774.900.000	0	3.000.000	234.526.650	237.526.650	30,65 %	537.373.350	
	051.ED	Peningkatan kapasitas pengelolaan ekosistem karbon biru			1.539.600.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0,19 %	1.536.600.000	
	051.EE	Kampanye karbon biru			1.540.500.000	0	161.073.720	96.151.200	257.224.920	16,70 %	1.283.275.080	
	051.EF	Pengurangan emisi GRK dari sampah			375.000.000	0	50.884.000	0	50.884.000	13,57 %	324.116.000	
	051.EG	Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru			2.495.000.000	0	0	109.831.800	109.831.800	4,40 %	2.385.168.200	

FD.4346			Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			929.302.000	0	675.385.707	35.178.995	710.564.702	76,46 %	218.737.298			
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			22.900.000	0	16.600.000	0	16.600.000	72,49 %	6.300.000			
		PFA.001		Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			22.900.000	0	16.600.000	0	16.600.000	72,49 %	6.300.000		
				051	NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya			22.900.000	0	16.600.000	0	16.600.000	72,49 %	6.300.000	
					051.0A	Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			11.700.000	0	11.700.000	0	11.700.000	100,00 %	0
					051.0B	Penyusunan NSPK IGT Terumbu Karang			5.600.000	0	3.500.000	0	3.500.000	62,50 %	2.100.000
					051.0C	Penyusunan NSPK IGT Penanggulangan Pencemaran di WP3K			5.600.000	0	1.400.000	0	1.400.000	25,00 %	4.200.000
					051.0D	NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			0	0	0	0	0	0,00 %	0
					051.0E	NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			0	0	0	0	0	0,00 %	0
		QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			298.936.000	0	216.501.298	5.933.199	222.434.497	74,41 %	76.501.503		
		QDD.001			Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran			94.205.000	0	92.241.175	0	92.241.175	97,92 %	1.963.825	
					051	Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			94.205.000	0	92.241.175	0	92.241.175	97,92 %	1.963.825
					051.0A	Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			94.205.000	0	92.241.175	0	92.241.175	97,92 %	1.963.825
		QDD.002			Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana			204.731.000	0	124.260.123	5.933.199	130.193.322	63,59 %	74.537.678	
					051	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana			134.491.000	0	86.249.429	0	86.249.429	64,13 %	48.241.571
					051.0A	Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim			11.797.000	0	10.206.625	0	10.206.625	86,52 %	1.590.375
					051.0B	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan MBAPI			122.694.000	0	76.042.804	0	76.042.804	61,98 %	46.651.196
					052	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)			70.240.000	0	38.010.694	5.933.199	43.943.893	62,56 %	26.296.107
					052.0A	Sekolah Pantai Indonesia			70.240.000	0	38.010.694	5.933.199	43.943.893	62,56 %	26.296.107
		QEH		Bantuan Kelompok Masyarakat			344.319.000	0	265.040.208	11.866.398	276.906.606	80,42 %	67.412.394		
		QEH.003			Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih			344.319.000	0	265.040.208	11.866.398	276.906.606	80,42 %	67.412.394	
					051	Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan			344.319.000	0	265.040.208	11.866.398	276.906.606	80,42 %	67.412.394
					051.0A	Desa Pesisir Bersih			344.319.000	0	265.040.208	11.866.398	276.906.606	80,42 %	67.412.394
					051.0B	Koordinasi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Desa Pesisir Bersih			0	0	0	0	0	0,00 %	0
		REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			263.147.000	0	177.244.201	17.379.398	194.623.599	73,96 %	68.523.401		
		REA.001			Kawasan mangrove yang direhabilitasi			263.147.000	0	177.244.201	17.379.398	194.623.599	73,96 %	68.523.401	

			051	Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	263.147.000	0	177.244.201	17.379.398	194.623.599	73,96 %	68.523.401
			051.0A	Rehabilitasi Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	263.147.000	0	177.244.201	17.379.398	194.623.599	73,96 %	68.523.401
		HB.2363		Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	17.124.750.000	0	480.298.386	1.016.056.580	1.496.354.966	8,74 %	4.528.395.034
		RAI		Sarana Pengembangan Kawasan	17.124.750.000	0	480.298.386	1.016.056.580	1.496.354.966	8,74 %	4.528.395.034
		RAI.002		Lahan Garam Yang Direvitalisasi	17.124.750.000	0	480.298.386	1.016.056.580	1.496.354.966	8,74 %	4.528.395.034
			051	Dukungan Pengembangan Sarana Usaha Pergaraman	6.024.750.000	0	480.298.386	1.016.056.580	1.496.354.966	24,84 %	4.528.395.034
			051.0C	Dukungan Penyiapan Lahan	6.024.750.000	0	480.298.386	1.016.056.580	1.496.354.966	24,84 %	4.528.395.034
			052	Pengembangan Sentra Produksi Garam	11.100.000.000	0	0	0	0	0,00 %	726.075.000.000
			052.0A	Ekstensifikasi	11.100.000.000	0	0	0	0	0,00 %	634.675.000.000
		HB.2365		Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.732.567.000	0	1.277.136.655	1.115.916.424	2.393.053.079	22,30 %	8.339.513.921
		PBW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	4.374.706.000	0	982.272.663	817.708.015	1.799.980.678	41,15 %	2.574.725.322
		PBW.001		Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3.438.916.000	0	698.095.190	560.531.806	1.258.626.996	36,60 %	2.180.289.004
			051	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (PNBP)	3.204.400.000	0	546.282.584	548.665.408	1.094.947.992	34,17 %	2.109.452.008
			051.0A	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	646.900.000	0	57.824.500	290.441.545	348.266.045	53,84 %	298.633.955
			051.0B	Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PNBP)	2.120.800.000	0	442.619.393	128.365.098	570.984.491	26,92 %	1.549.815.509
			051.0C	Pengumpulan data pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pelaku usaha (Pulbaket dengan Ditjen PSDKP) (PNBP)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			051.0D	Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PNBP)	436.700.000	0	45.838.691	129.858.765	175.697.456	40,23 %	261.002.544
			051.0E	Konfrensi /Pegelolaan Pulau-Pulau Kecil (PNBP)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			051.0F	Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			052	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun	234.516.000	0	151.812.606	11.866.398	163.679.004	69,79 %	70.836.996
			052.0A	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	234.516.000	0	151.812.606	11.866.398	163.679.004	69,79 %	70.836.996
		PBW.002		Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	935.790.000	0	284.177.473	257.176.209	541.353.682	57,85 %	394.436.318
			051	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	765.283.000	0	175.168.400	245.730.010	420.898.410	55,00 %	344.384.590
			051.0A	Fasilitasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	765.283.000	0	175.168.400	245.730.010	420.898.410	55,00 %	344.384.590
			051.0B	Efisiensi Inpres 1 2025 (PNBP)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			052	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun	170.507.000	0	109.009.073	11.446.199	120.455.272	70,65 %	50.051.728
			052.0A	Fasilitasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	170.507.000	0	109.009.073	11.446.199	120.455.272	70,65 %	50.051.728

		PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	283.115.000	0	20.400.200	89.411.600	109.811.800	38,79 %	173.303.200
		PFA.001		Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.613.000	0	2.612.700	0	2.612.700	99,99 %	300
			052	NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disusun dokumennya	2.613.000	0	2.612.700	0	2.612.700	99,99 %	300
			052.0A	Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.613.000	0	2.612.700	0	2.612.700	99,99 %	300
		PFA.002		Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	280.502.000	0	17.787.500	89.411.600	107.199.100	38,22 %	173.302.900
			051	NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	280.502.000	0	17.787.500	89.411.600	107.199.100	38,22 %	173.302.900
			051.0A	Penyusunan NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19.788.000	0	17.787.500	0	17.787.500	89,89 %	2.000.500
			051.0B	Harmonisasi dan Sosialisasi NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	260.714.000	0	0	89.411.600	89.411.600	34,29 %	171.302.400
		QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	474.746.000	0	86.107.257	111.424.100	197.531.357	41,61 %	277.214.643
		QDD.001		Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	474.746.000	0	86.107.257	111.424.100	197.531.357	41,61 %	277.214.643
			051	Fasilitasi penetapan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat	2.746.000	0	2.746.000	0	2.746.000	100,00 %	0
			051.0A	Identifikasi dan pemetaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengakuan dan perlindungan	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			051.0B	Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			051.0C	Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup)	2.746.000	0	2.746.000	0	2.746.000	100,00 %	0
			051.0D	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Teknis Kegiatan MHA	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			052	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	472.000.000	0	83.361.257	111.424.100	194.785.357	41,27 %	277.214.643
			052.0A	Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	109.525.000	0	40.297.157	32.010.000	72.307.157	66,02 %	37.217.843
			052.0B	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat	154.361.000	0	25.564.560	0	25.564.560	16,56 %	128.796.440
			052.0C	Penyusunan Modul Inventarisasi	68.114.000	0	17.499.540	14.464.100	31.963.640	46,93 %	36.150.360
			052.0D	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Masyarakat Hukum Adat	140.000.000	0	0	64.950.000	64.950.000	46,39 %	75.050.000
		QDD.003		Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			051	Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			051.0A	Identifikasi, Pemetaan, dan Pendampingan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Masyarakat Lokal (PNBP)	0	0	0	0	0	0,00 %	0

				051.0B	Sosialisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Lokal (PNBP)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
				051.0C	Bimtek Fasilitas PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			QEG	Bantuan Peralatan / Sarana		5.500.000.000	0	188.356.535	97.372.709	285.729.244	5,20 %	5.214.270.756
			QEG.001	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar		5.500.000.000	0	188.356.535	97.372.709	285.729.244	5,20 %	5.214.270.756
			051	Bantuan sarana di pulau-pulau kecil/terluar		5.500.000.000	0	188.356.535	97.372.709	285.729.244	5,20 %	5.214.270.756
				051.0A	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.500.000.000	0	188.356.535	97.372.709	285.729.244	5,20 %	5.214.270.756
				051.0B	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PNBP)	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			QMA	Data dan Informasi Publik		0	0	0	0	0	0,00 %	0
			QMA.001	Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		0	0	0	0	0	0,00 %	0
			051	Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang didata potensinya		0	0	0	0	0	0,00 %	0
				051.0A	Pengumpulan data Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	0	0	0	0,00 %	0
				051.0B	Penyusunan Buku Ensiklopedia	0	0	0	0	0	0,00 %	0
				051.0C	IGT Pulau-Pulau Kecil	0	0	0	0	0	0,00 %	0
				051.0D	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPK/T	0	0	0	0	0	0,00 %	0
			RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		100.000.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000.000
			RBQ.001	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar		100.000.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000.000
			052	Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar		100.000.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000.000
				052.0A	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	0	0	0	0,00 %	0
				052.0B	Pendampingan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil/terluar	100.000.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000.000
			WA	Program Dukungan Manajemen		2.200.647.000	0	1.264.148.385	194.096.944	1.458.245.329	66,26 %	742.401.671
			WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut		2.200.647.000	0	1.264.148.385	194.096.944	1.458.245.329	66,26 %	742.401.671
			EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2.200.647.000	0	1.264.148.385	194.096.944	1.458.245.329	66,26 %	742.401.671
			EBA.962	Layanan Umum		761.242.000	0	460.977.397	60.151.097	521.128.494	68,46 %	240.113.506
				051.CA	Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan (Dit.P4K)	143.338.000	0	99.234.000	11.026.000	110.260.000	76,92 %	33.078.000
				051.CB	Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN (Dit. P4K)	150.649.000	0	95.519.000	11.026.000	106.545.000	70,72 %	44.104.000
				051.CC	Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi (Dit. P4K)	151.360.000	0	123.794.709	5.513.000	129.307.709	85,43 %	22.052.291

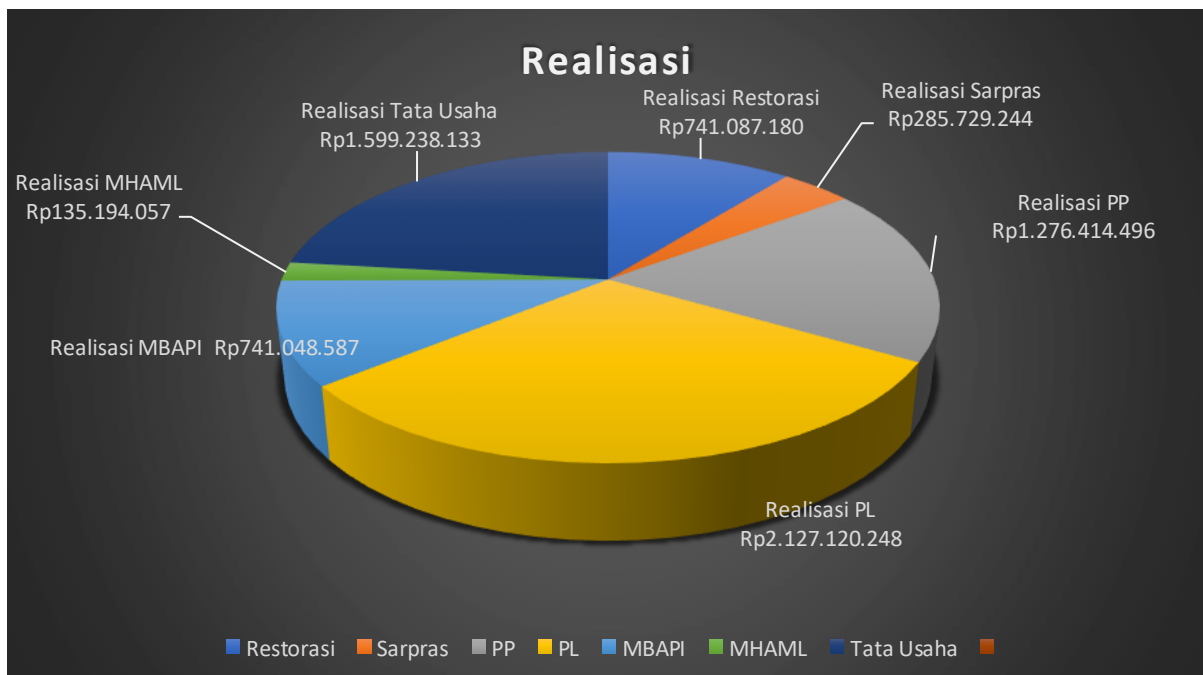
				051.CD	Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat (Dit. P4K)	244.226.000	0	98.325.688	27.073.097	125.398.785	51,35 %	118.827.215
				051.CE	Penunjang Penysunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P4K)	71.669.000	0	44.104.000	5.513.000	49.617.000	69,23 %	22.052.000
				EBA.994	Layanan Perkantoran	1.439.405.000	0	803.170.988	133.945.847	937.116.835	65,10 %	502.288.165
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.439.405.000	0	803.170.988	133.945.847	937.116.835	65,10 %	502.288.165
				002.0G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Dit. P4K)	1.439.405.000	0	803.170.988	133.945.847	937.116.835	65,10 %	502.288.165

Pada periode berjalan terdapat efisiensi pagu anggaran dari DIPA Awal semula Rp 60.667.768.000,- menjadi pagu efektif senilai Rp 36.077.266.000,- dari Rp 41.497.913.000,- dikarenakan terdapat perpindahan kewenangan pagu antar direktorat untuk anggaran PLN Lautra komponen DA-DK menjadi kewenangan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Direktorat Jasa Bahari senilai Rp 17.445.397.000,- sehingga anggaran PLN Lautra pada Direktorat P3K hanya senilai Rp 10.190.000.000,-, serta pada periode berjalan terdapat penambahan Anggaran Belanja Tambahan Garam (ABT Garam) TA 2025 sesuai Surat dari Kemenkeu Nomor S-149/MK/AG/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran KKP (BA 032) untuk Tambahan Anggaran KKP dalam rangka Swasembada Garam Nasional TA 2025 dan pada Direktorat P3K terdapat penambahan Anggaran Belanja Tambahan Garam (ABT Garam) TA 2025 senilai Rp 13.024.750.000,- dan Rp5.100.000.000,- berupa Pembuatan Dokumen KKPRL, Amdal dan Izin Produksi Garam Kegiatan Pembangunan Kawasan Sentra yg dalam pelaksanaannya oleh Direktorat SDK sehingga total Pagu ABT Garam Dit. P3K sebesar Rp 17.124.750.000,-, -. Lidar Pantura info terakhir pada pertemuan di Cirebon terkait ABT Garam ditiadakan.

lidar pantura	1.000.000.000
lidar rote	5.000.000.000
pnbp	1.000.000.000
Dukungan Penyiapan Lahan	6.024.750.000
	13.024.750.000

Pada TA 2025 juga terdapat perubahan struktur organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai Permen KP tersebut Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Komposisi Realisasi Anggaran bisa dilihat pada diagram di bawah ini :



Gambar 24. Komposisi Realisasi Anggaran Direktorat P3K Per Tanggal 30 September 2025
Sumber: Direktorat P3K (Per Tanggal 30 September 2025)

B. Uang Persediaan (UP)

Dana Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut adalah sebesar Rp500.000.000 yang terdiri dari UP tunai sebesar Rp300.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp200.000.000,- dan UP tunai sudah distribusi ke masing-masing unit kerja, untuk UP awal atau UP 1 RM Dit. P3K mendapatkan Uang Muka Kegiatan sebesar Rp50.000.000,- . Dit. P3K sampai dengan akhir pelaporan sudah melakukan revolving 12x dana UP. Selain UP yang bersumber dari dana Rupiah Murni, Dit.P3K juga terdapat dana dari PNBPN dan PLN Lautra. Untuk dana yang bersumber dari PNBPN sudah mendapatkan persetujuan penggunaan dari Kementerian Keuangan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-76/MK/AG/2025 tanggal 10 Mei 2025 dengan besaran 23,08% dari target PNBPN Tahun 2025 Ditjen PKRL, Dit. P3K mendapatkan UP Awal atau UP 1 PNBPN sebesar Rp 130.000.000,- dan telah didistribusikan ke Timja MHAML senilai Rp70.000.000,- dan Timja PP senilai Rp 60.000.000,-. Sampai akhir periode pelaporan sudah dipertanggungjawabkan dan sudah di SPM-kan senilai Rp129.766.606,- sehingga terdapat sisa UP 1 PNBPN senilai Rp233.394,-

C. Tambahan Uang Persediaan

Dana Tambahan Uang Persediaan RM pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan akhir periode pelaporan belum diajukan ke Satker Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dikarenakan belum ada arahan dari Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sedangkan untuk Dana Tambahan Uang Persediaan PLN Lautra sudah mendapatkan uang muka kegiatan TUP 1 PLN Lautra sebesar Rp289.049.000,- pada tanggal 25 Juni 2025 dan sudah dipertanggungjawabkan sesuai SPM No: 00807 tanggal 23 Juli 2025, SP2D No: 259991702013390 tanggal 24 Juli 2025 dengan total senilai Rp239.655.499,- sehingga terdapat pengembalian senilai Rp49.393.501,- dengan NTB No: 585782558895 dan NTPN No: CC6B61GCDFDDK311 tanggal 23 Juli 2025. Pada periode berjalan terdapat TUP 2 PLN Lautra senilai Rp224.740.000,- dan sudah dipertanggungjawabkan sesuai SPM No: 01290 tanggal 10 September 2025, SP2D No: 259991702029869 tanggal 11 September 2025 sehingga terdapat pengembalian senilai Rp8.123 dengan NTB No: 695262069997 dan NTPN No: 0BDE3522CREMTIPV tanggal 10 September 2025; pada pertengahan bulan mendapat tambahan dana TUP 2 PLN Lautra Tahap 2 senilai Rp19.169.773,- dan sudah dipertanggungjawabkan sesuai SPM No: 01336 tanggal 15 September 2025, SP2D No: 259991702031396 tanggal 16 September 2025 dengan status tidak ada pengembalian. TUP 1 PNBPN senilai Rp1.370.374.600,- sudah dipertanggungjawabkan sesuai SPM No: 01281 tanggal 9 September 2025, SP2D No: 259991702029494 tanggal 10 September 2025 sehingga terdapat pengembalian Rp454.993.482,- dengan NTB No: 091500035208 dan NTPN No : E6D276QTCGJ66C9N tanggal 10 September 2025 dan TUP 1 ABT Garam senilai Rp520.112.720,- sudah dipertanggungjawabkan sesuai SPM No: 01409 tanggal 23 September 2025, SP2D No : 259991702034577 tanggal 24 September, Dit. P3K mendapatkan tambahan TUP 1 ABT Garam pelimpahan dari Setditjen PK senilai Rp98.950.000,- sesuai SPM No: 01441 tanggal 24 September 2025, SP2D No: 259991702035109 tanggal 25 September 2025. Pada akhir periode pelaporan terdapat proses pengajuan TUP 3 PLN Lautra, TUP 2 ABT Garam dan TUP 2 PNBPN Dit P3K.

D. Monitoring Kontrak

Sampai dengan periode pelaporan sudah terdapat data kontrak yang didaftarkan. Dengan rincian sebagai berikut :

Monitoring Kontrak Dit. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
s.d September 2025												
No	Satker	No CAN	Supplier	Tgl.Kontrak	Nomor	UraianKontra k	Akun	Tgl Mulai	Tgl Akhir	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi	Nilai Sisa
1	622145	A/175.25000867/0/1	PT SERASI AUTORAYA	12-FEB-25	334/DJPKRL.3/II/2025	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon2	522141	17-FEB-25	31-DEC-25	138.178.572	138.178.572	-
2	622145	A/175.25001124/0/0	CV. GLOBAL ANDEUS	10-MAR-25	507/PPK/DJPKRL.3/III/2025	Pekerjaan Belanja Sewa Gudang Arsip dan BMN Direktorat P4K	522141	10-MAR-25	31-DEC-25	103.500.000	103.500.000	-
3	622145	A/175.25001688/0/0	CV. FAIZ PUTRAJAYA	30-APR-25	46/PPK/DJPK.1/IV/2025	Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Pesisir Bersih Kota Denpasar	526115	30-APR-25	30-MAY-25	111.796.980	111.796.980	-
4	622145	A/175.25003544/0/0	PT. TERRADROME INDONESIA	19-AUG-25	EP-01K2C35M78QTH9KWC4M7D7D	Pemetaan Lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SGN) di Kabupaten Rote Ndao Metode Lidar	522191	19-AUG-25	10-OCT-25	4.726.847.877	-	4.726.847.877
5	622145	A/175.25003547/0/0	CV. FAIZ PUTRAJAYA	28-JUL-25	EP-01K0XYV0B65XR1RHKKCONPJ6AZP	Pengadaan Drone RealTime Kinematics (RTK/DJI) Matrice 4 pada Pengelolaan Lahan Garam	532111	28-JUL-25	10-SEP-25	296.370.000	-	296.370.000
6	622145	A/175.25004065/0/0	CV. WALUYA	10-SEP-25	EP-01K49V25X7BKQW7Z2BKGB5FW	Pengadaan motor tempel Suzuki 15 PK2 unit dan perahu fiber 1 unit	526112	10-SEP-25	11-OCT-25	78.525.396	-	78.525.396

Pada periode berjalan terdapat permintaan pembatalan sebagian data kontrak dengan Nomor Kontrak : 334/DJPKRL.3/II/2025 dengan Supplier PT Serasi Autoraya berupa Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon 2 dari Nilai Kontrak semula Rp145.750.000,- menjadi Rp138.178.572,- sesuai Surat Pembatalan Data Kontrak Nomor : 388/PPK/622145/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, hal ini dilakukan agar tidak ada outstanding kontrak di OMSPAN.

E. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang direalisasikan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai dengan periode akhir pelaporan adalah sebesar Rp23.837.618.721,- berupa Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 senilai Rp23.830.560.000 di Lokasi Pulau Penembang oleh PT Dharma Inti Bersama dengan luas 936 ha dengan NTPN No : 319F961QVDBRHVRS, NTB No : 137408326100 tanggal 23 Juni 2025, di lokasi P. Pisang oleh PT. Kepri Island Resort dengan luas 8,16 ha senilai Rp207.753.600,- dengan NTPN No : EBAFB48VVOA0P1Q7, NTB No : 000093093404 tanggal 28 Juli 2025, di lokasi P. Pisang Batu oleh PT. Kepri Island Resort dengan luas 0,02 ha senilai Rp509.200,- dengan NTPN No : 17EEF61QVDF0LMD9, NTB No : 000093192072 tanggal 1 Agustus 2025 serta Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) dengan rincian seperti tabel di bawah ini :

Rekapitulasi PNBPN Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing Tahun 2025											
No.	Uraian	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Nilai PNBPN Per Ha (5% x Faktor S)	Jumlah Setoran PNBPN	Tanggal Billing	Kode Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar
1	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Gili Gede) oleh PT. Ultimate Gili Gede dengan luas 0,06800009 ha	PT. Ultimate Gili Gede	P. Gili Gede	0,0680	30.824.106	2.096.040	5 Mar 2025	820250305484866	352B648VVNTIVM22	510046393120	5 Mar 2025
2	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Sipora) oleh PT. Bela Sulu Mentawai (Bidang 1) dengan luas 0,087 ha	PT. Bela Sulu Mentawai	P. Sipora	0,0870	30.824.106	2.681.697	23 Jun 2025	820250623002317	BE3096U8F7U70HMD	021130427243	23 Jun 2025
3	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Sipora) oleh PT. Bela Sulu Mentawai (Bidang 2) dengan luas 0,037 ha	PT. Bela Sulu Mentawai	P. Sipora	0,0370	30.824.106	1.140.492	23 Jun 2025	820250623012171	BB0D92G50328VRAB	644482384239	23 Jun 2025
4	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Sipora) oleh PT. Bela Sulu Mentawai (Bidang 3) dengan luas 0,037 ha	PT. Bela Sulu Mentawai	P. Sipora	0,0370	30.824.106	1.140.492	23 Jun 2025	820250623013067	E5ACC48VVO71PS6B	185780236328	23 Jun 2025

Rincian Rekap PNBPN pada Direktorat P3K bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Akun PNBPN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	REALISASI
XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DILAUT				
425259	J. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)	per ha	25.460.000,00	24.038.822.800
425259	K. Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	per ha	5% x Faktor S	7.058.721
			Total	24.045.881.521
			Target	28.489.956.000
			Persentase	84,40%
	Realisasi Per Akun PNBPN	Realisasi		
	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	24.045.881.521		

F. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sampai dengan 30 September 2025 terdapat penerbitan 13 SPM gaji dan 4 SPM THR PPNNP, 54 SPM LS Banyak Penerima, 12 SPM GUP RM, 8 SPM Honor Operasional Satker, 6 SPM GUP KKP, 4 SPM Kontraktual, 5 SPM LS Non Kontraktual, 10 SPM LS Bendahara, 6 SPM PTUP 1. Rincian Pengajuan SPM Direktorat P3K s.d 30 September 2025 sebagai berikut :

DAFTAR SPM/SP2D DIT. P3K								
Periode September 2025								
No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi
1	251751503000106	01-02-2025	80.009.906	PENGHASILAN PPNNP INDUK	00071T/622145/2025	23-01-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan Januari Tahun 2025 untuk 15 Pegawai.
2	251751303000214	30-01-2025	340.000	NON GAJI	00075T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1 orang a.n Mikha Hasudungan ST No: 8.41/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 07 Januari 2025
3	251751303000216	30-01-2025	1.495.000	NON GAJI	00074T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 4 orang a.n Isya Kharisma dkk ST No: 8.50/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 8 Januari 2025
4	251751303000215	30-01-2025	4.974.500	NON GAJI	00073T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Angle Agata Nender dkk ST No: B.85/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 10 Januari 2024
5	251751303000222	30-01-2025	17.031.009	NON GAJI	00072T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 8 orang a.n Muhammad Yusuf dkk ST No: B.3953/DJPKRL3/KP.40/X11/2024 tgl 30 Desember 2024
6	251751303000567	05-02-2025	1.215.000	GUP KKP	00149T/622145/2025	04-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365 8300 5016 6017 a.n A Aris)
7	251751303000659	06-02-2025	3.756.500	NON GAJI	00143T/622145/2025	04-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPR-L-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
8	251751303000794	06-02-2025	49.520.888	GUP	00170T/622145/2025	05-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
9	251751303001277	18-02-2025	67.886.685	PENGHASILAN PPNNP SUSULAN	00209T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Susulan Bulan Januari Tahun 2025 untuk 12 Pegawai.
10	251751303001302	19-02-2025	1.720.000	NON GAJI	00223T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 2 orang a.n Budiman dkk sesuai ST No: B.71/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 9 Januari 2025
11	251751303001297	19-02-2025	5.412.000	NON GAJI	00221T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 7 orang a.n Bagus Afrianto dkk sesuai ST No: B.71/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 9 Januari 2025
12	251751303001301	19-02-2025	13.330.640	NON GAJI	00219T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 1 orang a.n Angke Agata Nender sesuai ST No: B.148/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 15 Januari 2025
13	251751303001299	19-02-2025	40.470.560	NON GAJI	00210T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 3 orang a.n Dyah Erowati dkk (pihak eksternal) sesuai ST No: B.309/SI.6/KP.440/I/2025 tgl 17 Januari 2025
14	251751303001298	19-02-2025	59.955.019	NON GAJI	00217T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 3 orang a.n Ifan Setiawan dkk sesuai ST No: B.148/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 15 Januari 2025
15	251751303001390	20-02-2025	390.000	NON GAJI	00236T/622145/2025	18-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Yono Haryono ST No: B.214/DJPKRL3/KP.440/I/2025 tgl 21 Januari 2025
16	251751303001574	24-02-2025	34.629.699	GUP	00248T/622145/2025	21-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
17	251751303001576	24-02-2025	42.900.000	GUP	00256T/622145/2025	21-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
18	251751303001735	26-02-2025	17.762.000	GUP KKP	00268T/622145/2025	26-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365 8300 5016 5993 a.n Ahmad Aris)
19	251751303001868	28-02-2025	8.626.193	GUP KKP	00280T/622145/2025	28-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365-8300-5012-4891 a.n TU Dit. P4K)
20	251751503000197	01-03-2025	80.009.906	PENGHASILAN PPNNP INDUK	00242T/622145/2025	21-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan Februari Tahun 2025 untuk 15 Pegawai.
21	251751503000203	01-03-2025	68.351.156	PENGHASILAN PPNNP INDUK	00257T/622145/2025	24-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan Februari Tahun 2025 untuk 12 Pegawai.
22	251751503000261	01-03-2025	5.844.202	PENGHASILAN PPNNP INDUK	00267T/622145/2025	26-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan Februari Tahun 2025 untuk 1 Pegawai.
23	251751503000260	01-03-2025	33.124.534	PENGHASILAN PPNNP INDUK	00266T/622145/2025	26-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan Februari Tahun 2025 untuk 7 Pegawai.
24	251751303001922	05-03-2025	3.756.500	NON GAJI	00278T/622145/2025	27-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPR-L-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
25	251751303001934	03-03-2025	17.532.606	PENGHASILAN PPNNP SUSULAN	00287T/622145/2025	03-03-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Susulan Bulan Januari Tahun 2025 untuk 3 Pegawai.
26	251751303002196	06-03-2025	121.995.496	NON GAJI KONTRAKTUAL	00294T/622145/2025	04-03-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 334/DJPKRL3/II/2025 tgl 12/2/2025, BAST No: 362/PPK/DJPKRL3/II/2025 tgl 17/2/2025, BAP No: 476/PPK/DJPKRL3/III/2025 tgl 3/3/2025, SPKPBJ No: 000365/SLS/TRAC-IKT1/3/2025 tgl 3/3/2025.
27	251751303002216	05-03-2025	57.777.985	GUP	00296T/622145/2025	05-03-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
28	251751302003300	14-03-2025	91.378.378	NON GAJI KONTRAKTUAL	00318T/622145/2025	12-03-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 507/PPK/DJPKRL3/II/2025 tgl 6/3/2025, BAST No: 537/PPK/DJPKRL3/II/2025 tgl 12/3/2025, BAP No: 538/PPK/DJPKRL3/III/2025 tgl 12/3/2025, SPKPBJ : 0291/GA/III/2025 tgl 12/3/2025
29	251751503000334	18-03-2025	80.941.000	SPM THR PPNNP	00339T/622145/2025	17-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 15 Pegawai.
30	251751301003935	19-03-2025	33.727.757	NON GAJI	00319T/622145/2025	17-03-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Pesisir Bersih Kota Denpasar sesuai BAST No: 391/PPK/DJPKRL3/II/2025 tgl 20/2/2025, Kwitansi No: SI-12-250219001 tgl 20/2/2025

Lanjutan.....

31	251751303003267	20-03-2025	8.750.000	GUP	003547/622145/2025	19-03-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
32	251751303000482	21-03-2025	59.834.461	SPM THR PPNPN	003677/622145/2025	20-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 12 Pegawai.
33	251751303000551	01-04-2025	187.149.842	PENGHASILAN PPNPN INDUK	003837/622145/2025	24-03-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Maret Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
34	251751303000550	24-03-2025	8.095.140	SPM THR PPNPN	003847/622145/2025	24-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 3 Pegawai.
35	251751303000615	27-03-2025	2.698.380	SPM THR PPNPN	003997/622145/2025	26-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 1 Pegawai.
36	251751303003704	27-03-2025	2.008.589	GUP KKP	004007/622145/2025	26-03-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP Nomor 4365-8300-5012-4891 a.n TU DI T P4K)
37	251751303003812	10-04-2025	3.756.500	NON GAJI	004077/622145/2025	08-04-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Maret 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
38	251751303003981	14-04-2025	11.627.082	GUP	004147/622145/2025	11-04-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
39	251751303000695	01-05-2025	187.149.842	PENGHASILAN PPNPN INDUK	004397/622145/2025	22-04-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan April Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
40	251751303000506	07-05-2025	1.852.500	NON GAJI	004707/622145/2025	05-05-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan April 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
41	251751303000846	01-06-2025	187.149.842	PENGHASILAN PPNPN INDUK	005297/622145/2025	22-05-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Mei Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
42	251751303006868	02-06-2025	10.171.299	GUP	005507/622145/2025	02-06-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
43	251751301009069	04-06-2025	99.207.230	NON GAJI KONTRAKTUAL	005457/622145/2025	02-06-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Pesisir Bersih Kota Denpasar sesuai Kontrak No: 46/PPK/DJPK.1/IV/2025 tgl 30/4/2025, BAST No: 74/PPK/DJPK.1/IV/2025 tgl 21/5/2025, BAP No: 75/PPK/DJPK.1/IV/2025 tgl 21/5/2025
44	251751303006968	04-06-2025	1.852.500	NON GAJI	005547/622145/2025	02-06-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Mei 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
45	251751303007790	13-06-2025	17.636.000	GUP KKP	005947/622145/2025	12-06-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No. 4365 8300 5016 5993 an. Ahmad Aris)
46	251751303007792	13-06-2025	5.672.500	GUP	005847/622145/2025	12-06-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
47	259991531002932	01-07-2025	188.883.948	PENGHASILAN PPNPN INDUK	006647/622145/2025	25-06-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2025 untuk 35 Pegawai
48	259991330045906	04-07-2025	1.852.500	NON GAJI	006837/622145/2025	02-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juni 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
49	259991330046338	02-07-2025	8.707.799	GUP	006767/622145/2025	02-07-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
50	259991330047139	04-07-2025	4.720.000	NON GAJI	006747/622145/2025	02-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Apriani Nurfaela dkk ST No: B.854/DJPK.4/KP.44Q/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025
51	259991330080014	17-07-2025	60.344.400	NON GAJI	007277/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n ANDI RENALD dkk (pihak eksternal) sesuai ST No: 661/ND-700.34.PP.04.03/VI/2025 tanggal 10 Juli 2025
52	259991330080006	17-07-2025	31.341.991	NON GAJI	007417/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang an. Estika Ayu Citra Utami dkk sesuai ST No: B.379/DJPKRL.3/KP.44Q/II/2025 tanggal 10 Februari 2025
53	259991330080011	17-07-2025	58.220.632	NON GAJI	007317/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang an. Partini dkk sesuai ST No: B.91/DJPKRL.3/KP.44Q/I/2025 tgl 10 Januari 2025
54	259991330080013	17-07-2025	28.957.140	NON GAJI	007307/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 6 orang an. Dyah Erowati dkk (pihak eksternal) ST No: B.219/Sl.6/KP.44Q/VI/2025 tgl 13/1/2025 dan 5 orang an. Navila Ulfi Fauziyanti dkk (pihak eksternal) ST No: B.648/BPSPL.1/KP.44Q/V/2025 tgl 8/5/
55	259991330094079	24-07-2025	106.356.565	NON GAJI	007857/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ABT Garam 6 orang an. Estika Ayu Citra Utami dkk sesuai ST No: B.427/DJPK.4/KP.44Q/V/2025 tanggal 14 Mei 2025
56	259991330094025	24-07-2025	14.764.644	NON GAJI	007927/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang an Apriani Nurfaela dkk sesuai ST No: B.857/DJPK.4/KP.44Q/V/2025 tanggal 26 Juni 2025
57	259991330094023	24-07-2025	9.074.000	NON GAJI	007917/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (PNBP) 3 orang a.n Ganjar Rahajaya dkk ST No: B.1224/DJPK.4/KP.44Q/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025
58	259991330094026	24-07-2025	125.324.896	NON GAJI	007847/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (pihak eksternal) ABT Garam 40 orang an. Imam Fauzi dkk sesuai ST No: B.772/BKKPN/KP.44Q/V/2025 tanggal 16 Mei 2025
59	259991330094024	24-07-2025	1.530.000	NON GAJI	007897/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang an. Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.1123/DJPRK.4/KP.44Q/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025
60	259991330094078	24-07-2025	2.300.000	NON GAJI	007937/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang an Irfan Darmawan sesuai ST No: B.857/DJPK.4/KP.44Q/V/2025 tanggal 26 Juni 2025
61	259991330094077	24-07-2025	510.000	NON GAJI	007907/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 1 orang an. Angle Agata nender sesuai ST No: B.1123/DJPRK.4/KP.44Q/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025
62	259991330094804	24-07-2025	113.857.405	NON GAJI	007947/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ABT Garam 5 orang a.n Reni Indrawati dkk sesuai ST No: B.427/DJPK.4/KP.44Q/V/2025 tanggal 14 Mei 2025
63	259991330094807	25-07-2025	58.406.804	NON GAJI	007967/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Ahmad Aris dkk sesuai ST No: B.150/DJPK/KP.44Q/IV/2025 tanggal 28 April 2025
64	259991702013390	24-07-2025	-	GTUP NIHIL	008077/622145/2025	23-07-2025	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (P3K Lautra)
65	259991330096644	25-07-2025	80.759.639	NON GAJI	008267/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Yoga Dwi Priyatmoko dkk sesuai ST No: B.712/DJPK.4/KP.44Q/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025

Lanjutan....

66	259991330096582	25-07-2025	146.294.712	NON GAJI	008257/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 7 orang a.n Partini dkk sesuai ST No: B.712/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
67	259991330096584	25-07-2025	162.803.470	NON GAJI	008237/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (pihak eksternal) 16 orang an. Zulhamdi sesuai ST No: B.713/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
68	259991330097452	28-07-2025	44.835.000	NON GAJI	008377/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Paket Meeting Fullboard sesuai BAST No: 363/PPK/622145/VI/2025 tanggal 24 Mei 2025, Kwitansi No: AWH-AR/25/06/00395 tanggal 24 Mei 2025
69	259991330099326	28-07-2025	1.050.000	NON GAJI	008417/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Tely Dasaluti sesuai ST No: B.627/DJPKRL.3/KP.440/II/2025 tanggal 4 Maret 2025
70	259991330099403	28-07-2025	1.060.000	NON GAJI	008447/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Anandinta Permatachani dkk sesuai ST No: B.517/DJPKRL.3/KP.440/II/2025 tanggal 21 Februari 2025
71	259991330099402	28-07-2025	1.050.000	NON GAJI	008427/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinta Permatachani sesuai ST No: B.627/DJPKRL.3/KP.440/II/2025 tanggal 4 Maret 2025
72	259991330099325	28-07-2025	1.855.000	NON GAJI	008437/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.517/DJPKRL.3/KP.440/II/2025 tanggal 21 Februari 2025
73	259991320175490	31-07-2025	28.263.289	NON GAJI	008997/622145/2025	29-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Alat Pendukung Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sesuai BAST No: 1846/DJPK.1/PPK/VI/2025 tanggal 4 Juli 2025, Kwitansi No: 036/KW/HMS/VI/2025 tanggal 4 Juli 2025
74	259991330110564	31-07-2025	10.000.000	GUP	009227/622145/2025	30-07-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
75	259991531005969	01-08-2025	188.883.948	PENGHASILAN PPNNP INDUK	007777/622145/2025	21-07-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan Juli Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
76	259991330116375	05-08-2025	1.852.500	NON GAJI	009527/622145/2025	01-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juli 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPKL-KPA/II/2025 Tanggal 2 Januari 2025
77	259991330132440	11-08-2025	96.151.200	NON GAJI	010177/622145/2025	07-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri 1 orang a.n Ahmad Aris sesuai ST No: B.635/DJPK/KP.440/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025. Surat Setneg No: B-00001512/KSN/S/PDLN/LN.00/07/2025 tanggal 16 Juli 2025
78	259991330133355	12-08-2025	6.546.151	NON GAJI	010077/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.897/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025
79	259991330133353	12-08-2025	795.000	NON GAJI	010107/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Mahatma Alvinia Putri dkk sesuai ST No: B.710/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
80	259991330133352	12-08-2025	478.500	NON GAJI	010097/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinta Permatachani sesuai ST No: B.575/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 28 Mei 2025
81	259991330133354	12-08-2025	795.000	NON GAJI	010087/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.710/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
82	259991330135266	12-08-2025	7.849.780	NON GAJI	010317/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Masterina Rahmadya sesuai ST No: B.1520/DJPK/KP.440/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025
83	259991330135273	12-08-2025	23.549.340	NON GAJI	010307/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Heri Rasdiana dkk sesuai ST No: B.1520/DJPK/KP.440/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025
84	259991330141171	14-08-2025	61.922.520	NON GAJI	010617/622145/2025	12-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri - Uang Harian a.n Ahmad Aris sesuai ST No: B.635/DJPK/KP.440/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, Surat Setneg No: B-00001512/KSN/S/PDLN/LN.00/07/2025 tanggal 16 Juli 2025
85	259991330147525	19-08-2025	499.000	NON GAJI	011007/622145/2025	14-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinta Permatachani sesuai ST No: B.1228/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025
86	259991330147527	19-08-2025	2.606.000	NON GAJI	010837/622145/2025	14-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.1102/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025
87	259991330147526	19-08-2025	1.060.000	NON GAJI	010877/622145/2025	14-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.1181/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025
88	259991330155705	22-08-2025	1.060.000	NON GAJI	011207/622145/2025	20-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 3 orang a.n Partini dkk sesuai ST No: B.1315/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025
89	259991330155695	22-08-2025	795.000	NON GAJI	011217/622145/2025	20-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 2 orang a.n Yoga Dwi Priyatmoko dkk sesuai ST No: B.1302/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025
90	259991330160528	22-08-2025	129.766.606	GUP	011297/622145/2025	21-08-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP)
91	259991330170105	27-08-2025	19.998.848	GUP	011717/622145/2025	26-08-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Dit.P3K)
92	259991330170372	28-08-2025	51.430.000	NON GAJI	011687/622145/2025	26-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas pihak eksternal 72 orang a.n Yeanes Riwu, S.Pi dkk sesuai ST No: 523/236/Dpi 4.1 tanggal 30 Juli 2025
93	259991330171817	28-08-2025	13.825.000	NON GAJI	011707/622145/2025	26-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang honor narasumber pihak eksternal 8 orang a.n Jusup B. Messakh, S.Pd dkk sesuai ST no. 000.1.2.3/256/Dpi/2025 tanggal 30 Juli 2025
94	259991531010009	01-09-2025	188.883.948	PENGHASILAN PPNNP INDUK	011307/622145/2025	21-08-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan Agustus Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
95	259991330177480	01-09-2025	19.776.200	NON GAJI	011837/622145/2025	28-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas Non ASN 2 orang a.n Pria Wibawa Utama dkk sesuai ST No: B.1732/DJPK.4/KP.440/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2025

Lanjutan.....

96	259991330177481	01-09-2025	80.514.200	NON GAJI	01182T/622145/2025	28-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ASN 4 orang a.n Fahrizal Ari Iwari dkk sesuai ST No: B.1693/DJPK.4/KP.440/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025
97	259991330177479	01-09-2025	9.541.400	NON GAJI	01184T/622145/2025	28-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas pihak eksternal 4 orang a.n Frits Nataniel Yohanes Rumbino dkk sesuai ST No: B.1733/DJPK.4/KP.440/VIII/2026 tanggal 25 Agustus 2025
98	259991330183486	03-09-2025	9.196.320	NON GAJI	01206T/622145/2025	01-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Simon Boyke Sinaga sesuai ST No: B.857/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 26 Juni 2025
99	259991330183487	03-09-2025	1.852.500	NON GAJI	01205T/622145/2025	01-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Agustus 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPR-L-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
100	259991330183480	03-09-2025	2.300.000	NON GAJI	01207T/622145/2025	01-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.1206/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025
101	259991310569601	08-09-2025	262.995.000	NON GAJI KONTRAKTUAL	01226T/622145/2025	03-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Drone RealTime Kinematics pada Pengelolaan Lahan Garam sesuai Kontrak No: EP-01K0XYV0B 6SXR1RHKC ONPJ6AZP tgl 28-07-2025, BAST No: 2396/BAST/PPK/DJPK/VIII/2025 tgl 28-8-2025, BAP No: 2397/PPK/DJPK/VIII/2025
102	259991320320699	10-09-2025	44.325.000	NON GAJI	01250T/622145/2025	08-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Alat pendukung survey sesuai BAST No: 2463/DJPK.1/PPK/IX/2025 tanggal 4 September 2025, Kwitansi No: 88/KW/PI/IX/2025 tanggal 4 September 2025
103	259991702029494	10-09-2025	-	GTUP NIHIL	01281T/622145/2025	09-09-2025	LAINNYA	Pertanggungan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNB P3K)
104	259991702029869	11-09-2025	-	GTUP NIHIL	01290T/622145/2025	10-09-2025	LAINNYA	Pertanggungan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
105	259991330208285	12-09-2025	19.279.280	NON GAJI	01289T/622145/2025	10-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Muhammad Nurkholis Fauzi dkk sesuai ST No: B.1206/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025
106	259991330211927	15-09-2025	96.151.200	NON GAJI	01306T/622145/2025	11-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri - Tiket. 1 orang a.n Ahmad Aris sesuai ST No: B.635/DJPK/KP.440/VII/2025, tanggal 28 Juli 2025, Surat Setneg No: B-00001512/KSN/S/PDLN/LN.00/07/20 25, tanggal 16 Juli 2025
107	259991330212681	15-09-2025	1.900.000	NON GAJI	01308T/622145/2025	11-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Tely Dasaluti sesuai ST No: B.1890/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 9 September 2025
108	259991330212674	15-09-2025	28.000.000	NON GAJI	01309T/622145/2025	11-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Anandita Permatachani dkk sesuai ST No: B.1890/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 9 September 2025
109	259991330219250	17-09-2025	11.724.000	NON GAJI	01335T/622145/2025	15-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Vиви Yovita Indriasari sesuai ST No: B.1948/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 15 September 2025
110	259991702031396	16-09-2025	-	GTUP NIHIL	01336T/622145/2025	15-09-2025	LAINNYA	Pertanggungan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
111	259991330227077	22-09-2025	43.696.280	NON GAJI	01367T/622145/2025	18-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Masterina Rahmadya dkk, ST No: B.1980/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
112	259991330227087	22-09-2025	56.927.580	NON GAJI	01366T/622145/2025	18-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Heri Rasdiana dkk, ST No: B.1981/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
113	259991330234323	24-09-2025	27.627.905	NON GAJI	01398T/622145/2025	22-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Simon Boyke Sinaga dkk sesuai ST No: B.1978/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
114	259991330234314	24-09-2025	5.524.005	NON GAJI	01399T/622145/2025	22-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.1948/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 12 September 2025
115	259991330234324	24-09-2025	12.212.097	NON GAJI	01401T/622145/2025	22-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Ahmad Aris sesuai ST No: B.536/DJPK/KP.440/VII/2025 tanggal 17-Juli-2025
116	259991702034577	24-09-2025	-	GTUP NIHIL	01409T/622145/2025	23-09-2025	LAINNYA	Pertanggungan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (ABT Garam Dit.P3K)
117	259991310703018	25-09-2025	44.144.144	NON GAJI	01403T/622145/2025	23-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai BAST No: 2603/DJPK.1/PPK/IX/2025 tanggal 18-9-2025, Kwitansi No: KW-25-043 tanggal 19-9-2025
118	259991330238182	26-09-2025	2.650.000	NON GAJI	01411T/622145/2025	24-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 5 orang a.n Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.1975/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
119	259991330240576	26-09-2025	395.000	NON GAJI	01426T/622145/2025	24-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1 orang a.n Achmad Sulaiman sesuai ST No: B.505/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 22 Mei 2025
120	259991330240485	26-09-2025	790.000	NON GAJI	01425T/622145/2025	24-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 2 orang a.n Saynuddin dkk sesuai ST No: B.505/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 22 Mei 2025
121	259991702035109	25-09-2025	-	GTUP NIHIL	01441T/622145/2025	24-09-2025	LAINNYA	Pertanggungan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (ABT Garam Dit.P3K)
122	259991330244688	26-09-2025	14.999.449	GUP	01453T/622145/2025	26-09-2025	NON GAJI	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang (Dit.P3K 14.999.449)

BAB IV. PENUTUP

4.1.Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada BAB sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan III tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku. Keberhasilan atas pencapaian target IKU maupun IKM dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian target IKU maupun IKM tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Triwulan III tahun 2025, salah satu tantangan yang cukup signifikan berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU. Pencapaian target IKU maupun IKM pada Triwulan III tahun 2025 juga diselesaikan bersama oleh semua pihak baik internal maupun eksternal.
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang mencakup 9 IKU dan 6 IKM.
- c. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM), anggaran, mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K sebagai Barang Milik Negara (BMN), metode, dan sumberdaya lainnya.
- d. Jumlah pegawai Direktorat P3K sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari : 44 (Empat Puluh Empat) orang PNS , 3 (tiga) orang P3K, 7 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 20 (dua puluh) orang PJLP.
- e. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2024 dilakukan oleh 7 Tim Kerja sebagai berikut: Tim Kerja Pengelolaan Lahan (PL), Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian (PP), Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML), dan Subbagian Tata Usaha.
- f. Jumlah pagu anggaran awal tahun 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sedangkan jumlah pagu anggaran efektif yang dikelola Direktorat P3K per Bulan September 2025 sebesar Rp 41.177.266.000. Realisasi Anggaran berdasarkan pagu efektif sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp 6.905.831.945 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 16,77% sehingga sisa anggaran berdasarkan pagu efektif sebesar Rp 34.271.434.055.
- g. Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K pada Triwulan III tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P3K Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	% Capaian Kinerja TW III 2025
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 01.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	-	-	-
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	IKU 02.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	-	-	-
		IKU 03.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	-	-	-
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	IKU 04.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
		IKU 05.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	IKU 06.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	-	-	-
		IKU 07.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	-	-	-
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	IKU 08.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	IKU 09.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	IKM 10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	-	-	-
		IKM 11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	2	2	100
		IKM 12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	-	-	-
		IKM 13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	80	80	100

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	% Capaian Kinerja TW III 2025
		IKM 14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		IKM 15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan III tahun 2025)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama, IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Baik" (Range Nilai 90%-<110%)

- h. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K pada periode Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% yang diperoleh dari Sasara Kegiatan Nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dari 2 (dua) IKM, yaitu :
1. IKU 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 2 dokumen (penjumlahan 1 target Laporan SPIP Direktorat P3K di triwulan I 2025 ditambah 1 target laporan SPIP Direktorat P3K di triwulan II 2025) sedangkan capaian juga sebanyak 2 dokumen (penjumlahan 1 capaian Laporan SPIP Direktorat P3K di triwulan I 2025 ditambah 1 capaian laporan SPIP Direktorat P3K di triwulan II 2025) sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
 2. IKM 13 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 80% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 100%.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan III tahun 2025 yang secara garis besar disusun dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Direktorat P3K di periode berikutnya.

4.2.Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P3K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan kelautan dan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Rekomendasi periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) guna mencapai target.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan UPT Teknis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) yang terdekat dari lokasi kegiatan.

4.3. Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut di triwulan I tahun 2025 dari rekomendasi di triwulan IV pada tahun 2024 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 66. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I tahun 2025	Alamat Tautan (<i>Link</i>) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing

2. Tindak lanjut di Triwulan II tahun 2025 dari rekomendasi pada triwulan I tahun 2025 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 67. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan II tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan III tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9N TxtloLL9B8r-GepTWWe?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9N TxtloLL9B8r-GepTWWe?usp=sharing

Sumber: Direktorat P3K (30 Juni 2025)

3. Tindak lanjut di Triwulan III tahun 2025 dari rekomendasi pada triwulan II tahun 2025 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

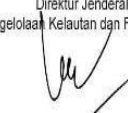
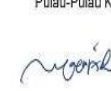
Tabel 68. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan II Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan III tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan III tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9N TxtloLL9B8r-GepTWWe?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9N TxtloLL9B8r-GepTWWe?usp=sharing

Sumber: Direktorat P3K (30 September 2025)

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 24 Januari 2025

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL_sesprindirjeng@kkp.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muhammad Yusuf Jabatan : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Victor Gustaaf Manoppo Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 24 Januari 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  Victor Gustaaf Manoppo Pihak Pertama Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Muhammad Yusuf	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>1. Volume pengendalian sampah laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. Volume sampah plastik dan non plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana</td> <td>3. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>5. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar</td> <td>6. Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif) (Pulau)</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>7. Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (Kelompok)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>4. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat</td> <td>9. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat</td> <td>10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume pengendalian sampah laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3	2. Volume sampah plastik dan non plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)	15	2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana	3. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim (Nilai)	55	5. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)	55	3. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	6. Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif) (Pulau)	19	7. Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau)	1	8. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (Kelompok)	55	4. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat	9. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50	5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																														
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume pengendalian sampah laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3																														
	2. Volume sampah plastik dan non plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)	15																														
2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana	3. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55																														
	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim (Nilai)	55																														
	5. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)	55																														
3. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	6. Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif) (Pulau)	19																														
	7. Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau)	1																														
	8. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (Kelompok)	55																														
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat	9. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50																														
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>11. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>12. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>15. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>16. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95	12. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4	13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85	15. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	16. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80	Data Anggaran <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KEGIATAN</th> <th>ANGGARAN (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>22.381.938.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>36.285.830.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>2.449.785.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2025</td> <td>61.117.553.000</td> </tr> </tbody> </table> Jakarta, 24 Januari 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  Victor Gustaaf Manoppo Pihak Pertama Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Muhammad Yusuf	NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000	3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000	Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2025		61.117.553.000
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																														
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95																														
	12. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4																														
	13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87																														
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85																														
	15. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100																														
	16. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80																														
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)																														
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000																														
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000																														
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000																														
Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2025		61.117.553.000																														

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 30 Juni 2025

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL seperdirjenp3k@kkp.go.id DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ahmad Aris Jabatan : Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : A. Koswara Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 30 Juni 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan  A. Koswara Ditandatangani Secara Elektronik Pihak Pertama Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Ahmad Aris Ditandatangani Secara Elektronik	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SASARAN KEGIATAN</th> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil</td> <td>2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi</td> <td>4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan</td> <td>6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal</td> <td>8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6. Meningkatnya Perencanaan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</td> <td>10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55		3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55		5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3		7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	6. Meningkatnya Perencanaan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	152	7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70		11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3		12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80		13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80		14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																																												
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18																																												
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55																																												
	3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1																																												
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55																																												
	5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1																																												
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3																																												
	7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47																																												
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2																																												
6. Meningkatnya Perencanaan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	152																																												
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70																																												
	11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3																																												
	12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80																																												
	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80																																												
	14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SASARAN KEGIATAN</th> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15. Nilai pengawasan kearsipan Internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		15. Nilai pengawasan kearsipan Internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	Data Anggaran <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NO.</th> <th style="text-align: center;">KEGIATAN</th> <th style="text-align: center;">ANGGARAN (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td style="text-align: right;">2.785.830.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td style="text-align: right;">22.381.938.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td style="text-align: right;">2.449.785.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025</td> <td style="text-align: right;">27.617.553.000</td> </tr> </tbody> </table> Jakarta, 30 Juni 2025 Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan  A. Koswara Ditandatangani Secara Elektronik Pihak Pertama Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Ahmad Aris Ditandatangani Secara Elektronik	NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	1.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000	2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000	Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		27.617.553.000																								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																																												
	15. Nilai pengawasan kearsipan Internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80																																												
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)																																												
1.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000																																												
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000																																												
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000																																												
Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		27.617.553.000																																												

Lampiran 3. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

4 of 4		Lampiran II
		Surat Menteri Keuangan tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja Negara Tahun Anggaran
IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI		
Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Lampiran 4.

Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
1	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	Ton	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	18	18
2	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
3	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
4	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (Kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	3	3
7	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	47	47

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	Komunitas	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	2	2
9	Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Diterbitkan (Kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	152	152
10	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	70	70
11	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	Triwulanan	Posisi Akhir (PA)	-	1	1	2	2	3	3
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semesteran	Posisi Akhir (PA)	-	78	78	-	-	80	80
13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulanan	Rata-Rata	-	80	80	80	80	80	80

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
14	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	100	100
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	80	80

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025

Lampiran 5.

Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
1.	Dr. Ahmad Aris	197208012006041003	PRIA	Pembina Utama Muda / IV c	DIREKTUR P3K	S-3	-	PNS
2.	Reni Indrawati, S.T., M.M.	197810182003122002	WANITA	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	S-2	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
3.	Ir. Balok BUdiyanto, M.M.	196212281990021001	PRIA	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Utama	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
4.	Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si.	196711221994031003	PRIA	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
5.	Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M.	196705041994031009	PRIA	Pembina Utama Muda / IV c	APJK Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
6.	Syofyan Hasan, S.Pi., M.Sc.	197009051998031002	PRIA	Pembina Utama Muda / IV c	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
7.	Ganjar Raharja, S.Pi., M.I.L.	197906052005021003	PRIA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
8.	Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.	198005142005021002	PRIA	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
9.	Dr. Simon Boyke Sinaga, S.St.Pi., M.Si.	197812092003121003	PRIA	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	S-3	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
10.	Barnard Caisaro Purba, S.St.Pi., M.Si.	198101032005021001	PRIA	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
11.	Weka Mahardi, S.T., M.Si.	198004252007011001	PRIA	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
12.	Sarifah, S.T., M.T.	197606202010122001	WANITA	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
13.	Vivi Yovita Indriasari, M.T.	197504152008012018	WANITA	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
14.	Dharmawan Irsha Pratama, S.I.K.	198709112024211002	PRIA	IX	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	P3K
15.	Masterina Rahmadya, S.Si.	106964	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
							Pengelolaan Lahan	
16.	Partini, S.Pi., M.Si.	197402042002122002	WANITA	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	S-2	Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
17.	Giri Wilisandy, S.T., M.T.	198205022009011009	PRIA	Penata Tk. I / III d	PELP Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
18.	Aria Jati Kusuma, S.Kom.	198511132009121001	PRIA	Penata Tk. I / III d	Surveyor Ahli Muda	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
19.	Marines Febriani, S.T.	199002112018012003	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
20.	Anggia Rivani, S.Si.	199609182019022003	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
21.	Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.	197811102003121001	PRIA	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
22.	Arif Miftahul Aziz, S.Pi., M.Si.	197906082002121004	PRIA	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-2	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
23.	Estika Ayu Citra Utami, S.Kom.	12337	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PPNPN Pengolah Data Penyusun Monev
24.	Amanda Tri Persada, S.Kom.	107329	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS
25.	Diva Eka Putra Fatkhu Rokhman, S.Kel.	107327	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS
26.	Yoga Dwi Priyatmoko, S.Kom.	107326	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP
27.	Tely Dasaluti, S.Si., M.P.	197202082001122003	WANITA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS
28.	Roki Asriwianto, S.T., M.M.	197610182003121004	PRIA	Pembina / IV a	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-2	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS
29.	Saynuddin, S.Pi.	198612282007011001	PRIA	Penata / III c	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS
30	Muhammad Nurkholis Fauzi, S.I.K.	IX	PRIA	-	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K
31.	Mei Resti Fadila Dianty, S.Tr.Pi.	101743	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PPNPN Bidang Bantuan Sarana Prasarana

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
32.	Irfan Darmawan, S.E.	106966	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan
33.	Akhmat Wiyanto	-	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi
34.	Muhammad Sifaul Fanani	104787	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Kebersihan Pulau Lusi
35.	Muhammad Soim Supriyadi	104785	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Kebersihan Pulau Lusi
36.	Suprpto	-	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi
37.	Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.	197902222002122001	WANITA	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
38.	Fina Ardarini, S.Pi., M.Si.	197701122002122002	WANITA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
39.	Suryo Prasajo, S.T., M.Si., M.Sc.	197802072005021003	PRIA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
40.	Fahrizal Ari Iwari, S.St.Pi., M.Si.	197701152005021002	PRIA	Pembina / IV a	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
41.	Ifan Setiawan, S.St.Pi.	198306212010121002	PRIA	Penata Tk. I / III d	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
42.	Dhian Widiyani, S.Si.	198809292014032001	WANITA	Penata / III c	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
43.	Indah Setya Murtihari, S.T., M.T.	196802212005022001	WANITA	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
44.	Tia Maulida Nurbaiti, S.T.	199009222018012001	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
45.	Pria Wibawa Utama, S.I.K., M.Si.	104723	PRIA	-	-	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Operator GIS
46.	Della Arimurti, S.Si.	107328	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP
47.	Cukup Pinem	23330	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Pendukung Kepegawaian
48.	Eko Wibisono, S.T.	198203102015031001	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
49.	Bagus Afrianto, S.T.	1988040820015031001	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
50.	Marselius Fransiskus Talahatu, S.Pi., M.Si.	198611162008011002	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
51.	Oktanul Dinata, S.Pd.	17266	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PPNPN Tenaga Pendukung Perencanaan
52.	Aryo Styo Wibowo, S.T.	107330	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan
53.	Alvidita Beatrix Indayani, S.I.K., M.Sc.	106963	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP
54.	Denny Bijaksana, S.E.	197712012009121001	PRIA	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS

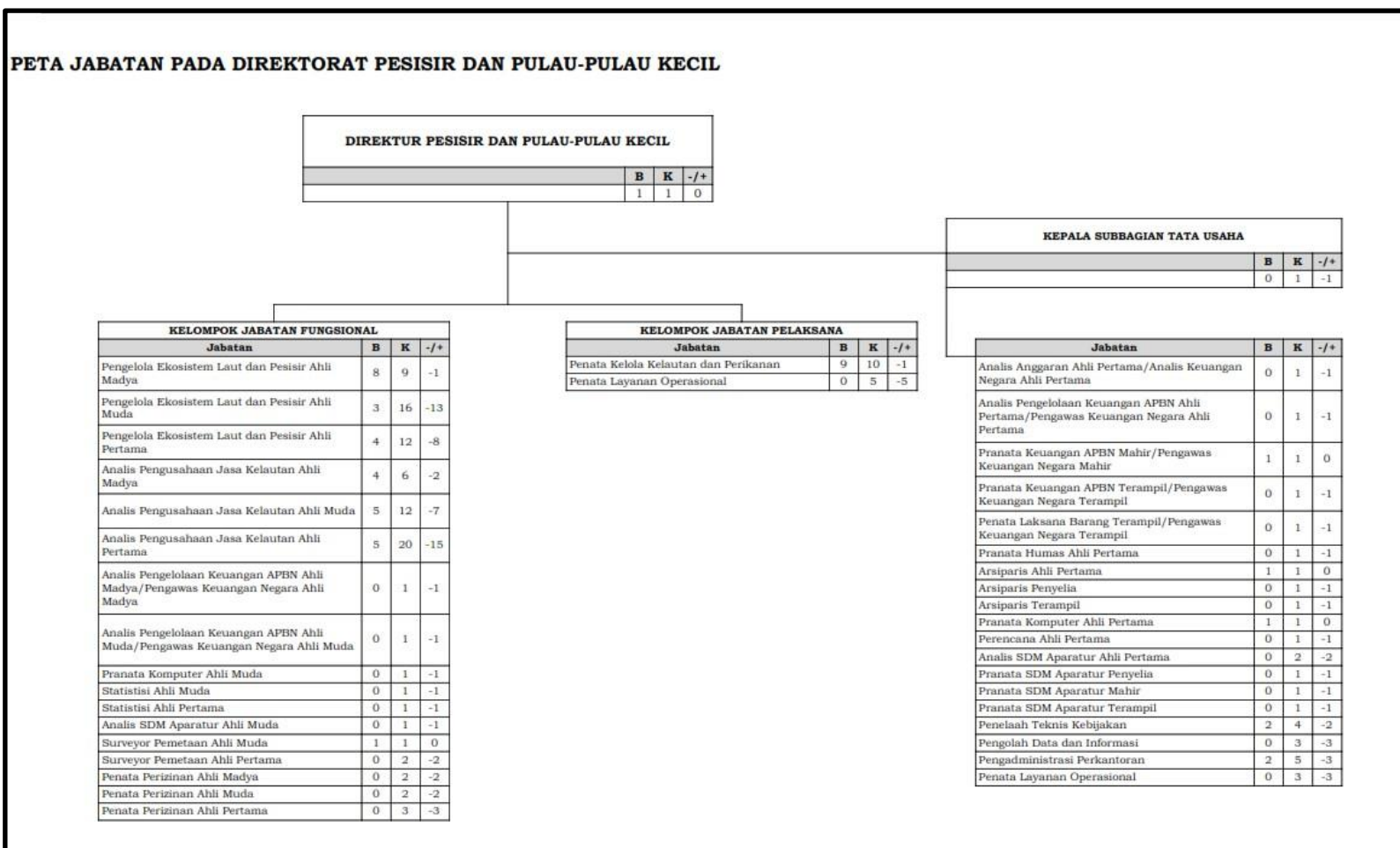
No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
55.	Anindya Arma Risanti, S.Si.	199512212020122003	WANITA	Penata Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS
56.	Amelia Setya Nur Kumala, S.Si.	199407262019022011	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS
57.	Astrid Marietadewi, S.Pi.	198503102010122001	WANITA	Penata Tk. I / III d	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS
58.	Anandinta Permatachani, M.Si.	101744	WANITA	-	-	S-2	Anggota Tim Kerja MHAML	PPNPN Bidang Kegiatan Pendampingan Lokal MHA
59.	Muhammad Arkan Prasidya, S.Kel.	101744	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Tenaga Ahli GIS
60.	Mahatma Alvinia Putri, S.Pi.	107331	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan
61.	Tiodor Sitinjak, M.Si.	196802241995032002	WANITA	Pembina / IV a	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan / Penelaah Teknis Kebijakan	S-2	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
62.	Gusrizal, S.E., M.A., M.Ec.Dev.	197508222006041002	PRIA	Pembina / IV a	Analisis Perencanaan / Penelaah Teknis Kebijakan	S-2	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
63.	Dwi Ismi Wulandari, A.Md.	198005102009122001	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	Penata keuangan APBN Mahir	D-3	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
64.	Mochammad Rizki Rohmatullah, S.Kom.	199307242020121003	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	Pranata computer Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
65.	Didi Suhaendi	197904092007101003	PRIA	Penata Muda / III a	Pengadministrasi BMN / Pengadministrasi Perkantoran	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
66.	Yono Haryono	197801282012121001	PRIA	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi BMN / Pengadministrasi Perkantoran	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
67.	Apriani Nurlaela, S.E.	199804042024212006	WANITA	IX	Arsiparis Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K
68.	Angle Agata nender, S.Pi.	17253	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PPNPN Pengolah Ddata Ops dan Pemeliharaan kantor
69.	Sumiarsih, S.E.	14600	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PPNPN Tenaga Administrasi Ops dan Pemeliharaan Kantor
70.	Achmad Sulaiman, S.Kom.	16329	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PPNPN Tenaga Administrasi Ops dan Pemeliharaan Kantor

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
71.	Agung Aji Nugraha	100380	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
72.	Agus Suparman	17238	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
73.	Enday Maulana	101780	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
74.	Syarif Hidayat	23771	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Keterangan: Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPk.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 Mei 2025 ([link](#)), ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K

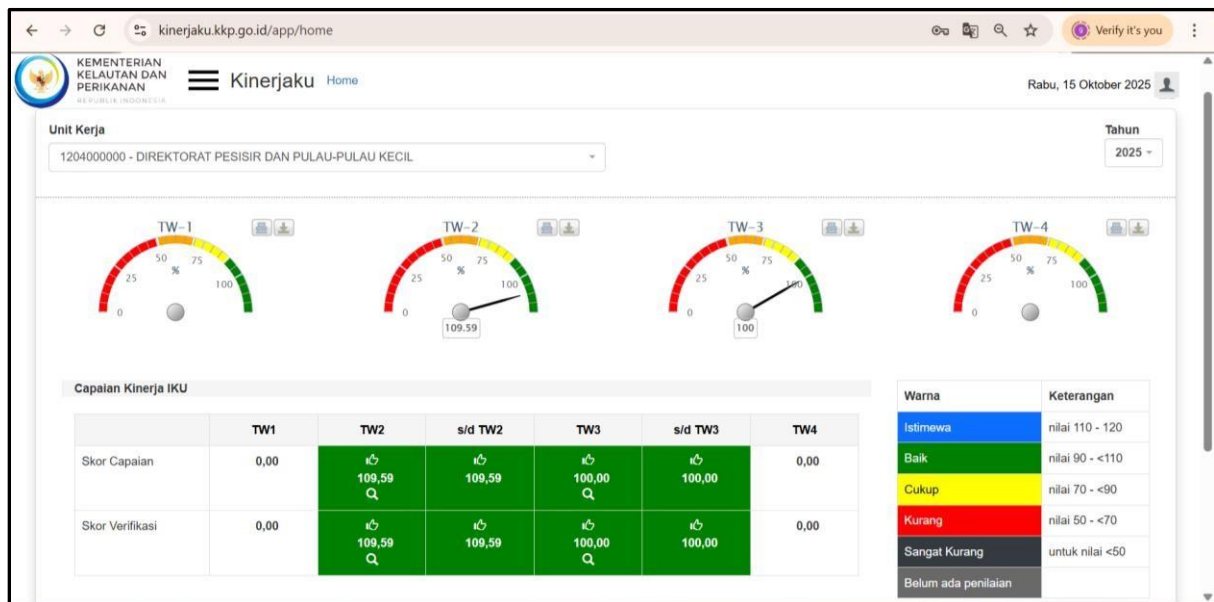
Lampiran 6. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025



Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Lampiran 7.

Rekaman Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode Triwulan III tahun 2025



Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/home>
 Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2025 Pukul 10.15 WIB

Lampiran 8. Penghargaan Yang Diterima Direktorat P3K Sampai Dengan Triwulan III 2025

Piagam Penghargaan Unit Kerja Lingkup DJPKRL Yang Memiliki Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kategori "Istimewa" dengan NKO sebesar 113,28.

Tabel 1. NKO Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I 2025			
		Sebelum Verifikasi	Setelah Verifikasi	Kategori	Keterangan
1	DJPKRL	120	120	Istimewa	Tidak ada perubahan
2	Setditjen PKRL	108.86	108.86	Baik	Tidak ada perubahan
3	Direktorat PRL	102.52	102.52	Baik	Tidak ada perubahan
4	Direktorat P4K	113.28	113.28	Istimewa	Tidak ada perubahan
5	Direktorat Jasa Kelautan	91.09	91.09	Baik	Tidak ada perubahan
6	Direktorat KEBP	113.28	113.28	Istimewa	Tidak ada perubahan
7	BPSPL Padang	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
8	BPSPL Pontianak	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
9	BPSPL Makassar	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
10	BPSPL Denpasar	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
11	LPSPL Sorong	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
12	BKKPN Kupang	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
13	LKKPN Pekanbaru	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
14	LPSPL Serang	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan

Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

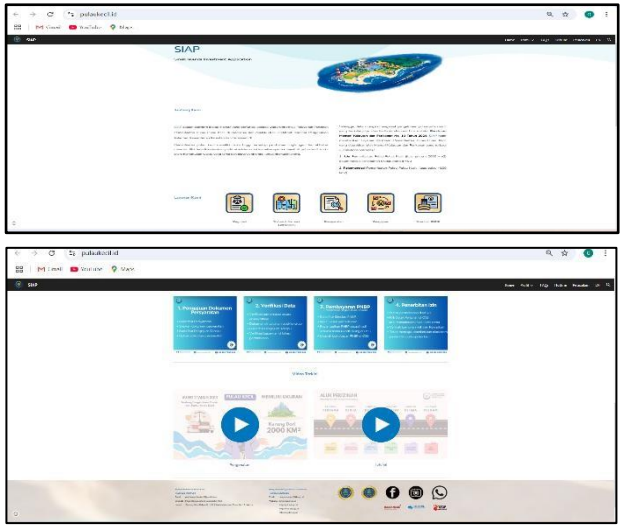
Sumber: Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) ([link](#))

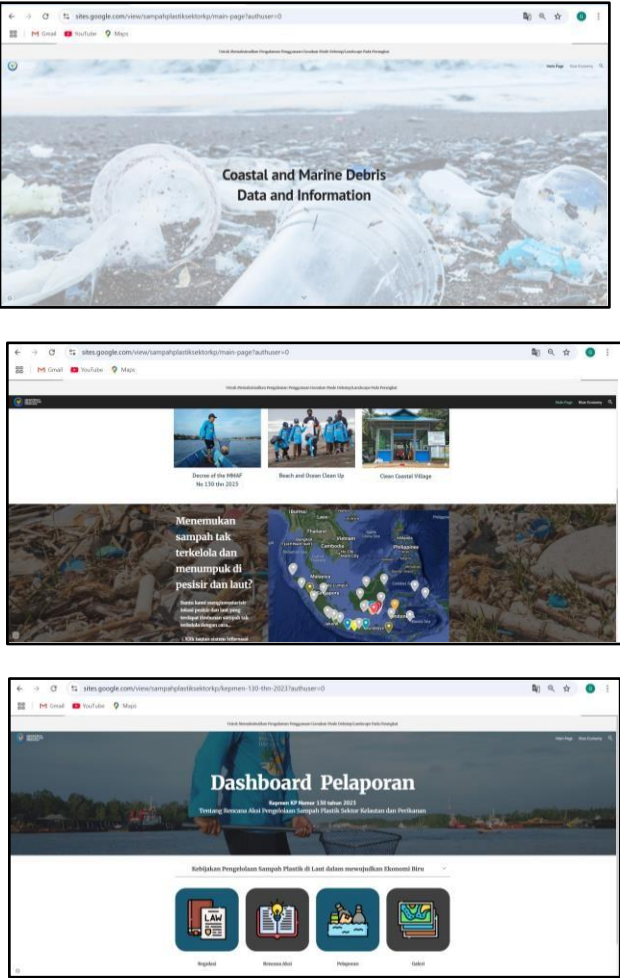


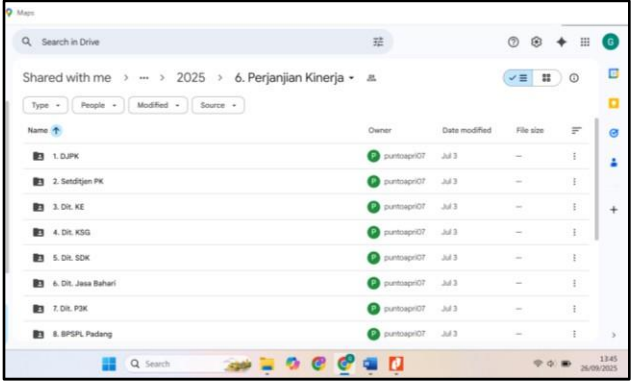
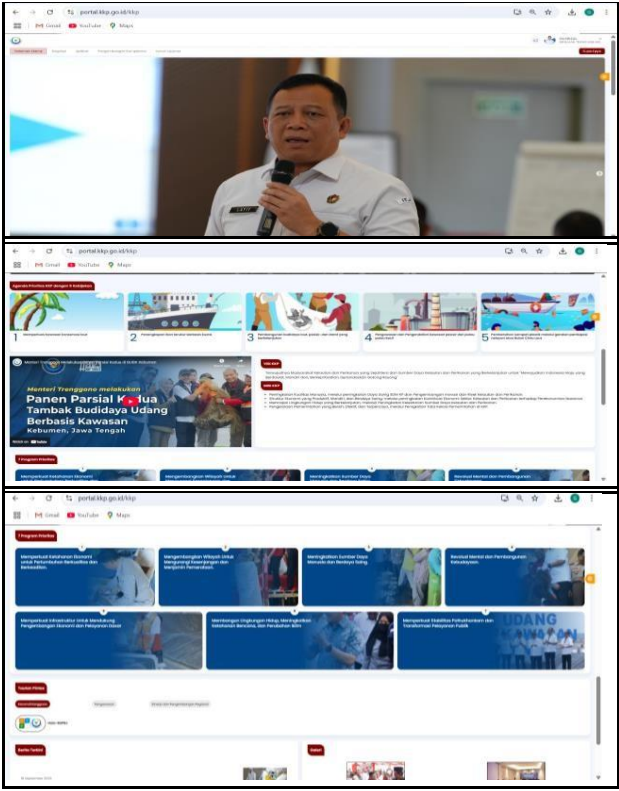
Sumber: Surat Nomor B.170/DJPK/RC.610/V/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Lingkup DJPKRL

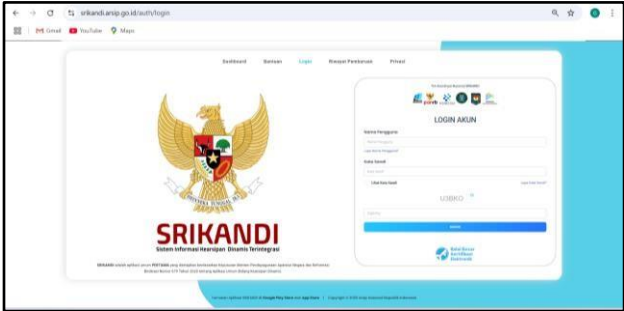
Lampiran 9. Platform Digital atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Salah satu bentuk inovasi yang mendukung peningkatan kinerja organisasi di lingkungan KKP maupun Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah hadirnya *platform digital* maupun aplikasi yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
1.	Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (Aplikasi Kinerjaku) 	Aplikasi "Kinerjaku" adalah Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengukur dan melaporkan kinerja, yang dapat diakses melalui situs <i>website</i> sebagai berikut: http://kinerjaku.kkp.go.id/app/. Aplikasi ini digunakan untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan mengukur kinerja secara triwulanan. Fungsi Aplikasi Kinerjaku di KKP, antara lain: - Pengukuran Kinerja: Mengukur kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). - Pelaporan: Membantu dalam pelaporan kinerja triwulanan kepada atasan. - Monitoring Kinerja: Memantau capaian kinerja secara berkala, yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09), dan Desember (B12). Penggunaan aplikasi ini memerlukan data dukung capaian dari penanggung jawab kegiatan untuk dimasukkan ke dalam sistem.
2.	Small Islands Investment Application (SIAP) 	<i>Small Islands Investment Application</i> (SIAP) adalah <i>platform digital</i> inovatif yang berfungsi sebagai wadah informasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia dan dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Alamat <i>platform</i> SIAP sebagai berikut: https://www.pulaukecil.id/. <i>Platform digital</i> SIAP hadir memberikan Layanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbagi 2 jenis perizinan yaitu : - Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <2000 km²) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) - Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <100 km²).

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		Pada laman <i>platform digital</i> SIAP terdapat menu Profil (berisi Tentang Kami, Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, Berita, dan Galeri), <i>FAQ</i>, Hotline, Pelacakan, dan Equivalent Node (EN). Selain itu, pada laman <i>platform digital</i> SIAP, terdapat Layanan Kami (berisi Regulasi, Sistem Informasi Geospasial, Persyaratan, Pengajuan, dan Simulasi PNBP), Alur Proses (Pengajuan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Data, Pembayaran PNBP, dan Penerbitan Izin), dan Video Terkini (berisi Pengenalan Prizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Alur Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil).
3.	<i>Platform Digital Coastal and Marine Debris Data and Information</i> 	<i>Coastal and Marine Debris Data and Information</i> merupakan <i>platform digital</i> yang dicoba dibangun guna membantu menginventarisasi lokasi pesisir dan laut yang terdapat timbunan sampah tak terkelola dengan cara: 1. Klik tautan sistem informasi geografis (tertera di <i>platform digital</i> tersebut). 2. Input lokasi, dokumentasi dan keterangan yang diperlukan. 3. Data dan informasi secara otomatis tersimpan. Selain itu, <i>platform digital</i> ini terdapat <i>Dashboard</i> Pelaporan Kepmen KP Nomor 130 tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam laman <i>dashboard</i> pelaporan ini juga terdapat Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dalam mewujudkan Ekonomi Biru. Alamat sementara <i>platform digital</i> ini sebagai berikut: https://intip.in/sampahlaut. Namun demikian, nama <i>platform digital</i> ini mengalami perubahan nama menjadi “Sistem Informasi Sampah Laut” dan rencananya alamat <i>platform digital</i> ini akan diganti menjadi : https://sampahpesisirlaut.id Keterangan : <i>Platform digital</i> ini akan terus di <i>upgrading</i> untuk penyempurnaan

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
4.	<i>Platform SAKIP Berbasis Google Site</i> 	<i>Platform SAKIP berbasis google site ini meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Platform ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) namun setiap satuan kerja (satker) lingkup DJPK baik satker pusat maupun satker UPT disediakan folder per masing-masing tema dalam SAKIP lalu mengunggah (upload) dokumen-dokumen terkait pengelolaan SAKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja) ke dalam folder masing-masing satker per tema dalam google site tersebut.</i>
5.	<i>Portal Collaboration Office KKP</i> 	<i>Portal collaboration office KKP ada sejak tahun 2023 yang memuat berbagai modul seperti korespondensi, email, agenda, dan lainnya. Dokumen ini juga memberikan petunjuk penggunaan portal serta daftar nama pejabat terkait.</i> Portal dapat diakses melalui laman https://portal.kkp.go.id/. Modul yang khusus tersedia untuk level Menteri, Eselon I, dan Eselon II lingkup pusat adalah <i>Dashboard</i>, <i>Preparing</i> dan <i>Sharing</i>, serta Kalender. Modul yang tersedia untuk seluruh pegawai adalah Korespondensi, <i>E-mail</i>, Kebijakan, Pengetahuan, <i>Digital Sign</i>, <i>Employee Self Service</i>, Agenda Rapat/Event, <i>Task Management</i>, Repositori, <i>Real Time Collaboration</i>, dan <i>Helpdesk</i>.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
6.	Aplikasi Umum "SRIKANDI" 	Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Aplikasi Srikandi adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang merupakan aplikasi umum bidang kearsipan untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah mendukung pengelolaan arsip elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat menciptakan memori kolektif bangsa. Aplikasi ini dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara ANRI, KemenPAN-RB, Kemenkominfo, dan BSSN. Tujuan Utama Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: a. Mewujudkan SPBE: Mendukung pengelolaan arsip berbasis digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. b. Meningkatkan Kualitas Kearsipan: Memberikan peningkatan kualitas dan keandalan dalam pengelolaan arsip dinamis di seluruh instansi pemerintah. c. Menciptakan Efisiensi: Mempermudah proses administrasi pemerintahan, termasuk pembuatan surat menyurat, verifikasi, klasifikasi, hingga pemusnahan arsip secara elektronik. d. Integrasi Antar Instansi: Memfasilitasi akses dan komunikasi terpadu antar lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. e. Program Nasional: Ditetapkan sebagai aplikasi umum wajib yang harus diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah. Fungsi dan Manfaat Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: a. Pengelolaan Arsip Elektronik: Mengelola arsip elektronik secara digital, menggantikan kebutuhan akan kertas dan lemari arsip fisik. b. Akses Mudah: Dapat diakses melalui browser dengan mengunjungi laman resminya di srikandi.arsip.go.id. c. Standarisasi Format: Membantu standarisasi format surat elektronik untuk menjaga konsistensi dan profesionalisme.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		d. Keamanan Data: Menjamin kerahasiaan surat-surat dinas yang masuk melalui aplikasi. e. Efisiensi Anggaran: Mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor). Keterangan : Aplikasi SRIKANDI di KKP khususnya di Ditjen PK hanya untuk pejabat eselon 1 dan 2 saja, sedangkan di pegawai belum ada.